

# Perempuan

DALAM LINGKARAN  
**KDRT**

The background of the cover features a woman wearing a light-colored headscarf, looking down with a somber expression. Overlaid on the right side of the image is a large, dark, clenched fist, symbolizing protest or solidarity. The overall color palette is a gradient of warm tones, from deep red at the top to a lighter orange at the bottom.

SOFIA HARDANI  
WILAELA  
NURHASANAH BAKHTIAR  
HERTINA

*Perempuan*  
DALAM LINGKARAN  
***KDRT***

PEREMPUAN  
dalam Lingkaran KDRT

Sofia Hardani  
Wilaela  
Nurhasanah Bakhtiar  
Hertina



Pusat Studi Wanita (PSW)  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sultan Syarif Kasim  
Riau 2010

## **Perempuan dalam Lingkaran KDRT**

Copyright ©2010, Pusat Studi Wanita  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim  
Riau

Penulis:

Sofia Hardani

Wilaela

Nurhasanah Bakhtiar

Hertina

Penyunting:

Sofia Hardani

Wilaela

Desain Cover:

Arif Djangkana

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak seluruh  
atau  
sebagian isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis  
dan penerbit

Pekanbaru 2010

ISBN 978 602 843 776 9

## KATA PENGANTAR



*P*UJI dan syukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmatNya buku PEREMPUAN DALAM LINGKARAN KDRT ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk Junjungan Alam Rasulullah Muhammad saw. yang telah membawa ajaran *rahmatan lil 'alamin*.

Sudah lama sekali Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau berkeinginan untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian para pengurus/peneliti PSW yang berkaitan dengan masalah keadilan/kesetaraan gender dalam bentuk buku. Akan tetapi, berbagai kendala menghalangi terwujudnya niat tersebut, khususnya yang menyangkut pendanaan serta hal-hal teknis lainnya. Pada tahun 2009, dengan berbekal tekad yang kuat, tanpa *funding*, keinginan kuat tersebut mulai direalisasikan. Tahap pertama yang dilakukan adalah menginventarisir beberapa hasil penelitian dari pengurus/peneliti PSW yang bertema sama yang belum pernah dipublikasikan. Hasilnya, antara lain, terkumpulnya beberapa penelitian yang berkaitan dengan KDRT. Meskipun penelitian tersebut dilakukan beberapa tahun yang lalu, tetapi substansinya masih tetap relevan dengan masa kini.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah persoalan lama yang hingga kini masih terus menjadi wacana publik. Diawali dari cerita-cerita lama yang menunjukkan bahwa perempuan

memang selalu mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam tradisi Yunani Kuno misalnya, perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, tidak mempunyai independensi dan hanya diabdikan untuk kepentingan laki-laki. Hal ini pernah digambarkan oleh Aristoteles bahwa hubungan laki-laki dan perempuan bagai budak dengan tuannya, sehingga perempuan dapat diperlakukan sesuka hati.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan potret buram yang belum juga terhapus sampai era global seperti sekarang ini. Hampir setiap hari dapat kita temukan berita, baik melalui media elektronik maupun cetak, ataupun langsung didengar dari tetangga atau kolega, tentang perlakuan kekerasan suami kepada istri, perlakuan kekerasan seorang ibu kepada anaknya, perlakuan kekerasan majikan kepada pembantu, dan sebagainya, pada umumnya terjadi pada perempuan di dalam rumah tangga. Hal-hal tersebut menjadi bukti nyata nasib perempuan yang kelim dalam lingkaran kekerasan.

Kita patut bersyukur dengan hadirnya Undang-undang yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang disahkan menjadi UU PKDRT, yaitu UU No. 23 tahun 2004. Undang-undang ini sampai sekarang senantiasa menjadi salah satu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. Dan tentu juga menjadi kewajiban Pusat Studi Wanita, dan semua komponen masyarakat, agar penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga segera diaktualkan secara menyeluruh.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan bukti akurat kondisi perempuan Riau dalam lingkaran kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan buku ini dapat menambah bahan informasi dan bahan renungan bagi semua pihak untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan bermanfaat dalam kerangka menjalankan amanah dalam kehidupan bernegara dan beragama, yaitu amanah undang-undang dan amanah keadilan yang diserukan dalam ajaran agama.

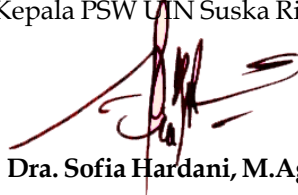
Buku ini dapat terbit berkat dukungan dari berbagai pihak, yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu. Bagi mereka dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terutama bapak Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. HM Nazir atas segala bentuk dukungan dan kepercayaan yang diberikan sehingga PSW UIN Suska Riau dapat berkarya dalam memberikan kontribusi bagi perjuangan perbaikan sumber daya manusia, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada sahabat-sahabat diskusi di Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau serta seluruh pengurus PSW yang selalu memberi dukungan dan sumbangan pemikirannya. Kebaikan mereka memberikan kekuatan penggugah (*subversive force*) bagi kerangka berfikir buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat.

Pekanbaru, Juni 2010

Kepala PSW UIN Suska Riau

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Sofia Hardani', with a long horizontal stroke extending to the left.

**Dra. Sofia Hardani, M.Ag.**

NIP. 1963053019932001





## Daftar Isi

<b>I. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Pengantar .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	3
B. Kekerasan Berbasis Gender .....	4
1. Gender .....	4
2. Kekerasan .....	7
3. KDRT .....	10
C. Teori dan Aksi .....	17
1. Teori Penindasan Gender (Theories of Gender Oppression) .....	17
2. Sejarah Aksi .....	23
D. Seputar Buku .....	26
<b>II. Identifikasi Akar Masalah Kekerasan     dalam Tumah Tangga di Riau .....</b>	<b>31</b>
A. Pendahuluan .....	33
B. Kerangka Pikir .....	37
C. Hasil Penelitian .....	41
1. Karakteristik Informan .....	41
2. Pendapat Suami-Istri tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	43
3. Analisis Mengenai Jenis dan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	45

4. Analisis Tentang Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Suami-Istri dalam Rumah Tangga .....	50
5. Pengetahuan Suami-Istri Mengenai Undang-Undang KDRT .....	57
6. Kondisi Perkawinan Korban .....	58
D. Penutup .....	59
a. Kesimpulan .....	59
b. Saran .....	62

### **III. PEMBANTU RUMAH TANGGA DI PEKANBARU:**

<i>Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Korban Pembantu Perempuan .....</i>	<i>67</i>
A. Pendahuluan .....	69
B. Berbagai Alasan Seseorang menjadi PRT .....	74
C. Majikan Versus PRT .....	78
D. Dilema Relasi Majikan - PRT: Antara Butuh dan Kesal .....	82
E. Problem PRT Sebagai Pekerja Sektor Informal .....	86
Hak-hak PRT .....	88
Kewajiban PRT .....	97
F. Simpulan .....	100

### **IV. Dampak Perjudian terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu ....**

A. Pendahuluan .....	111
B. Setting Lokasi Penelitian .....	116
C. Latar Belakang Keluarga Korban KDRT .....	120
D. Bentuk-bentuk KDRT yang terjadi pada responden .....	128
a. Kekerasan Psikologis .....	129
b. Kekerasan Ekonomi .....	132
c. Kekerasan Fisik .....	133
E. Upaya Penanggulangan KDRT .....	135
F. PENUTUP .....	137

<b>V. KDRT terhadap Perempuan dan Penyelesaiannya Versi Pengadilan Agama</b>	
A. Pendahuluan .....	134
B. Metodologi Penelitian .....	146
C. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia .....	147
1. Pengertian dan Dasar Kebolehan Perceraian .....	147
2. Alasan-alasan yang Membolehkan Perceraian .....	150
3. Bentuk-Bentuk Perceraian di Pengadilan Agama .....	154
D. KDRT terhadap Perempuan Perspektif Uu No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam .....	156
1. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 .....	156
2. Perspektif Hukum Islam .....	158
E. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Istri pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru .....	163
1. Kekerasan fisik .....	169
2. Kekerasan psikhis .....	170
3. Kekerasan Ekonomi .....	171
4. Kekerasan seksual .....	172
F. Penyelesaian Kasus Gugatan Perceraian Karena KDRT .....	178
G. Penutup .....	181
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>187</b>



# *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Pengantar*

---

Sofia Hardani & Wilaela

---

## A. PENDAHULUAN

Buku ini merupakan kumpulan hasil penelitian PSW UIN Suska Riau tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan-antara tahun 2004 sampai tahun 2007. Sampai saat buku ini diterbitkan, persoalan KDRT ternyata tidak pernah berhenti terjadi, bahkan semakin intens. Mereka yang umumnya menjadi korban adalah istri, anak, dan pembantu rumah tangga (PRT). Kasus Gia yang dipasung ayahnya, Bahtiar, adalah sebuah contoh bagaimana kekerasan ternyata dilakukan oleh orang yang semestinya memberi kasih sayang kepada balita malang tersebut. Begitupun, media begitu kerap memberitakan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh majikan. Kekerasan ini tidak hanya terjadi di dalam keluarga yang berada dalam status ekonomi lemah, tetapi juga terjadi dalam keluarga menengah ke atas. Mengapa kekerasan dalam rumah tangga terus berlangsung? Untuk itu bab pertama ini memberikan pengantar akar persoalan yang menyebabkan perempuan (dan anak) dalam posisi lemah dan mudah menerima kekerasan dari sekitarnya, termasuk di dalam rumahnya.

*Gender violence* menimpa nyaris seluruh ruang dalam kehidupan perempuan, mulai dari rumah, tempat kerja, tempat umum, dan jalanan. Meskipun wujud ragam kekerasan tersebut bervariasi dari satu budaya ke budaya lain, namun ada satu benang merah yang muncul mengatasi batasan suku/ras, agama maupun kelas sosial ekonomi, yaitu bahwa perempuan rentan terhadap tindak kekerasan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli tentang hak-hak asasi manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Utara menyimpulkan bahwa kekerasan domestik terjadi pada setiap satu dari empat keluarga dan bahwa satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan dari pasangan hidupnya (NSW *Child Protection Council*, 1996:5). Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, juga menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia; salah satu diantaranya adalah hak-hak perempuan.

*Domestic violence*, atau kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT), pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Masalah KDRT tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Diskriminasi sendiri telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan bentuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang dirumuskan oleh PBB. Dasar yang lebih mutakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, dampak UU tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak.

Kekerasan dalam rumah tangga atau bisa terjadi di antara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami pada istrinya atau sebaliknya, seorang ayah atau ibu kepada seorang anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau laki-laki kepada saudara perempuan/laki-laki lainnya, dan seterusnya. Penyebab timbulnya KDRT juga beragam. Menurut Moors (1995:3), kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, karena istri mungkin akan direndahkan oleh suami. Selanjutnya Gelles (1995) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah ketidakmandirian istri secara ekonomi. Kemudian, Sharma (1994: 303-326) berpandangan bahwa kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh seorang perempuan akan meningkatkan harga dirinya dan menyebabkannya memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hubungan dengan suaminya. Walaupun demikian, tidak selalu perempuan yang mandiri secara ekonomi terbebas dari persoalan KDRT.

## **B. KEKERASAN BERBASIS GENDER**

### **1. Gender**

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari analisis gender. Kosakata gender pertama kali disinggung oleh Oakley (1987), dalam upaya membedakan seks (jenis kelamin) secara biologis dan realitas konstruksi

sosial budaya atas laki-laki dan perempuan. Dalam sosiologi, “gender” diidentifikasi sebagai peranan yang harus dijalankan oleh perempuan dan laki-laki yang terbentuk secara sosial (Heyzer, 1991: 14 ).

Gender adalah konstruksi sosial yang membedakan peran perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat yang diturunkan secara kultural, terinternalisasi menjadi keparcayaan turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dan diyakini sebagai ideologi. Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) yang sangat panjang ini akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi. Perbedaan gender dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Padahal yang dapat disebut sebagai kodrat Tuhan hanya karena perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Perempuan bisa hamil, haid dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak mungkin. Fakta biologis inilah yang dimaksud sebagai “kodrat” atau suatu konstruksi (bangunan) yang *given* dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain (antara laki-laki dan perempuan). Adapun fakta sosial seperti mengurus rumah tangga, bercocok tanam, mengasuh anak, dan berbagai aktifitas yang lain adalah konstruksi yang dapat dipertukarkan. Inilah letak perbedaan yang mendasar antara seks (jenis kelamin) dan gender (Fakih, 1999: 9-11).

Dari ke dua fakta tersebut melahirkan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang seperti tampak pada tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Pembedaan Peran Perempuan dan Laki-Laki**  
**dalam Berbagai Bidang**

Aspek yang dibandingkan	Perempuan	Laki-laki
Karakteristik sifat	Feminim	Maskulin
Ruang lingkup kerja	Domestik	Publik
Stereotipe kerja	Pencari nafkah tambahan	Pencari nafkah utama
Pembagian kerja gender	Kerja feminim	Kerja maskulin
	Reproduktif (mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dsb.	Produktif (kerja yang menghasilkan uang)

Sumber : Nurhayati (1999:36)



Tabel di atas memperlihatkan pemilahan realitas sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender, yang semestinya untuk kerangka kerjasama dan saling membantu. Namun, manusia ternyata memahami pemilahan tersebut sebagai suatu yang mutlak, sehingga menimbulkan pembekuan peran. Pembekuan peran inilah yang kemudian menimbulkan persoalan serius, berkaitan dengan citra perempuan dan laki-laki. Aplikasi citra tersebut melahirkan berbagai ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial-budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Dalam realitas sosial ada pembagian peran bahwa perempuan lebih ditekankan perannya di sektor domestik karena fungsi reproduksinya, sedangkan laki-laki lebih berperan di ranah publik (Budiman, 1992:2).

Penempatan perempuan pada sektor domestik, masih menurut Budiman (1992:5), membuat perempuan bergantung kepada laki-laki karena terperangkap oleh kehidupan keluarga. Pembagian kerja secara seksual ini, pada dasarnya mengacu pada teori "*nature*" (alamiah) yang beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan tersebut dan berlaku universal. Teori "*nature*" beranggapan bahwa perbedaan ini tercipta melalui proses belajar dari lingkungan sosial. Sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan dengan demikian dibuat oleh manusia, ada kemungkinan untuk mengubah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak menguntungkan perempuan (Megawangi, 2001: 93-95).

Ideologi gender melahirkan perbedaan posisi perempuan dan laki-laki yang diyakini sebagai kodrat Tuhan, yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, gender mempengaruhi keyakinan tentang bagaimana seharusnya perempuan berfikir dan bertindak. Perbedaan posisi perempuan dan laki-laki akibat gender tersebut, ternyata menciptakan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, *stereotype*, yang merupakan sumber utama dari tindak kekerasan terhadap perempuan. Keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus, posisinya di bawah laki-laki, melayani, dan bukan kepala rumah tangga, menjadikan

perempuan sebagai *property* (barang) milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut “*Gender-Related-Violence*”.

## 2. Kekerasan

Kata kekerasan mengingatkan kita pada seluruh situasi kasar, menyakitkan, dan menimbulkan dampak negatif. Namun, kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekerasan. Oleh karena itu, bentuk perilaku opresif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan. Secara terminologi, kekerasan atau *violence* adalah gabungan dua kata “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” berasal dari kata “*ferre*” yang berarti (membawa). Dalam kamus bahasa Indonesia (1989:425), “kekerasan” diartikan dengan perihai yang bersifat/berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Soetandyo dalam Mufidah (2004: 145-146) mendefinisikan: kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah), bersarakan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan. Kekerasan menurut Galtung adalah “*any avoidable impediment to self realization*” (kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang mengaktualisasikan potensi diri secara wajar) (Mas’ud, 2003:79). Maksudnya, kekerasan selalu berhubungan dengan

tindakan atau perilaku kasar, mencemaskan, menakutkan, dan selalu menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan bagi korbannya, baik secara fisik, psikis maupun sosial.

Menurut Mansour Fakih (1999:17), kata “kekerasan” merupakan padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan di sini sebagai suatu serangan atau *invasi (assault)* terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Kekerasan terhadap seseorang, baik sumber maupun alasannya bisa bermacam-macam, seperti politik, keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme. Adapun kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut kekerasan gender (*gender related violence*).

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Batas yang lebih khusus tentang kekerasan terhadap perempuan disebut dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, pasal 1: “kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang bersifat gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik”.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Dalam perspektif gender, kondisi ini kemudian dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarkhi yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia, yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan bernegara

(Mas'udi, 1997:58). Kultur yang patriarkhi ini secara turun-temurun menolak perbedaan perilaku, status, dan otoritas yang berkembang antara dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang kemudian berkembang menjadi suatu hirarki gender. Hirarki gender menjelaskan situasi tempat kekuasaan dan kontrol terhadap tenaga kerja, sumber-sumber daya, dan produk yang berhubungan dengan maskulinitas dan otoritas sosial terhadap perempuan dilakukan melalui peran ayah dan suami.

Kultur patriarkhi mengembangkan berbagai keyakinan dan ideologi yang selanjutnya menjadi suatu alat untuk mempertegas keberadaan kultur tersebut dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah ideologi seksualitas. Dalam ideologi tersebut identitas seksualitas perempuan dikonstruksi oleh laki-laki sekaligus dikontrol. Pengontrolan ini bertujuan agar perempuan selalu berada di tempatnya sekaligus memperkuat kultur patriarkhi. ideologi seksualitas semacam ini diistilahkan dengan "*sexual terrorism*", yaitu suatu sistem ideologi yang laki-lakinya mampu menakuti perempuan untuk mendominasi dan mengontrolnya dan semua dimanifestasikan melalui kekerasan (Hess dan Ferre, 2002:18).

Ada beberapa kategori kekerasan gender, yaitu bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan, KDRT, penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (genital mutilation), sunat misalnya terutama dengan anggapan bahwa sunat yang diyakini masyarakat untuk mengontrol kaum perempuan. Selain itu, terdapat pula kekerasan yang dilakukan oleh negara, pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana, kekerasan terselubung (molestation), pelecehan seksual (*sexual and emotional harassment*). Di antara bentuk pelecehan seksual adalah menyampaikan lelucon jorok, menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor, menginterogasi tentang kegiatan seksual, menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa izin (Fakih, 1999: 19-20). Bentuk lain kekerasan gender yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan adalah: perdagangan perempuan (woman trafficking), kekerasan di ranah teknologi informasi (termasuk pornografi), kekerasan yang dilakukan oleh

pacar (*dating violence*), eksploitasi dan kekerasan di sektor buruh, pelanggaran hak asasi perempuan dalam konflik bersenjata, kelompok perempuan minoritas, perempuan cacat, dan penelantaran lanjut usia.

### 3. KDRT

Dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, ada tiga ranah kekerasan: 1) kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) atau KDRT; 2) Kekerasan di masyarakat (*public domain*); dan 3) kekerasan yang dilakukan oleh negara (Leksono, 2006:12-16). Di semua ranah, kekerasan bisa berlangsung dan menimpa siapa saja. Sepanjang sejarah, kekerasan berlangsung terus di tiga ranah tersebut dan kerap menimpa kaum lemah, di antaranya perempuan dan anak-anak. Tulisan dalam buku ini fokus kepada persoalan kekerasan yang berada dalam ranah domestik (*domestic violence*) atau yang dikenal dengan istilah KDRT.

Defenisi KDRT menurut UU PKDRT adalah: perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, meliputi: (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

KDRT adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan ini bukan hal yang biasa terjadi semacam ketegangan atau konflik sehari-hari seperti beda pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau memaki sesaat. KDRT lebih buruk lagi. Lazimnya pelakunya mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Dengan kata lain KDRT adalah kekerasan yang biasa terjadi jika di dalam rumah tangga dimana relasi antara pelaku dan korban

tidak setara atau sekufu (Farkha, 1999:21-22).

Secara umum diterima bahwa yang termasuk dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan kontrol dan kekuasaan (*personal power*) dengan kekuasaan atas orang lain (*power over other*), kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis, dan ekonomi serta dilakukan oleh seorang individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim (JP. 26:111).

### **Pelaku dan Korban**

Tindakan kekerasan seperti ini dapat terjadi terhadap setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang ras, etnik, atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu. Mengenai pelaku KDRT, menurut Nur Imam Subono (JP, 26:99), delapan dari sepuluh keluarga yang memiliki masalah kekerasan domestik sudah dapat diduga kalau pelakunya adalah laki-laki. Mereka ini berperan sebagai suami, kakek, paman atau kakak. Jika korbannya PRT, biasanya pelaku adalah mereka yang disebut majikan seperti tuan, anak-anak majikan, nyonya, dan orang-orang yang tinggal di dalam rumah.

Bahkan dalam berbagai studi kasus, pelaku KDRT dengan bentuk kekerasan seksual ternyata dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang berperan sebagai ayah kandung atau tiri, paman, juga kakek (Kompas, Senin 20 September 2001). Sementara korban terbesar dalam kasus KDRT adalah perempuan yang kebetulan di dalam rumah menjadi istri, anak, atau PRT, termasuk orang lain yang tinggal di dalam rumah.

Persoalan KDRT selama ini memang kerap kali hanya dikaitkan dengan kekerasan yang mengambil korban istri dan anak, dan seakan-akan menisbikan kekerasan yang dialami oleh PRT. Mungkin karena selama ini keberadaan PRT seperti bayang-bayang. Kehadirannya dibutuhkan, namun jasanya tidak pernah masuk dalam hitungan. Bahkan statistik pun berkelas. Tak pernah ada sumbangan PRT terhadap produktifitas majikan yang dimasukkan ke dalam statistik resmi. Padahal, produktivitas suatu kota, Jakarta saja misalnya, jelas menurun ketika sebagian besar keluarga ditinggalkan PRT-nya untuk mudik Lebaran.

KDRT yang dialami oleh istri sarat dan kental dengan dimensi gender karena istri tidak memiliki akses informasi terhadap hak-haknya sebagai manusia. Begitupun KDRT terhadap anak, mudah terjadi karena posisi seorang anak yang berada di dalam kendali (baca tanggung jawab) orang tuanya. Sementara KDRT terhadap PRT justru mengandung beberapa dimensi sekaligus, diantaranya gender, ekonomi, dan kelas. Belum lagi bahwa pekerjaan PRT berada di sektor informal dimana hak-haknya tidak terlindungi hukum selama pengelola jasa PRT tidak melaporkan PRT yang dikelolanya.

Kembali kepada pengertian korban, dalam pengertian yang agak berbeda, laki-laki sendiri dapat dikategorikan sebagai korban. Banyak kasus memperlihatkan gejala gangguan jiwa bagi laki-laki pelaku kekerasan seperti merasa frustrasi, rasa bersalah, depresi dan lainnya. Mereka umumnya sadar telah melakukan kesalahan dengan menyakiti keluarganya sendiri atau orang yang tinggal di dalam rumahnya seperti PRT, sehingga mereka menyesal. Namun hal ini akan terulang kembali bagaikan siklus kekerasan. Di satu sisi, pihak korban semakin imun atau kebal terhadap kekerasan dan di sisi lain pelaku semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas kekerasannya. Dalam tataran inilah pengertian korban itu mencakup perempuan dan laki-laki yang memerlukan dampingan.

## Cycle of Violence

*Cycle of Violence* atau siklus KDRT menurut Walker dan Gelles (Kompas, Senin 12 Juli 2004), umumnya melalui tiga fase: (1) fase tegang/ketegangan yang meningkat; (2) fase akut/penganiayaan akut; (3) keadaan tenang/ fase bulan madu semu.

Pada fase pertama yaitu ketegangan yang meningkat, pelaku kekerasan mulai membuat insiden kecil, atau kekerasan lisan, seperti memaki, mengancam, dan kekerasan fisik kecil-kecilan. Karena sering muncul ketegangan, korban mencoba menenangkan atau menyabarkan pelaku dengan cara apapun yang menurutnya akan membawa hasil. Jika korban tidak berhasil, maka di dalam dirinya akan timbul perasaan tidak banyak yang dapat ia lakukan karena sekuat apapun usahanya, kekerasan masih terus terjadi. Selanjutnya pelaku cenderung melakukan penganiayaan kecil kepada korban terutama ketika tidak ada orang lain. Korban pun memiliki perasaan takut dan akan menarik diri. Sangat mungkin ketegangan antara

pelaku dan korban mulai bertambah.

Fase kedua yaitu tahap penganiayaan dimana ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Pelaku kehilangan kendali atas perbuatannya. Pelaku dalam konteks ini bermaksud memberi pelajaran terhadap korban. Bentuk penganiayaan bervariasi mulai dari tamparan, pukulan, tendangan, dorongan, cekikan, bahkan seringkali penyerangan dengan menggunakan senjata baik tumpul maupun tajam. Penganiayaan akan berhenti jika korban memutuskan pergi dari rumah, masuk rumah sakit, atau pelaku menyadari kesalahannya.

Fase ketiga, yaitu tahap permintaan maaf dan kembali mesra. Sering pula disebut sebagai fase bulan madu semu. Setelah terjadi penganiayaan, kadang-kadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan terhadap korban.

Permintaan maaf pelaku tersebut kerap membuat korban memutuskan untuk memaafkan perbuatan pelaku dan menganggap hal tersebut tidak akan terulang kembali. Setelah itu mereka membangun relasi baru yang harmonis dan berusaha melupakan kejadian sebelumnya. Jika tidak muncul kesadaran utuh dari pelaku, maka tahap ini tidak akan bertahan lama, sampai akhirnya muncul kembali ketegangan yang akan berlanjut lagi dari fase pertama. Frekwensi atau jarak ketiga rantai fase tersebut berhubungan dengan tingkat keparahan kekerasan dan kondisi imun korban.

Berikut ini penjabaran tentang siklus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Gambar 2.2. Siklus KDRT





*Keterangan:*

Cinta (Rasa cinta dan sayang kepada suami/isteri, memaklumi, mencoba untuk mengerti). Harapan (berharap akan berubah menjadi baik). Teror (ancaman setiap saat akan dipukul, ditinggal, tidak dapat menjalani hidup sendirian tetapi ketakutan dan sakit hati atas perlakuan pasangannya. Pola ini selalu berulang dan sulit untuk diputuskan mata rantainya, kecuali kalau ada kesadaran untuk berubah dari suami atau istri.

Siklus ini sendiri sangat mempengaruhi pengambilan keputusan korban terhadap masalah KDRT yang dideritanya. Mereka cenderung membiarkan siklus berlanjut sekian lama untuk kemudian baru mengambil jalan keluar seperti perceraian atau mengadukan ke polisi atau memutuskan untuk meminta pendampingan. Bertahannya korban dalam siklus kekerasan menurut Ciciek Farcha (1999:32) disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Jika korban adalah istri, maka ia takut kepada pembalasan suami, tidak ada tempat bergantung secara ekonomi, takut dicera masyarakat, rasa percaya diri yang rendah, demi kepentingan anak, tetap cinta kepada pelaku, dan demi mempertahankan perkawinan. Jika korbannya adalah pembantu, maka karena ketergantungan ekonomi, takut, dan terancam merupakan alasan ketakberdayaan PRT dan membiarkan dirinya sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan majikan.

Bervariasinya status korban kasus KDRT menjadi menarik untuk dicermati sekaligus menepis mitos bahwa KDRT hanya berlaku bagi golongan ekonomi lemah saja. Anggapan keliru selama ini adalah alasan terjadinya KDRT dikarenakan masalah ekonomi dan finansial keluarga. Namun, hal ini tidaklah menutupi realitas banyaknya kasus KDRT yang dialami mereka yang tergolong rumah tangga kelas menengah ke atas. Apalagi kasus KDRT dimana pembantu adalah korbannya, umumnya berlangsung di kalangan keluarga dengan status sosial menengah ke atas. Karena dari golongan inilah bagian terbesar yang membutuhkan layanan jasa PRT. Sekalipun untuk konteks masyarakat sekarang, PNS golongan rendah dan buruh sektor formal juga banyak yang membutuhkan jasa PRT.

Minimnya laporan tentang kasus KDRT di kalangan ekonomi menengah ke atas juga disebabkan *image* dan persepsi

umum tentang “kebahagiaan” golongan ini sangat memegang peranan penting, sehingga kasus KDRT yang dipandang sebagai aib sedapat mungkin ditutupi. Kita mungkin tidak akan pernah tahu bahwa di balik rapatnya pintu dan jendela, di balik tembok tinggi pemukiman mewah, ada banyak kasus kekerasan domestik yang sedang terjadi.

## Bentuk

Bentuk-bentuk KDRT dapat dibagi dua, yaitu fisik dan non fisik (psikis). Mulai dari korban diremehkan, tidak dihargai, dihina, diejek, ditelantarkan secara emosional dan ekonomi, sampai ditampar, ditendang, dipukul, bahkan dibunuh. Dua bentuk KDRT ini diderivasikan ke dalam empat ranah berdasarkan perspektif kekuasaan dan kontrol pelaku, sebagaimana tertuang dalam UU PKDRT sebagai berikut.

- 1) *Kekerasan psikis* adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Misalnya pelaku melakukan berbagai kekerasan seperti mencaci, mengejek, memaki, menghina, yang menyebabkan korban terlukai secara psikologis sehingga menjadi stress, stress pasca trauma (pelaku sengaja membuat korban takut dan cemas), depresi, atau pelaku tidak memiliki belas kasih.
- 2) *Penelantaran Rumah Tangga* adalah: (1) menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) penelantaran pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketegantungan ekonomi daengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 8).
- 3) Penelantaran rumah tangga atau memakai istilah lain sebagai *kekerasan ekonomi* ini dapat dibahasakan lain dengan setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja di dalam maupun di luar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi dan menelantarkan anggota keluarga. Misalnya, tidak diberi gaji, gajinya sering dipotong jika melakukan kesalahan, korban tidak diizinkan memegang uang atau memanfaatkannya sekalipun gajinya sendiri, pelaku pelit.

- 4) *Kekerasan seksual* adalah a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang menetap dalam lingkup sebuah rumah tangga; b) pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang oleh salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan tujuan komersil dan atau tujuan tertentu (Pasal 8). Derivasi dari pasal ini mungkin dapat dijabarkan sebagai berikut: setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai korban, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Contoh kekerasan ini seperti pencabulan dan pemerkosaan.
- 5) *Kekerasan fisik* adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan fisik ini dapat diurai sebagai jatuh sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan atau sampai menyebabkan kematian. Contoh kekerasan fisik misalnya cubitan, tendangan, sundutan, tamparan, pemukulan, pembunuhan.

## Dampak

Korban KDRT akan merasakan akibat atau dampaknya dalam berbagai ranah yang dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Dampak secara medis: korban KDRT akan pergi ke Unit Gawat Darurat atau ke dokter dengan derita luka secara fisik bervariasi dari luka ringan sampai ancaman kematian, menggunakan resep dan obat, serta mengeluarkan biaya medis yang lebih besar.
2. Dampak secara emosional: korban KDRT biasanya mengalami depresi, stress, kecemasan berlebihan, percobaan bunuh diri, stress pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri, gangguan tidur,

atau susah makan (Darajat, 1996: 21; Ciciek; 1999:33-4).

3. Dampak secara personal (keluarga): tidak menutup kemungkinan korban yang menjadi imund dan suatu saat dapat menjadi pelaku dalam keluarganya sendiri atau terhadap orang lain. Peluang terjadinya perlakuan kejam terhadap anak-anak dalam rumah yang mengalami kekerasan domestik lebih besar dibandingkan mereka yang tidak mengalaminya. Korban atau saksi KDRT seperti anak-anak cenderung mengalami masalah kesehatan mental seperti perilaku anti sosial dan depresi (Darajat, 1996:21; Ciciek, 1999: 36-7).
4. Dampak secara profesional: korban KDRT mengalami kinerja yang buruk dalam kerja, lebih banyak waktu digunakan untuk mengatasi persoalan, memerlukan pendampingan atau konseling dan mencari bantuan, ketakutan kehilangan pekerjaan, sambil bekerja korban juga terus meladeni gangguan dari pelaku kekerasan.

Memilih bertahan tetap menjadi korban KDRT maupun pilihan melawannya keduanya mengandung konsekuensi. Ibarat memakan buah simalakama; dimakan bapak mati, tidak di makan ibu mati. Tetap bertahan dalam kekerasan atau memilih meninggalkannya (dengan cara mengajukan gugat cerai misalnya) sama-sama membawa dampak negatif bagi korban, sekalipun dalam tingkat yang berbeda. Jalan terbaik untuk meretas kepahitan itu adalah dengan tidak mentolerir berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan atau yang lebih dikenal "*Zero Tolerance Policy*" terhadap kekerasan berbasis gender.

### C. TEORI DAN AKSI

#### 1. Teori-teori Penindasan Gender (*Theories of Gender Oppression*)

Teori penindasan gender didasari atas penggambaran situasi perempuan sebagai akibat dari hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mempunyai kepentingan mendasar dan kongkret untuk mengendalikan, menggunakan, menaklukkan, dan menindas perempuan yakni untuk melaksanakan dominasi. Sementara dominasi adalah setiap hubungan dimana pihak (individu/ kolektif) yang disubordinasikan sebagai alat kemauannya dan

menolak untuk mengakui kebebasan subjektivitas pihak yang disubordinasikan atau sebaliknya. Dilihat dari sudut pandang pihak yang disubordinasikan, adalah hubungan dimana penempatan pihak yang disubordinasikan hanyalah sebagai alat kemauan pihak yang dominan (Lengerman dan Niebrugge, 1995). Masih menurut teori penindasan, situasi perempuan pada dasarnya hanyalah untuk digunakan, dikendalikan, ditaklukkan, dan ditindas oleh laki-laki. Kondisi yang timpang ini sangat memungkinkan terjadinya kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Pola penindasan ini dalam masyarakat dikenal sebagai sistem patriarki (Ritzer dan Goodman, 2004: 427-433).

Mayoritas teoritis feminisme, teori penindasan seperti Feminisme Marxis, Feminisme Psikoanalitik, Feminisme Liberal, dan Feminisme Radikal akan diuraikan secara ringkas dalam upaya mengkaji mengenai kekerasan terhadap perempuan.

**Feminisme Marxis.** Fokus kajian Feminisme Marxis adalah analisis kelas yang menempatkan laki-laki masuk sebagai kelas borjuis dan perempuan dalam kelas proletariat. Dalam kondisi kekuasaan yang timpang tersebut sangat memungkinkan jika laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan. Alasannya jelas, kekerasan terjadi pada saat ada ketimpangan kekuasaan, yakni pada saat seorang merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari orang lain. Lebih jauh lagi, perspektif ini memberikan uraian yang sangat signifikan mengenal sistem kapitalis. Adalah suatu kenyataan bahwa laki-laki mengalami kegagalan dalam sistem kapitalis dan menghadapi kesulitan ekonomi akan menyebabkan laki-laki tersebut melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dalam lingkungan keluarga muncul dalam tindakan pemukulan terhadap istri.

**Feminisme Psikoanalitik.** Fokus Perspektif Feminis Psikoanalitik menganalisis keterkaitan maskulinitas dengan kekerasan terhadap perempuan sebagai hasil sosialisasi yang dialami seseorang sejak mereka masih kanak-kanak. Anak laki-laki selalu dituntut untuk memainkan perannya sebagai seorang yang jantan dan mereka mempelajari mengenai

kekerasan sejak mereka kecil. Feminisme Psikoanalitik menganggap bahwa permainan yang dimainkan oleh anak laki-laki, dalam proses sosialisasinya, adalah perang-perangan. Pada saat anak laki-laki tersebut bersekolah, mereka terlibat dalam bentuk perkelahian yang membuktikan kejantanan laki-laki. Dalam hal ini, kontribusi perspektif ini terhadap gagasan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan kemaskulinitas seseorang merupakan hasil dari sosialisasi.

**Feminisme Liberal.** Fokus Feminisme Liberal ditujukan kepada masalah otonomi individu perempuan sebagai warga negara dan hak perempuan yang terpenggal. Teori liberal klasik, yang melihat negara sebagai pelindung warganegaranya, kekerasan terhadap perempuan dilihat sebagai kegagalan negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Negara melalui kebijakan dan fungsi hukumnya tidak efisien dan gagal mengatasi kesulitan hal-hal teknis dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya yang terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan dilegitimisasikan oleh negara. Kegagalan negara untuk mengadili dan memberikan hukuman terhadap pemerkosa atau suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan sebuah alasan bagi perempuan untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya.

**Feminisme Radikal.** Menurut Feminisme Radikal, setiap institusi dan di dalam struktur masyarakat yang paling mendasar terdapat sistem penindasan dimana orang tertentu mendominasi orang lain. Penindasan itu terjadi antar seks (jenis kelamin), kelas, kasta, etnis, umur, dan warna kulit. Perspektif radikal melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan berlangsung akibat sistem gender yang merugikan perempuan. Sistem gender tersebut adalah patriarki yang tidak hanya telah mengakibatkan perempuan menjadi objek yang pasif, inferior dan dirugikan. Namun juga menjadikan perempuan sendiri telah belajar untuk menjadi lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan perempuan tersebut, baik yang dipelajari secara sadar atau tidak, telah membuat

perempuan menjadi korban kekerasan. Sumber terjadinya kekerasan tersebut adalah patriarki.

KDRT hanyalah salah satu bentuk dari fenomena kekerasan yang dialami sebagian perempuan, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Walaupun korban KDRT memang tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibandingkan dengan laki-laki. KDRT merupakan sebagian dari dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi dalam perkawinan (rumah tangga) disebabkan karena posisi tawar perempuan yang lemah dalam perkawinan. Hal ini disebabkan karena budaya patriarkhat yang menyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior. Oleh karena itu, laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan, ditambah dengan interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Hal tersebut merupakan peluang terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk KDRT antara lain paksaan melakukan hubungan seks dengan cara-cara yang tidak dikehendaki istri, seperti oral, anal, dan berbagai cara yang tidak disukai istri (Warner dan Braen, 1985). Pada umumnya masyarakat dan negara tidak mengakui hal semacam ini sebagai sebuah bentuk perkosaan (karena seks adalah hak suami). Biasanya para istri memilih diam, menyalahkan diri sendiri, dan mencoba menerima semua bentuk KDRT sebagai ujian untuk menjadi istri yang baik.

Kekhususan KDRT dibandingkan dengan bentuk kekerasan lain terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dengan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Kenyataan menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak akibat KDRT, umumnya berupa ketakutan, keengganan, dan juga rasa malu, sehingga jarang sekali dilaporkan ke aparat yang berwajib bilamana

kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, seperti oleh ayah, paman, suami, dan pacar.

Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Chapman dalam Harkrisnowo (2004: 716-717) mengungkapkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara. Dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga dan yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan. *British Medical Association* pada tahun 1998 melaporkan perkiraan mereka bahwa satu di antara empat perempuan di Inggris telah pernah menjadi korban *domestic violence* dan Amerika Serikat melaporkan kondisi yang hampir sama. Jelas bahwa *domestic violence* bukanlah isu yang baru, hanya memang selama berabad-abad isu ini tidak pernah dimunculkan ke permukaan. Berbagai riset lain juga menemukan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia (Djanah dkk, 2005: 21-23)

Di Indonesia, perhatian terhadap kekerasan terhadap perempuan telah dimulai oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap nasib perempuan. Kepedulian ini dibuktikan dengan mengumpulkan data melalui penelitian dan melakukan pendampingan. Data statistik yang tercatat di Mitra Perempuan *Women Crisis Center*, sebuah lembaga pelayanan yang mendampingi dan membantu perempuan yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan domestik, menyatakan bahwa telah terjadi penambahan pengaduan kekerasan rata-rata 60 kasus pada setiap semester dan 82% dari kasus tersebut merupakan kekerasan domestik (Kalibonso, 2005:25).

Masih menurut data dari Mitra Perempuan, pada tahun 2006 dijumpai 198 kasus kekerasan domestik dalam berbagai bentuknya, mulai tekanan secara fisik, emosional/ psikologos, sampai seksual. Ada juga yang mengalami kekerasan verbal dan ekonomi. Bentuk kekerasan juga tidak berdiri sendiri, tapi berganda/berlapis (37,7%), misalnya seseorang perempuan



mengalami pukulan (kekerasan fisik) sekaligus larangan menelpon dan keluar rumah seorang diri (tekanan psikologis) serta larangan mempergunakan uang (tekanan ekonomi). Hal ini juga dibuktikan dari penelitian yang dilakukan di Jepang, dari 613 perempuan yang dilaporkan mendapat kekerasan, 57 diantara mereka mendapatkan tiga jenis kekerasan sekaligus, yaitu kekerasan fisik, psikologis, dan seks. Hanya 8% yang mendapat satu kekerasan saja. Lebih jauh, hampir semua korban kekerasan fisik biasanya mengalami kekerasan tersebut secara terus menerus. (Population Reports, No. 11, 2009:5)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mitra Perempuan terhadap perempuan yang mengadu ke lembaga mereka selama tahun 1998 diperoleh data bahwa 39,7% dari mereka berstatus ibu rumah tangga dan 35,7% perempuan yang berkerja di luar rumah yaitu sebagai karyawan/PNS. Terlihat bahwa tidak terdapat signifikansi status kerja bagi perempuan untuk terhindar dari kekerasan. Pelaku kekerasan antara lain, suami (66,3%), pasangan pacar/ kekasih (10,2%), mantan suami, kakak kandung, majikan, dan lain-lain (23,5%).

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai wilayah di Indonesia, selama tahun 2006 telah terjadi 16.968 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 5.310 (31%) adalah kasus KDRT (Timor Express, 2007). Hasil penelitian Sinta (1996) tentang “kekerasan suami pada istri di masyarakat perkotaan Yogyakarta” menunjukkan antara lain bahwa semakin rendah tingkat kepuasan suami terhadap perkawinannya, semakin tinggi tingkat kekerasan suami terhadap istri. Hal ini jelas sekali menunjukkan bahwa indikator dari meningkatnya kekerasan suami terhadap istri ada pada standar yang sepihak, yaitu kepuasan suami.

Studi lain yang menarik adalah yang dilakukan oleh Khairuddin (2004). Khairuddin memfokuskan pada kekerasan seksual di masyarakat Irian Jaya. Khairuddin menyimpulkan bahwa kekerasan seksual oleh suami lebih dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, yaitu motif suami untuk mendominasi dari pada faktor kebutuhan seksual suami itu sendiri. Idrus (2005) menguatkan temuan Khairuddin bahwa kekerasan

seksual, yang didefinisikan sebagai perkosaan dalam perkawinan, terjadi lebih sebagai ekspresi dominasi suami. Selanjutnya disebutkan bahwa kekerasan seksual masih sering tersembunyi dan terdeteksi hanya bila terjadi bersamaan dengan kekerasan fisik. Kekerasan seksual secara spesifik masih kurang mendapat perhatian. Informasi tentang kekerasan seksual ditemukan dalam kerangka diskusi khusus kekerasan fisik. Kebanyakan istri masih terpengaruh budaya bahwa menceritakan kekurangan suami adalah suatu kesalahan dan aib istri.

Penelitian yang telah dilakukan, memberikan sumbangan dan informasi yang sangat berharga tentang kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat daerah penelitian pada khususnya. Akan tetapi, studi-studi lain masih sangat diperlukan karena masih banyak aspek-aspek lain yang belum terjawab berkait dengan prolem kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. *Sejarah Aksi*

Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke-85, pada tanggal 20 Desember 1993, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan merupakan hak fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan. Penegakan mengenai diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidaklah demikian mudah dicapai. Sebelumnya telah ada sejarah panjang pembahasan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun Deklarasi HAM telah dirumuskan pada tahun 1946, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan baru dibuat oleh komunitas internasional 33 tahun kemudian, pada tahun 1979.

Meskipun kekerasan terhadap perempuan sudah berlangsung sejak adanya peradaban manusia, baru menjelang akhir abad ke-20, isu ini menjadi fenomena yang masuk dalam

agenda global. Sementara itu, untuk mengatasi masalah KDRT di berbagai belahan dunia, baik masyarakat maupun negara telah mencoba membangun sistem penanganan masalah kekerasan secara umum dan KDRT secara khusus. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengawali usaha ini dengan menyetujui konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1979.<sup>30</sup> Berikutnya dunia internasional telah bertekad untuk menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan dibuatnya deklamasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang disepakati dalam konferensi HAM di Jenewa tahun 1993. Dalam deklarasi tersebut juga ada tuntutan agar masyarakat turut bertanggung jawab terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan.<sup>31</sup>

Di Indonesia, usaha senada juga telah dikembangkan. Pada mulanya, kerangka hukum yang berlaku untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih didasarkan pada aturan hukum pidana yang dirumuskan pada zaman kolonial yang banyak mengandung kelemahan, sehubungan dengan penegakan hak-hak perempuan. Substansi hukum yang tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, merupakan faktor penting dalam pelanggaran bentuk pelanggaran HAM ini, karena tidak adanya ketegasan sanksi hukum bagi para pelakunya.

Kemudian, kendatipun Indonesia sudah mengesahkan peraturan perundangan baru, seperti undang-undang Nomor 7 tahun 1984 yang merupakan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang dirumuskan oleh PBB, dan yang lebih mutakhir adalah undang-undang Nomor 23 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Beberapa kemajuan berkenaan dengan perlindungan terhadap hak perempuan muncul dalam UU ini yaitu : Pertama, Ketegasan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Kedua, KDRT mencakup tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Ketiga, perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dari tindak kekerasan oleh majikan (orang yang mempekerjakan dan keluarganya). Keempat, KDRT bukan lagi dipandang sebagai

masalah domestik di mana orang lain tidak berhak ikut campur dan peran aktif masyarakat diakui secara hukum, setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadi KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memerikan perlindungan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan, namun masih belum ada dampak berarti bagi peluang perempuan korban diskriminasi. Pada kenyataannya, masih sangat sedikit yang memahami isi, apa lagi menerapkan Undang-Undang ini dari kalangan penegak hukum sendiri.

Rendahnya kepekaan gender di kalangan aparat negara, terutama oleh para penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan hakim, berarti sesempurna apapun peraturan perundangan yang dirumuskan untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, tidak ada jaminan bahwa rasa adil para perempuan korban kekerasan akan terpenuhi karena sikap dan perilaku para penegak hukumnya tidak mendukung.

Hal-hal di atas, baik secara terpisah maupun bersama-sama telah menyebabkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan masih mengalami berbagai kendala. Mempromosikan dan menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia, termasuk hak untuk hidup bebas dari segala tindak kekerasan, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan proses demokratisasi negara yang mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender. Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan tanggung jawab perempuan atau sejumlah kecil laki-laki yang peduli terhadap keadilan dan kesetaraan gender, tetapi merupakan tanggung jawab negara dan seluruh bangsa.

Namun, perhatian dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengeliminir KDRT patut dihargai. Pendirian berbagai pusat pelayanan perempuan korban kekerasan merupakan salah satu contoh. Diantara layanan yang diberikan adalah mengupayakan konsultasi melalui telepon (*hotline*), pendampingan psikologis, memberikan bantuan media, dan pendampingan hukum. Diantara lembaga tersebut ada juga yang menyediakan tempat singgah (*shelter*) bagi korban yang memerlukan dan *women crisis center*. Lembaga bantuan hukum

yang mengkhususkan diri menangani persoalan perempuan hadir untuk mendampingi korban guna mengupayakan pembelaan *secara* hukum. Dalam proses ini korban akan mendapatkan penjelasan tentang berbagai kemungkinan untuk mengatasi permasalahannya secara hukum. Jika dibutuhkan, pengacara LBH juga mendampingi korban dalam proses pengadilan. Dengan berbagai upaya tersebut plus pemahaman kepada korban bahwa KDRT yang dialaminya bukan sebatas masalah “keluarga” tapi sudah menyangkut masalah publik (hukum), KDRT paling tidak dapat diminimalisir.

#### D. SEPUTAR BUKU

Tulisan dalam buku ini dilakukan di tiga daerah di wilayah kabupaten/kota di Propinsi Riau, yaitu Pekanbaru, Kampar, dan Rokan Hulu. Tahap identifikasi persoalan KDRT dilakukan di Pekanbaru dan Kampar dalam upaya memetakan kasus-kasus KDRT yang dilaporkan ke pihak yang berwajib. Hal ini diungkapkan dalam tulisan Sofia dan Hertina. Tiga tulisan lainnya lebih merupakan pengembangan dari persoalan KDRT yang ada.

Tulisan Wilaela tentang studi kasus Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Pekanbaru memuat deskripsi tentang lima PRT yang memiliki kondisi berbeda, menerima perlakuan dari majikan yang beragam, faktor penyebab kekerasan, dan harapan-harapan mereka. PRT disorot karena sebagai perempuan yang rentan dengan KDRT dan keberadaannya baru menyita perhatian jika mereka telah menjadi korban. Dalam tulisan tersebut, ditemukan bahwa PRT tidak saja bisa menjadi korban KDRT yang lebih banyak dalam bentuk psikis. Tulisan tersebut juga menyinggung adanya gejala di tengah masyarakat Pekanbaru yang sering diberitakan media massa tentang PRT sebagai pelaku KDRT.

Sebagai studi awal, perjudian dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, tulisan Nurhasanah tentang KDRT di Kota Tengah Rokan Hulu, berisi paparan tentang faktor-faktor eksternal, seperti masyarakat sekitar, dapat menyulut terjadinya tindak KDRT. Masyarakat melakukan pembiaran atas sekelompok orang yang gemar berjudi. Mereka terdiri dari para suami, yang memilih berjudi meskipun harus menelantarkan keluarga. Bentuk

KDRT disini adalah dalam aspek ekonomi dan psikologis.

Tulisan Sofia Hardani tentang gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru membuktikan bahwa jalan keluar yang ditempuh para perempuan dalam mengatasi persoalan KDRT yang menyimpannya adalah dengan bercerai. Perceraian menjadi jalan satu-satunya untuk meretas kekerasan, meskipun hal itu sangat berat untuk dilalui. Mendatangi lembaga bantuan hukum dan mengupayakan pendampingan agaknya belum menjadi alternatif populer. Ini dimungkinkan karena pada waktu penelitian ini dilakukan, lembaga pendampingan dan rehabilitasi seperti *woman crisis center* belum berdiri dan LBH yang memberi pendampingan kepada korban KDRT di Riau, khususnya di Pekanbaru belum dikenal oleh khalayak ramai. Tidak jarang para korban istri lebih memilih jalan bercerai karena sudah letih terjebak dalam siklus kekerasan.

Tentu saja banyak perkembangan di tahun belakangan antara waktu penelitian ini dilakukan dengan waktu buku ini diterbitkan. Namun, sejauh itu, korbannya tetap belum bergeser dari perempuan dan anak. Jalan keluar sudah tidak sekedar mengajukan gugat cerai, tetapi ada upaya melaporkannya ke kepolisian dan lembaga terkait, atau berusaha mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan. Sekalipun demikian, bukan berarti masalah KDRT berkurang atau berhenti. Kekerasan domestik ini berlangsung terus, karena memang demikian adanya dan karena ‘dibesarkan’ oleh pemberitaan. Korban, pelaku, dan motifnya juga beragam.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief. 1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Gramedia, Jakarta.
- Ch, Mufida. 2004. *Paradigms Gender*, Edisi Revisi, Bayu Media Malang.
- Darajat, Zakiyah. 1996. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang
- Djanah, Fathul, dkk. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*. LKiS, Jogjakarta.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakih, Mansur. 1998. *Diskriminasi Dan Beban Keda Perempuan: Perspektif Gender*. Dalam Hj Bainar (Ed). *Wacana Perempuan Dalam Kelndonesiaan Dan Kemodernan*. Pustaka CIDESINDO, Yogyakarta.
- Farcha, Ciciek. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw*. Jakarta: LKAJ bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation
- Gelles, R.J. 1995. *Violence in the Family: A review of Research in the Seventies*. Journal of Marriage and the Family, 42 (4).
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2004. "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis" Dalam *Indonesian Journal Of International Law*, Vol 1, Juli, Fakultas Hukum U1, Jakarta.
- Hass, Beth B. And Myra Max Ferre (eds). 1991. *Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research*. California, Sage Publications.
- Jurnal Perempuan No. 26.
- Kalibonson, R.S. 2000. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran Hak Asasi manusia*. Dalam A.S.Luhailima (Eds). *Pemahaman terhadap Bentuk-Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Kelompok Keda "Convention Watch", Pusat Kajian Wanita dan Fewleral, Jakarta.
- Kompas, Senin 12 Juli 2004
- Mas'udi, Massdar F. 1997. "Perempuan dalam Wacana Keislaman". dalam *Perempuan dan Pemberdayaan : Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Saparinah Sadli*, Jakarta,

- Kerjasama Program Studi Kajian wanita Program Pasca Sarjana universitas Indonesia, Harlan Kompas dan Penerbit Obor.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Jender*. Cet.II. Bandung: Mizan, 2001.
- Moors, A. 1995. *Woman, Property, and Islam*. Cambridge University Press, New York.
- New South Wales (NSW) Child Protection Council. 1996. *Child Abuse and Domestic Violence: A Child Protection Perspective*, Author, Sydney.
- Nurhayati, Elli. 1999. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Rifka Annisa, Yogyakarta.
- Undang-undang RI No.23 tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Citra Umbara, Bandung.
- Ritzer, George dan Gootman, J. Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana, Jakarta.
- Sharma, A. 1994. *Protection to Women in Matrimonial Home*. Deep And Deep Publication, New Delhi.
- Timor Express. 2005. *Kupang Metro*, 3 Juni, Kupang.



*Identifikasi Akar Masalah  
Kekerasan dalam Rumah Tangga di Riau*

---

Sofia Hardani & Hertina

---

## A. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan yang mengandung faktor jenis kelamin dikenal dengan istilah *gender violence* dan merupakan persoalan yang jamak dan dapat terjadi di ragam masyarakat mana saja di seluruh belahan dunia. *Gender violence* menimpa nyaris seluruh ruang dalam kehidupan perempuan, mulai dari rumah, tempat kerja, tempat umum dan jalanan. Meskipun wujud ragam kekerasan tersebut bervariasi dari satu budaya ke budaya lain, namun ada satu benang merah yang muncul mengatasi batasan suku/ras, agama maupun kelas sosial ekonomi, yaitu bahwa perempuan rentan terhadap tindak kekerasan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli tentang hak-hak asasi manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Utara menyimpulkan bahwa kekerasan domestik terjadi pada setiap satu dari empat keluarga, dan bahwa satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan dari pasangan hidupnya (NSW, 1996: 5).

Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, juga menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak-hak perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan suatu masalah serius yang dialami oleh banyak perempuan di Indonesia, karena masalah ini ibarat sebuah piramida yang kecil pada puncaknya tapi besar pada bagian dasarnya, sebab sulit mendapat angka yang pasti karena "pekat"-nya permasalahan tersebut. Apalagi jika tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, lebih sulit lagi mendapatkan data yang akurat sebab masih dianggap tabu untuk dibuka di tingkat publik. Artinya bahwa masih banyak korban kekerasan dan keluarga memilih menutup mulut dan menyimpan persoalan kekerasan tersebut rapat-rapat, dan dianggap sebagai *privacy* keluarga. Hal ini dikarenakan para perempuan korban kekerasan justru akan dipersalahkan oleh masyarakat sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap dirinya. Oleh sebab itu

persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dianggap sebagai persoalan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena dianggap sebagai perkara privat (domestik) yang harus diselesaikan secara privat pula. Bahkan ketika penganiayaan dan kekerasan terhadap perempuan menimbulkan cacat fisik dan korban jiwa, kekerasan tersebut dianggap sebagai peristiwa kriminal biasa. Realita ini disebabkan karena budaya patriarkhi yang begitu kental di Indonesia.

*Domestic violence*, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Diskriminasi sendiri telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan bentuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang dirumuskan oleh PBB, dan yang lebih mutakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), namun masih belum ada dampak berarti bagi peluang perempuan korban diskriminasi. Pada kenyataannya, masih sangat sedikit yang memahami isi, apalagi menerapkan undang-undang ini dari kalangan penegak hukum sendiri.

Kekerasan dalam rumah tangga atau arena domestik bisa terjadi diantara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami pada istrinya atau sebaliknya, seorang ayah atau ibu kepada seorang anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau laki-laki kepada saudara perempuan/laki-laki lainnya, dan seterusnya. Penyebabnya beragam.

Fakta tentang kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau, yang memiliki komposisi penduduk yang heterogen, dan Kabupaten Kampar yang memiliki ikatan kebudayaan dan nilai agama yang dianggap kuat. Namun heterogenitas itu dapat dilihat dari kepercayaan, etnis, pendidikan dan mata pencaharian. Dalam masyarakat yang tingkat ekonominya rendah, erat kaitannya dengan lingkungan tempat tinggal yang kumuh, sangat besar pengaruhnya terhadap

pri kehidupan sehari-hari, mudah timbul ledakan-ledakan emosional yang tak terkendali hingga budaya kekerasan di yakini mendominasi realitas kehidupan sehari-hari, hingga kekuatan fisik/jasmani, kekuatan kelompok, merupakan status simbol dan status sosial dalam masyarakat tersebut, hal mana berdampak pula terhadap pandangan, anggapan serta sikap dalam mengartikan kehadiran kaum perempuan dalam lingkungan tersebut, sehingga budaya kekerasan identik dengan masyarakat yang tingkat kehidupan sosial ekonominya rendah. Kenyataan ini juga didukung masih banyaknya perempuan yang berpendidikan rendah menambah ketidakberdayaan perempuan untuk mampu menolak perlakuan, sikap, anggapan diskriminatif terhadap perempuan.

Kenyataan ini, sebagaimana diperkuat oleh Moors (1995:3), kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, karena istri mungkin akan direndahkan oleh suami. Selanjutnya Gelles (1995:42(4)) juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah ketidakmandirian si istri secara ekonomi. Kemudian, Sharma (1994:303-326) ber teori bahwa kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh seorang perempuan akan meningkatkan harga dirinya dan menyebabkannya memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hubungan dengan suaminya.

Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa istri-istri yang memiliki kemandirian ekonomi lebih berpeluang terbebas dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Apakah hal ini berlaku juga bagi masyarakat kota Pekanbaru dan masyarakat kabupaten Kampar yang heterogen dan bercirikan pola hubungan paternalistik?

Mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) yang teridentifikasi di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga bukan saja dialami oleh perempuan tetapi juga laki-laki (seperti kekerasan emosional dan ekonomi), namun mayoritas korban masih didominasi oleh perempuan, seperti kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri yang berdampak pada penderitaan dan bahkan sampai pada kematian istri.

Realitas ini menurut penulis menarik untuk dikaji, karena kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kapan saja, dan oleh siapa saja, baik yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah, menengah maupun atas, dan korban kekerasan juga dialami oleh laki-laki dimana terjadi dalam masyarakat yang menganut pola hubungan paternalistik. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada akar masalah kekerasan dalam rumah tangga dan alternatif penanggulangannya yang dilakukan suami kepada istri dan istri kepada suami dalam keluarga.

Ada beberapa permasalahan pokok yang akan diungkapkan dalam penelitian ini, yaitu: a) Bagaimana pendapat suami-istri tentang kekerasan dalam rumah tangganya, b) Jenis dan bentuk-bentuk tindak kekerasan apakah yang dialami oleh suami istri dalam rumah tangganya, c) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kekerasan suami terhadap istri dan istri terhadap suami yang dialami dalam rumah tangganya. Sedangkan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pendapat suami istri tentang kekerasan dalam rumah tangganya, mengidentifikasi jenis dan bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dialami suami istri dalam rumah tangganya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan suami istri yang dialami dalam rumah tangganya.

Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru dipilih karena Pekanbaru adalah ibukota provinsi Riau yang multi etnis dan sangat heterogen, karena itu tindak kekerasan dengan berbagai bentuk potensial terjadi. Pemilihan Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian adalah disebabkan kabupaten ini terkenal dengan daerah yang kental dengan adat dan tradisi yang kuat. Subyek penelitian adalah pasangan suami istri yang terdapat dalam kasus KDRT yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sampel diambil secara *purposive sampling*, yang berdasarkan pada prinsip *tend nonprobabilitas*. Secara *purposive* akan diambil pasangan suami istri dengan karakteristik: Suami maupun istri bekerja atau tidak bekerja. Data primer diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dialog, baik dengan informan kunci yaitu pasangan suami istri maupun informan penunjang yang terdiri dari tokoh agama dan aparat desa di tingkat RT sampai kelurahan, dengan

menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran, khususnya pejabat penegak hukum dan pejabat pelayanan kesehatan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang berwawasan gender dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bagi masyarakat luas, penelitian ini bermanfaat sebagai informasi agar masyarakat lebih memahami dan menyadari dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat berperan serta dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan gender dalam rumah tangga. Bagi keluarga, sebagai pilar dari masyarakat, bermanfaat sebagai pedoman upaya menciptakan kesetaraan gender dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga. Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi pengembangan studi gender dan pembangunan, sebagai bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis gender, sehingga dapat mengkaji secara teoritis alternatif-alternatif pemecahannya, dan bagi para peneliti dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis.

## **B. KERANGKA PIKIR**

Masyarakat Kota Pekanbaru yang sarat dengan berbagai etnis, pada umumnya sistem kekeluargaan yang dianut adalah berdasarkan garis kepatrilineal (patrilineal) dan begitu juga Kabupaten Kampar. Hal tersebut, disadari atau tidak, seakan-akan telah mendominasi pola kehidupan dalam masyarakat.

Pola kehidupan sosial budaya yang dijalani seseorang semenjak kecil dalam etnis keluarganya, tanpa disadari sedikit banyak berpengaruh pula terhadap pola tingkah laku seseorang, kemudian dalam kehidupan masyarakat proses kebudayaan patriarkhi telah membuat keluarga menjadi kehidupan pribadi yang tertutup. Keluarga dijadikan pusat pendidikan emosi anak-anak, dan tugas ini menjadi beban perempuan. Perempuan menjadi terisolir dalam keluarga. Proses modernisasi menugaskan keluarga untuk melayani fungsi-fungsi reproduksi, pengembangan emosi pribadi, meningkatkan konsumsi dan mendidik anak-anak. Organisasi keluarga menentukan bahwa

tugas domestik dibebankan kepada perempuan, dan tugas publik dibebankan kepada laki-laki, tanpa mempertimbangkan kemampuan pribadi masing-masing. Dalam situasi seperti ini, seseorang pribadi baik laki-laki maupun perempuan terbentuk bukan seperti jati dirinya, melainkan sesuai dengan konstruksi sosial yang disosialisasikan melalui keluarga.

Perkawinan bagi perempuan merupakan penjara bagi kebebasan secara pribadi, lebih-lebih apa bila suami memonopolinya. Perempuan menjadi tidak berdaya dalam situasi keluarga yang maskulin. Keluarga maskulin ditandai oleh dominasi laki-laki (dapat pula didominasi oleh perempuan), otoriter, dan terjadi tindak kekerasan.

Tindak kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dilihat, dirasakan, bermaksud/ bertujuan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Bentuk-bentuk tindak kekerasan dan para pelakunya pun beraneka ragam, dari bentuk kekerasan fisik maupun non fisik dan dilakukan baik oleh perorangan, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah atau negara (Sobritchea, 2003:5) Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi antara lain ketika seorang perempuan berstatus telah menikah, sebagai seorang isteri, dan menjalankan peranan tradisional sebagai ibu rumah tangga dalam mengasuh anak, menyediakan makanan setiap hari dan memberi pakaian. Dalam hal sebagai ibu tersebut, maka kedudukan itu melekat pada kedudukan dan pelapisan sosial yang dimiliki suaminya.

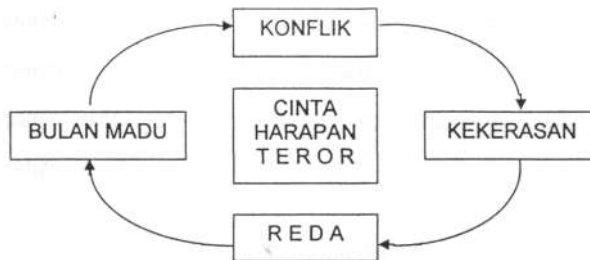
Pengaruh budaya patriarki masih mewarnai kehidupan masyarakat Pekanbaru dan Kabupaten Kampar khususnya, dan daerah lain pada umumnya, dan mempunyai ekseseks yang menimbulkan tekanan-tekanan di dalam keluarga, juga masyarakat. Laki-laki yang oleh budaya ini dibedakan kekuasaannya, banyak yang menyalahgunakannya. Realitas yang ditemukan di dalam keluarga-keluarga, seperti pemukulan, memperingatkan secara kasar atau menghardik, dan berbagai bentuk perilaku lain yang menyakitkan hati atau fisik istri maupun suami, muncul karena adanya tekanan-tekanan yang tidak teratasi yang berdampak pada pengendalian diri yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga

sehingga timbul ketidakamanan atau keadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam perkawinan. Secara umum, bentuk KDRT ada empat macam yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, dan kekerasan emosional. KDRT merupakan suatu perilaku yang berulang, mengikuti suatu pola khas. Masyarakat tidak menyadari adanya pola ini sehingga sering terjebak dalam mitos bahwa perilaku memukul terjadi karena suami lepas kontrol, sehingga masyarakat masih cenderung menganggap persoalan KDRT sebagai suatu persoalan pribadi yang “lumrah” terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Berikut ini penjabaran tentang siklus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Gambar 2.2. Siklus KDRT



*Keterangan:*

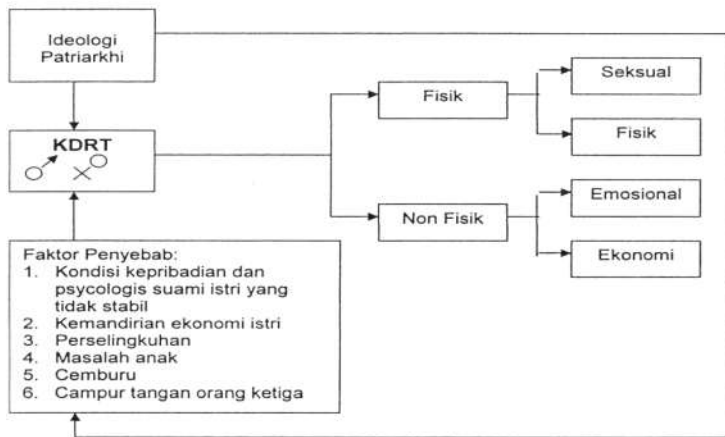
- CINTA** : Rasa cinta dan sayang kepada pasangan (suami-isteri), memaklumi, mencoba untuk mengerti.
- HARAPAN** : Berharap akan berubah menjadi baik.
- TEROR** : Ancaman setiap saat akan dipukul, ditinggal, tidak dapat menjalani hidup sendirian tetapi ketakutan dan sakit hati atas perlakuan pasangan (suami-istri).



Pola ini selalu berulang dan sulit untuk diputuskan mata rantainya, kecuali kalau ada “kesadaran” dari si suami atau istri untuk berubah.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terjadi begitu saja, tetapi diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor eksternal seperti adanya bias ideologi patriarkhi, ketimpangan pandangan dan salah penafsiran dalam melihat keberadaan perempuan (yang mayoritas sebagai korban kekerasan) baik dalam keluarga maupun masyarakat, juga adanya faktor internal seperti kondisi kepribadian dan psikologis suami maupun istri yang tidak stabil, kemandirian ekonomi istri, perselingkuhan, masalah anak, cemburu dan campur tangan orang ketiga. Untuk mengetahui lebih jelas akan digambarkan dalam bentuk matriks, kerangka berpikir dalam penelitian ini tergambar sebagai berikut :

Gambar 2.3. Kerangka Pikir.



## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Karakteristik Informan

**Tabel 3**

**Sebaran Informan Menurut Umur**

No.	U m u r (tahun)	Suami		Istri	
		f	%	F	%
1.	15 - 24	0	0	0	0
2.	25 - 34	2	13,3	2	13,3
3.	35 - 44	5	33,3	9	60
4.	45 - 54	8	53,4	4	26,7
<b>JUMLAH</b>		15	100	15	100

Data Primer, 2007

N = 30 (15 pasangan suami istri)

Dari hasil penelitian terhadap 30 informan (suami istri) yang berada di kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, diantaranya suami yang berumur antara 45-54 tahun dan istri yang berumur antara 35-44 tahun mempunyai prosentase yang tertinggi yaitu (56,7%) bila dibandingkan dengan suami yang berumur 35-44 tahun dan istri yang berumur 45-54 tahun (30%) dan suami istri yang berumur 25-34 tahun (13,3%), sehingga umur rata-rata dari suami berkisar antara 45-54 tahun dan istri berkisar antara 35-44 tahun.

Pendidikan informan dalam penelitian ini bervariasi mulai dari berpendidikan SD sampai dengan pendidikan tinggi (sarjana). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4**

**Sebaran Informan Menurut Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Suami		Istri	
		f	%	f	%
1.	SD	0	0	0	0
2.	SMP	0	0	2	13,3
3.	SMU/ SMK	9	60	9	60
4.	Sarjana	6	40	4	26,7
<b>JUMLAH</b>		15	100	15	100

Sumber Data Primer, 2007

N = 30 (15 pasangan suami istri)

Tabel diatas menunjukkan bahwa informan yang berpendidikan SMU baik istri maupun suami (60%) lebih banyak dibandingkan dengan yang berpendidikan sarjana (33,3%) dan yang berpendidikan SMP (6,7%).

Informan dalam penelitian ini baik suami maupun istri pada umumnya beragama Islam (60%) sisanya beragama Kristen Protestan (20%), Kristen Katholik (20%).

**Tabel 5**  
**Sebaran Informan Menurut Agama**

No.	Agama	Suami		Istri	
		f	%	f	%
1.	Islam	9	60	9	60
2.	Kristen Protestan	3	20	3	20
3.	Kristen Katholik	3	20	3	20
4.	Hindu	0	0	0	0
5.	Budha	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2007

N = 30 (15 pasangan suami istri)

**Tabel 6**  
**Sebaran Informan Berdasarkan Lama Menikah**

No	Lama Menikah	F	Persentase
1	1	0	0
2	1 - 5	1	6,7
3	6 - 10	3	20
4	11 - 15	5	33,3
	> 15	6	40
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber. Data Primer, 2007

N = 30 (15 pasangan suami istri)

Pada tabel di atas terlihat bahwa informan yang lama perkawinannya antara 1-5 tahun mempunyai persentase sebesar (6,7%) dan lama perkawinannya antara 6-10 tahun (20%), lama perkawinan antara 11-15 tahun (33,3%), sedangkan informan yang lama perkawinannya 15 tahun keatas (40%). Dengan demikian pada umumnya lama perkawinan responder berkisar antara 11 -15 tahun keatas (73,3%).

## 2. Pendapat Suami-Istri tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keharmonisan kehidupan penduduk yang pluralis di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar pada umumnya terjalin dengan baik. Misalnya, keharmonisan itu terlihat pada pesta perkawinan ataupun kematian. Pada saat pesta perkawinan, tidak hanya keluarga dekat, tetangga, tetapi kerabat jauh pun datang ke rumah pengantin untuk membantu pelaksanaannya. Beberapa hari sebelum pesta perkawinan berlangsung, para anggota keluarga sudah berdatangan. Demikian pula pada saat ada kematian. Bentuk keluarga yang dianut adalah bentuk keluarga inti (*nuclear family*). Keharmonisan yang dibangun terbatas diantara ayah, anak, dan ibu.

Keadaan yang dipaparkan diatas bukan jaminan atas tidak terjadinya kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena berbagai pengaruh eksternal dan internal yang ada dalam masyarakat. Pada masyarakat Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar pengaruh kultural seperti pemberian *bells* (mas kawin) pada saat memasuki perkawinan turut melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pendapat suami istri terhadap berbagai bentuk KDRT dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Kekerasan	Kota Pekanbaru		Kabupaten Kampar	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Kekerasan fisik	10	100%	10	100%
2	Kekerasan psikis	10	100%	10	100%
3	Kekerasan seksual	10	100%	10	100%
4	Kekerasan ekonomi	10	100%	10	100%
5	Kekerasan sosial	10	100%	10	100%
6	Kekerasan hukum	10	100%	10	100%
7	Kekerasan lingkungan	10	100%	10	100%
8	Kekerasan budaya	10	100%	10	100%
9	Kekerasan agama	10	100%	10	100%
10	Kekerasan ras	10	100%	10	100%
11	Kekerasan etnis	10	100%	10	100%
12	Kekerasan suku	10	100%	10	100%
13	Kekerasan bahasa	10	100%	10	100%
14	Kekerasan adat	10	100%	10	100%
15	Kekerasan tradisi	10	100%	10	100%
16	Kekerasan kebiasaan	10	100%	10	100%
17	Kekerasan kepercayaan	10	100%	10	100%
18	Kekerasan nilai-nilai	10	100%	10	100%
19	Kekerasan norma	10	100%	10	100%
20	Kekerasan moral	10	100%	10	100%
21	Kekerasan etika	10	100%	10	100%
22	Kekerasan sopan santun	10	100%	10	100%
23	Kekerasan tata krama	10	100%	10	100%
24	Kekerasan disiplin	10	100%	10	100%
25	Kekerasan tanggung jawab	10	100%	10	100%
26	Kekerasan kejujuran	10	100%	10	100%
27	Kekerasan keberanian	10	100%	10	100%
28	Kekerasan keteguhan	10	100%	10	100%
29	Kekerasan ketekunan	10	100%	10	100%
30	Kekerasan ketahanan	10	100%	10	100%
31	Kekerasan keteguhan hati	10	100%	10	100%
32	Kekerasan keteguhan pendirian	10	100%	10	100%
33	Kekerasan keteguhan sikap	10	100%	10	100%
34	Kekerasan keteguhan prinsip	10	100%	10	100%
35	Kekerasan keteguhan keyakinan	10	100%	10	100%
36	Kekerasan keteguhan iman	10	100%	10	100%
37	Kekerasan keteguhan kepercayaan	10	100%	10	100%
38	Kekerasan keteguhan harapan	10	100%	10	100%
39	Kekerasan keteguhan cita-cita	10	100%	10	100%
40	Kekerasan keteguhan tujuan	10	100%	10	100%
41	Kekerasan keteguhan misi	10	100%	10	100%
42	Kekerasan keteguhan visi	10	100%	10	100%
43	Kekerasan keteguhan misi	10	100%	10	100%
44	Kekerasan keteguhan visi	10	100%	10	100%
45	Kekerasan keteguhan misi	10	100%	10	100%
46	Kekerasan keteguhan visi	10	100%	10	100%
47	Kekerasan keteguhan misi	10	100%	10	100%
48	Kekerasan keteguhan visi	10	100%	10	100%
49	Kekerasan keteguhan misi	10	100%	10	100%
50	Kekerasan keteguhan visi	10	100%	10	100%

1. Pernah mengalami kekerasan fisik (misalnya: dipukul, ditendang, digigit, dsb.)	10	100%	100%	100%
2. Pernah mengalami kekerasan psikis (misalnya: dimarah-marah, dibilang-bilang, dsb.)	10	100%	100%	100%
3. Pernah mengalami kekerasan seksual (misalnya: dipaksa melakukan hubungan seksual, dsb.)	10	100%	100%	100%
4. Pernah mengalami kekerasan verbal (misalnya: dimarah-marah, dibilang-bilang, dsb.)	10	100%	100%	100%
5. Pernah mengalami kekerasan ekonomi (misalnya: tidak diberi uang, dsb.)	10	100%	100%	100%
6. Pernah mengalami kekerasan sosial (misalnya: dikucilkan, dsb.)	10	100%	100%	100%
7. Pernah mengalami kekerasan hukum (misalnya: dipukul, ditendang, dsb.)	10	100%	100%	100%
8. Pernah mengalami kekerasan agama (misalnya: dipukul, ditendang, dsb.)	10	100%	100%	100%
9. Pernah mengalami kekerasan adat (misalnya: dipukul, ditendang, dsb.)	10	100%	100%	100%
10. Pernah mengalami kekerasan lainnya (misalnya: dipukul, ditendang, dsb.)	10	100%	100%	100%
11. Pernah mengalami kekerasan lainnya (misalnya: dipukul, ditendang, dsb.)	10	100%	100%	100%
12. Pernah mengalami kekerasan lainnya (misalnya: dipukul, ditendang, dsb.)	10	100%	100%	100%
13. Pernah mengalami kekerasan lainnya (misalnya: dipukul, ditendang, dsb.)	10	100%	100%	100%
14. Pernah mengalami kekerasan lainnya (misalnya: dipukul, ditendang, dsb.)	10	100%	100%	100%
15. Pernah mengalami kekerasan lainnya (misalnya: dipukul, ditendang, dsb.)	10	100%	100%	100%

Sumber. Data Primer, 2007

N = 30 (15 pasangan suami istri)

Hasil diskripsi dan perolehan data yang dirangkum pada tabel 5.5, memberikan gambaran bahwa pendapat suami istri tentang jenis dan bentuk KDRT di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar memperlihatkan bahwa pada umumnya suami istri menilai tindakan seperti; mencaci, memukul, meludah menendang, menyulut dengan rokok sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selanjutnya menghina atau tidak menghargai, main serong dengan pempuan/laki-laki lain, menghabiskan uang penghasilan dan suami tidak memberikan uang untuk belanja/ makan, istri tidak memberikan uang saku pada suami, cenderung merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk kekerasan yang bukan termasuk KDRT menurut penilaian responden adalah tindakan seperti memberi komentar

dengan kata yang kasar atau jorok, sedangkan membentak bila berbeda pendapat, selalu ikut campur dalam urusan istri/ suami, cenderung bukan termasuk KDRT.

Perbedaan pendapat antara suami dan istri terdapat dalam: remaksa melakukan hubungan seksual ketikan istri/ suami tidak menginginkannya, tidak memperhatikan kepuasan seksual pihak pasangan, mengancam, dan melarang istri/ suami bergaul atau berhubungan dengan saudara atau pergi tanpa meninggalkan pesan dan main serong dengan perempuan lain / laki-laki lain, suami cenderung kurang melihatnya sebagai tindak kekerasan sementara lebih banyak istri melihatnya sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian secara kualitatif terlihat bahwa batasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dipahami oleh suami istri secara berbeda. Ada kecendrungan kekerasan dipersepsikan suami sebagai "suatu tindakan yang sifatnya fisik saja", sedangkan kekerasan "non fisik" dipersepsikan "bukan" sebagai tindakan kekerasan karena tidak berdampak kerugian fisik pada korban. Seperti yang dituturkan RN sebagai berikut:

"Dimarah, dibentak suami, merupakan hal yang lumrah terjadi dalam sebuah rumah tangga dan merupakan bumbu-bumbu perkawinan, itu bukan sebuah kekerasan tapi kasih sayang"

Fakta diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Levi, "kekerasan" (*violence*) pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat tergantung kepada masyarakat itu sendiri (Levi, 1994: 295-353).

### 3. Analisis Mengenai Jenis dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jenis dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri dalam perkawinannya di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8**  
**Jenis dan Bentuk Kekerasan yang Dialami dalam Rumah Tangga**

Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan	Jumlah Responden			
		F	P	T	MG
Kekerasan Fisik	1. Pernah mengalami kekerasan fisik (tubuh) dan/atau seks yang mengancamnya	1	0	0	0
	2. Pernah mengalami kekerasan fisik (tubuh) dan/atau seks yang mengancamnya	1	0	0	0
	3. Pernah mengalami kekerasan fisik (tubuh) dan/atau seks yang mengancamnya	1	0	0	0
Kekerasan Psikis	1. Pernah mengalami kekerasan psikis (emosi) dan/atau kekerasan fisik (tubuh)	1	0	0	0
	2. Pernah mengalami kekerasan psikis (emosi) dan/atau kekerasan fisik (tubuh)	1	0	0	0
	3. Pernah mengalami kekerasan psikis (emosi) dan/atau kekerasan fisik (tubuh)	1	0	0	0
Kekerasan Seksual/ Psikis	1. Pernah mengalami kekerasan seksual (fisik) dan/atau kekerasan psikis (emosi)	1	0	0	0
	2. Pernah mengalami kekerasan seksual (fisik) dan/atau kekerasan psikis (emosi)	1	0	0	0
	3. Pernah mengalami kekerasan seksual (fisik) dan/atau kekerasan psikis (emosi)	1	0	0	0
	4. Pernah mengalami kekerasan seksual (fisik) dan/atau kekerasan psikis (emosi)	1	0	0	0
	5. Pernah mengalami kekerasan seksual (fisik) dan/atau kekerasan psikis (emosi)	1	0	0	0
	6. Pernah mengalami kekerasan seksual (fisik) dan/atau kekerasan psikis (emosi)	1	0	0	0
	7. Pernah mengalami kekerasan seksual (fisik) dan/atau kekerasan psikis (emosi)	1	0	0	0
	8. Pernah mengalami kekerasan seksual (fisik) dan/atau kekerasan psikis (emosi)	1	0	0	0
Kekerasan Finansial	1. Pernah mengalami kekerasan finansial (ekonomi)	1	0	0	0
	2. Pernah mengalami kekerasan finansial (ekonomi)	1	0	0	0

Sumber : Data Primer, 2007

N = 30 (15 Pasangan suami istri)

Data yang dihimpun dari laporan beberapa media massa menunjukkan beragam tindak kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang diberitakan Harian Riau Mandiri (30/07/07):

*“peristiwa itu terjadi Sabtu (28/07), sekitar pukul 22.30 WIB di kediaman pasutri T (33) dan MG (23) warga Perumahan*

Kualu Damai, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Menurut informasi di kepolisian, **MG** dan **T** sudah menjalani pernikahan sejak setahun belakangan. Meski demikian hingga saat ini keduanya belum dikaruniai seorang buah hati.

Sedangkan aksi penganiayaan itu bermula ketika **T** baru pulang ke rumah sekitar tengah malam. Hal itu bukan pertama kali dilakukannya. Diduga karena kesal karena sering ditinggal sendirian, **MG** pun mengomeli sang suami yang pulang hampir larut malam tersebut. Rupanya, hal itu menjadi pemicu musibah antara keduanya. Pasalnya, **T** yang tak terima diomeli sang istri jadi naik emosinya. Dipuncak emosinya, **T** mengambil cangkul yang ada di dalam rumahnya. Selanjutnya alat itu digunakan untuk menghajar sang istri.... walhasil, cangkul tersebut mendarat di kepala bagian belakang **MG** sehingga langsung mengeluarkan darah. Tak sampai disitu, **T** terus mengamuk. Selanjutnya kedua boleh mata korban juga tak luput dari hajaran cangkul. Sedangkan jari telunjuk kanan nyaris putus”

Kasus lainnya sebagaimana yang diberitakan Riau Pos (04/08/07),

“inilah nasib yang dialami oleh Sr (27) warga jalan Kemiri Sukajadi Pekanbaru, akibat dipukul suaminya dia mengalami luka memar di bagian wajah.....kisah penganiayaan itu berawal ketika pelaku pulang ke rumahnya dengan wajah cemberut dan ditegur istrinya dengan perkataan yang tidak menyenangkan. Bahkan waktu itu korban malah mengaku cemburu, karena selama bekerja di luar dia mendapatkan informasi suaminya memiliki perempuan simpanan. Tidak senang dengan tuduhan itu, suami korban malah marah-marah, tidak hanya itu, rambut korban langsung dijamak, bogem mentah pelaku diayunkan ke wajah korban, sempat mengenai bagian dagu, mata serta kaki yang menyisakan luka memar dan membengkak

Selain itu, dari pengumpulan data skunder yang dilakukan di beberapa kantor kepolisian sektor kecamatan, beberapa kasus atau laporan yang masuk dapat digambarkan beberapa bentuk dan penyebab kekerasan sebagai berikut:



## KASUS I

Tanggal Laporan : 19 Oktober 2007

a.	Jumlah Korban	1 orang (Ibu Rumah Tangga)
b.	Jenis Kejadian	Perampokan
c.	Informasi Kejadian	Perampokan pada bagian belakang, pipi, dada dan kepala sehingga mengakibatkan luka-luka. Korban dan saksi tidak teridentifikasi.
d.	Polisi	IP Ah A
e.	Korban	Korban : 11 WNI ber. Cina (50 tahun)
f.	Hubungan Polisi Korban	Asam Irit
g.	Tindakan Polisi	131 No. 17 Tahun 2004 Pasal 179 KUHP
h.	Uraian Singkat	Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007, sekitar jam 11.00 WIB, telah terjadi perampokan antara pelaku dan korban yang bernama IP Ah A, yang berjenis kelamin laki-laki, korban mengalami luka-luka pada bagian belakang, pipi, dada, dan kepala sehingga mengakibatkan luka-luka. Korban dan saksi tidak teridentifikasi.

Sumber : Polsekta Senapelan

## KASUS II

Tanggal Laporan : 12 November 2007

a.	Jumlah Korban	1 orang (Ibu Rumah Tangga)
b.	Jenis Kejadian	Perampokan
c.	Informasi Kejadian	Perampokan pada bagian belakang, pipi dan kepala sehingga mengakibatkan luka-luka.
d.	Polisi	IP
e.	Korban	10 WNI ber. Cina
f.	Hubungan Polisi Korban	Asam Irit dan Irit
g.	Tindakan Polisi	131 No. 17 Tahun 2004 Pasal 179 KUHP

a.	Lokasi kejadian	Pada saat Senin tanggal 12 November 2007, sekitar jam 2040 PMS, ketika pulang ke rumah, korban melihat anak RRP bermain dalam halaman rumah di depan rumah. Korban menyuruh anaknya untuk pergi bermain ke rumah pada tetangga. Kemudian anak dan anaknya datang dengan sepeda motor. Lalu mendengar suara korban dan menyebarkan kasing bagian dari atas ke dalam seling seling rumah.
----	-----------------	---

Sumber : Polsekta Senapelan

### KASUS III

Tanggal Laporan : 13 April 2007

a.	Jumlah Korban	2 orang (anak dan istri)
b.	Jenis Kejadian	Penganiayaan
c.	Intensitas Kejadian	Menendang anak dan istri
d.	Pelaku	MU (suami)
e.	Korban	B (istri), dan Anak
f.	Hubungan Pelaku Korban	Suami, istri, ayah dan anak
g.	Terdak. Pihak	
h.	Uraian Singkat	Suami menendang istri melakukan hubungan intim, dan istri menolaknya, sehingga suami menjadi marah dan menendang istri termasuk juga menendang anaknya.

Sumber : Polsekta Sukajadi Kota Pekanbaru

### KASUS IV

Tanggal Laporan : 28 Mei 2007

a.	Jumlah Korban	1 orang (istri)
b.	Jenis Kejadian	Penganiayaan
c.	Intensitas Kejadian	Menendang, pukul, menendak, dan menendak tangan istri
d.	Pelaku	Ari (suami)
e.	Korban	BQ (istri)
f.	Hubungan Pelaku dan Korban	Suami - istri

g.	Terdapat Penderita	yang mengalami
h.	Liburan singkat	dan meminta uang belanja sebagai pengganti uang, karena ketika itu kali yang suami tidak memberikan uang belanja, sehingga mengakibatkan suami marah besar dan akhirnya terjadilah pertikaian suami yang besar.

Sumber : Polsekta Sukajadi Kota Pekanbaru

Dari contoh kasus diatas terdapat beberapa pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Kelas II A Pekanbaru.

**Tabel 9**  
**Hukuman Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menjadi Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Kelas II A Pekanbaru**

No.	Faktor-Faktor Penyebab KDRT	Korban Kekerasan			
		Suami		Istri	
		F	%	f	%
1.	Kondisi keprihadian dan psikologis yang tidak stabil.	10	83,4	7	46,6
2.	Kemandirian ekonomi istri.	0	0	3	20
3.	Perselingkuhan.	0	0	3	20
4.	Cemburu.	0	0	1	6,7
5.	Masalah anak.	1	8,3	1	6,7
6.	Campur tangan orang ketiga.	1	8,3	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber : Lembaga Permayarakatan Kota Pekanbaru

#### 4. Analisis Tentang Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Suami-Istri Dalam Rumah Tangga

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek, atau bahkan memaki, merupakan hal yang umum terjadi. Tapi semua itu, pada era globalisasi dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang

berbasis gender, yang secara spesifik mengacu kepada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Analisis terhadap faktor-faktor penyebab kasus kekerasan seksual, fisik, psikologis dan ekonomi terhadap informan, dalam penelitian ini menunjukkan adanya enam faktor penyebab kekerasan, yaitu pertama, kondisi kepribadian dan psikologis istri dan suami yang tidak stabil; kedua, kemandirian ekonomi istri; ketiga, perselingkuhan suami dengan perempuan lain; keempat, cemburu; kelima, masalah anak; dan keenam, campur tangan orang ketiga.

**a. Kondisi Kepribadian dan Psikologis Suami-Istri yang Tidak Stabil**

Kondisi kepribadian dan psikologis suami-istri yang tidak stabil dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Langley, Richard, dan Levi menyatakan bahwa kekerasan suami maupun istri terhadap salah satu pasangannya dalam rumah tangga dikarenakan “kekerasan dilakukan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah” (kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua). Hal ini juga dipertegas oleh Watson dan Skinner menyatakan bahwa perilaku agresi manusia adalah karena faktor lingkungan, bukan faktor “bawaan”. Manusia sebenarnya dilahirkan “baik” dan bermalu, sedangkan yang membuatnya, memiliki tabiat jahat adalah keberadaan institusi, pendidikan, serta teladan-teladan buruk. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa suami maupun istri yang melakukan kekerasan fisik, emosional dan ekonomi kepada salah satu pasangannya dalam rumah tangga disebabkan karena faktor internal seperti karakter yang emosional, keras kepala, pencemburu dan tersinggung.

Jenis-jenis kekerasan yang dilakukan suami maupun istri terhadap salah satu pasangannya dalam rumah tangga akibat dari kondisi kepribadian dan psikologis tidak stabil adalah kekerasan fisik, emosional dan ekonomi.

Kasus MB dan DS adalah salah satu contohnya. MB selalu dilecehkan oleh istrinya di depan anak-anaknya kalau mereka bertengkar, dan apabila MB melakukan perlawanan

dengan membentak, istrinya akan melakukan kekerasan fisik, selanjutnya MB mengatakan sejak menikah juga tidak diberi uang saku oleh istrinya. Menurut penuturan MB, istrinya bilang, bahwa istri adalah kepala rumah tangga, yang berfungsi mengatur semua kebutuhan ekonomi keluarga sedangkan suami adalah kepala keluarga yang berfungsi mencari dan memberi nafkah keluarga, sehingga semua gaji adalah hak istri dan anak. Selanjutnya DS juga bercerita, ia paling emosional kalau ingin menyelesaikan masalah suami tidak menanggapi. Dalam kasus ini nampak bahwa suami menjadi korban kekerasan fisik, emosional dan ekonomi, sedangkan istri korban kekerasan emosional dalam rumah tangganya.

Kasus AL dan RIN : AL sebagai suami lebih berperan mengurus rumah tangganya sedangkan RIN jarang melakukan tugas sebagai istri dan ibu dari anak mereka, selain itu RIN adalah tipe istri yang emosional, seperti penuturan AL, “Kalau sedang marah suaranya keras, tidak malu sama tetangga, kalau ditegur semakin keras, daripada nanti bertengkar dan dipukul, lebih baik saya diam”. Dari kasus ini nampak pola relasi gender yang tidak seimbang dalam keluarga, dan suami menjadi korban kekerasan fisik dan emosional dalam rumah tangganya.

Kasus ND dan SM : Pola relasi gender dalam keluarga, sesuai dengan peran tradisional diantara suami dan istri. Istri mengurus rumah tangga dan suami mencari nafkah. Menurut penuturan ND sumber konflik karena perbedaan pendapat, misalnya pada saat mereka sedang membangun rumah, istrinya berkeinginan dapurnya harus luas dan besar, padahal keuangan tidak memungkinkan, juga pernah ingin membeli kulkas, adik saya lagi butuh uang, saya sarankan ditunda dulu, istri marah dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Selanjutnya SM mengatakan kalau dia marah dan saya membalas, is diancam akan dipukul. Dalam kasus ini, suami-istri korban kekerasan emosional dalam rumah tangganya.

Kasus GBS dan SDM : Pembagian peran gender dalam rumah tangga jelas, istri mengurus rumah tangga dan suami pencari nafkah. Menurut cerita SDM suaminya selalu memukul kalau mereka bertengkar. Dia menuturkan contoh

pertengkaran yang menyebabkan dia mendapat pukulan “umpamanya kami bertengkar tentang masalah anak-anak, masalah keuangan, atau saya menjawab kata-katanya, dan lain-lain .... kalau ditanya gajinya berapa? Dia jawab buat apa tanya-tanya? Kalau saya jawab, mau tahu akukan istrimu, suami langsung emosi dan berteriak, dan sewaktu saya jawab lagi, dia kemudian memukul saya. Selanjutnya GBS menuturkan istrinya juga sering melecehkan dan menghina pada saat mau berhubungan seks, misalnya mulut dan ketiak bau membuat istri tidak berhasrat, itu yang sering membuat ia jengkel dan sakit hati. Dalam kasus ini suami menjadi korban kekerasan emosional sedangkan istri korban kekerasan fisik, emosi, dalam rumah tangganya.

Kasus DT dan AT : Pembagian peran gender dalam rumah tangga, istri mengurus rumah tangga, suami pencari nafkah. Menurut penuturan AT, ia pernah dipukul suami ketika hamil, pemicunya dia marah-marah pada saat suami pulang kantor dan sedang makan. Disisi lain DT juga bercerita waktu itu saya ambil lembur cari uang rokok, pulang kerumah istri marah-marah apalagi saya sedang makan, emosi saya timbul terjadilah pertengkaran diantara mereka. Dalam kasus ini suami korban kekerasan ekonomi sedangkan istri korban kekerasan fisik, emosional, dalam rumah tangganya.

#### **b. Kemandirian Ekonomi Istri**

Menurut Moors (1995) kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (biasa disingkat KDRT) bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, karena mungkin istri akan direndahkan oleh suami. Gelles (1995) juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya adalah ketidakmandirian si istri secara ekonomi. Kemudian Sharma (1994) ber teori bahwa kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh seorang perempuan akan meningkatkan harga dirinya dan meyebabkannya memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hubungan dengan suaminya. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Feminisme Liberal, bahwa apabila perempuan di beri peran public (bekerja di luar rumah, sosial, ekonomi, politik) maka tidak ada lagi jenis kelamin yang lebih dominan, karena

sumber ketidakadilan terhadap perempuan menurut perspektif ini adalah pemisahan privat dan publik.

Analisis diatas tidak sepenuhnya benar, sebab dalam penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan ekonomi istri justru menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri. Faktor kultural bahwa laki-laki mendominasi terutama dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkhi masih berlaku luas. Jenis-jenis kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri adalah kekerasan seksual, fisik, psikologis, dan ekonomi.

Kasus SDM, misalnya, ia tidak pernah tahu berapa penghasilan suami. Suami hanya memberi uang kalau lagi mau, kalau ia bertanya, dia akan marah--marah, memaki, juga memukul. Selanjutnya SDM menuturkan, uang jajan anak, kebutuhan sekolah seperti tas, seragam, sepatu, dan alat tulis menulis semua ia yang beli. SDM berkata, padahal dia kepala keluarga sudah seharusnya menjadi tanggung jawab suami.

Selanjutnya SR juga tidak pernah diberi uang belanja, dipukul pada saat menolak melakukan hubungan seks, dan kata-kata anjing, babi, goblok, merupakan panggilan untuk dirinya kalau suami sedang marah.

### **c. Perselingkuhan**

Perselingkuhan suami dengan perempuan lain menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perselingkuhan adalah kekerasan suami yang mungkin terjadi secara tiba-tiba, tanpa diketahui oleh istri. Beberapa informan dalam penelitian ini memang mendapati suaminya berselingkuh sebagai protes terhadap istrinya dan setelah ada masalah yang mengganggu hubungan antara suami istri. Perselingkuhan dapat menyebabkan istri mengalami kekerasan seksual, fisik, psikologis dan ekonomi dalam rumah tangganya.

SR, misalnya dalam perkawinannya mengalami kekerasan seksual, fisik, psikologis dan ekonomi. SR menuturkan : Waktu ia hamil anak pertama, ia tidak tahu suami selingkuh dan menghamili temannya sendiri, karena kasihan tidak ada yang bertanggung jawab, ia dan temannya berusaha menggugurkan kandungan tersebut, sekarang dia

ulangi lagi berselingkuh dengan teman kantornya.

HS, juga mengalami kekerasan seksual dan fisik dalam perkawinannya akibat suami selingkuh. HS menceritakan pengalamannya sebagai berikut: Dari awal perkawinan, suami juga menghamili wanita lain, anak hasil selingkuhnya digugurkan dan menikah dengan HS. Selanjutnya ia menuturkan selama perkawinan ia sering dipukul suami, pada usia perkawinan mereka 3 tahun suami selingkuh lagi dengan janda teman sekantor.

Pada kasus ini, pemukulan selalu dilakukan oleh suami ketika dalam keadaan marah karena istri mereka menegur kelakuan suaminya berselingkuh. Pemukulan dilakukan sebagai unjuk demonstrasi atau unjuk dominasi kekuasaan para suami untuk dan sebagai upaya menutupi ketersudutan dan kesalahan mereka.

R juga mengalami kekerasan seksual dan ekonomi akibat suaminya selingkuh, rumah dan tabungannya dihabiskan untuk membeli rumah dan mobil untuk WIL suami.

#### **d. Masalah Anak**

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masalah anak merupakan faktor lain yang menyebabkan timbulnya kekerasan domestik. Jenis-jenis kekerasan yang dilakukan suami maupun istri terhadap salah satu pasangannya dalam perkawinan akibat masalah anak adalah kekerasan fisik dan emosional.

AL misalnya, ia pernah di caci maki dan dipukul istri karena masalah anak. AL menuturkan :

“ Malam itu sedang ada tamu, anak loncat-loncat di depan tamu dan hampir menjatuhkan gelas, ia memarahinya setelah tamu pamit pulang ia bilang : “ dasar anak tidak tau aturan, kurang ajar”. Istri yang sedang sibuk menyelesaikan materi perkuliahan tersinggung dan langsung marah, memaki dan memukulnya dengan sapu lidi”

Pengalaman yang sama juga diceritakan oleh FM, suami pernah meludahi dan melempar dengan mug, hingga kepalanya memar, gara-gara mereka bertengkar masalah anak.

#### **e. Cemburu**

Salah satu terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah faktor cemburu.



#### f. Campur Tangan Orang Ketiga

Campur tangan anggota keluarga dari pihak istri terutama ibu mertua, dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara suami-istri. Ibu mertua yang suka menjelek-jelekkan menantunya dapat menyebabkan pemicu konflik dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan yang timbul akibat campur tangan pihak keluarga antara lain kekerasan fisik dan psikologis.

No.	Faktor-Faktor Penyebab KDRT	Korban Kekerasan			
		Suami		Istri	
		F	%	f	%
1.	Kondisi kepribadian dan psikologis yang tidak stabil.	10	83,4	7	46,6
2.	Kemandirian ekonomi istri.	0	0	3	20
3.	Perselingkuhan.	0	0	3	20
4.	Cemburu.	0	0	1	6,7
5.	Masalah anak.	1	8,3	1	6,7
6.	Campur tangan orang ketiga.	1	8,3	0	0
Jumlah		12	100	15	100

Sumber : Data Primer, 2007

N = 30 (15 Pasangan suami istri)

Keenam faktor penyebab timbulnya kekerasan, dimana korban kekerasan terbanyak dialami oleh perempuan dalam rumah tangganya, tidak terlepas dari konstruksi sosial kultural masyarakat setempat, misalnya pemberlakuan *bells* pada saat perkawinan dimana perempuan yang sudah berstatus istri akan menjadi “hak milik” suami karena sudah “dibeli putus” oleh pihak keluarga laki-laki, yang merupakan ciri masyarakat dengan sistem patriarkhi. Dalam kaitan ini, dapat dihubungkan dengan analisis yang dikemukakan oleh Connel bahwa kekerasan digunakan sebagai jalan keluar dari proses sosial ketika maskulinitas dikonstruksikan, yang berdasar pada tradisi, kebiasaan, dan kepercayaan agama. Kepercayaan menyangkut otoritas laki-laki terhadap pasangannya dimana suami adalah pemimpin keluarga, dan kepercayaan bahwa kekerasan merupakan bentuk penghukuman yang dilegitimasi, dapat digunakan sebagai praktik otoritas tersebut. Lebih lanjut, budaya patriarkhi ini juga dilanggengkan oleh sikap permisif perempuan

terhadap perlakuan laki-laki, karena perempuan tidak memiliki posisi tawar (*bargaining power*).

#### 5. Pengetahuan Suami-Istri Mengenai Undang-Undang KDRT

Dari informan yang berjumlah 30 orang hanya 3 orang (10%) yang menyatakan belum pernah mendengar UU KDRT. Sedangkan 27 orang (90%) pernah mendengar tentang UU KDRT.

**Tabel 11**  
**Sebaran Informan Antara yang Pernah dan Tidak Pernah Mendengar UU KDRT**

No	DENGAR / TIDAK DENGAR TENTANG UU KDRT	SUAMI		ISTRI	
		f	%	f	%
1.	Pernah dengar UU KDRT.	14	93,3	13	86,7
2.	Tidak pernah dengar UU KDRT.	1	6,7	2	13,3
	<b>JUMLAH</b>	15	100	15	100

Sumber : Data Primer, 2007

N = 30 (15 pasangan suami istri).

**Tabel 12**  
**Sebaran Informan Mengenai Sumber Informasi Pertama kali**

No	MENDENGAR TTG UU KDRT	f	%	F	%
1.	Saudara/suami/istri/famili.	-	-	-	-
2.	Teman/tetangga.	-	-	-	-
3.	Seminar.	-	-	1	6,7
4.	Mass media/radio/tv/surat kabar, majalah.	12	80	11	73,3
		-	-	-	-

Sumber : Data Primer, 2007

N = 30 (Pasangan Suami Istri)

Berdasarkan tabel diatas jelas bahwa sumber informasi pertama kali informan mendengar tentang UUKDRT berasal

dari mass media (radio/tv/surat kabar, majalah) mempunyai prosentase yang tinggi (76,7%), sedangkan 6 orang (20%) mendengar dari peneliti dan 1 orang (3,3%) mendengar lewat seminar.

**Tabel 13.**  
**Sebaran Informan Mengenai Pengetahuan**  
**Tentang Isi UUKDRT**

No	Pengetahuan Tentang Isi UU KDRT	Suami				Istri			
		Tahu		Tidak Tahu		Tahu		Tidak Tahu	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1.	KDRT merupakan tindak kriminal.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	KDRT merupakan tindak Kriminal dan mencakup kekerasan fisik.	12	80	3	20	12	80	3	20
3.	KDRT mencakup tindak Kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Perlindungan hukum terhadap PRT dari tindakan kekerasan oleh majikan.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	KDRT bukan masalah domestik tapi kriminal.	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		12	80	3	20	12	80	3	20

Sumber: Data Primer, 2007

N = 30 (15 pasangan suami istri).

Merujuk pada tabel 5.23, terlihat bahwa dari 30 informan, 24 orang (80%) mengetahui tentang isi dari UU KDRT, tetapi hanya mempunyai pengetahuan yang terbatas, bahwa isi dari UU KDRT adalah merupakan tindak kriminal dan hanya mencakup kekerasan fisik. Sedangkan 6 orang (20%) tidak mengetahui tentang isi dari UU KDRT.

#### 6. Kondisi Perkawinan Korban

Adapun sikap dan reaksi korban dalam menghadapi keseluruhan perilaku kekerasan suami maupun istri dalam rumah tangganya dihubungkan dengan keputusan menjaga

keutuhan perkawinan dapat dibagi dalam 2 sikap, yaitu:

- Berpisah tanpa diakhiri dengan gugatan cerai melalui pengadilan agama ataupun pengadilan negeri.
- Bertahan dalam perkawinan dengan melakukan upaya mencari solusi bersama.

Berdasarkan seluruh informan, hanya satu pasangan suami istri yaitu SB dan LB, yang akhirnya mengakhiri perkawinan mereka dengan berpisah, dimana LB kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa serta anak mereka, tanpa diakhiri dengan gugatan cerai di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri. Sedangkan informan lainnya bersikap mempertahankan perkawinannya dan berusaha dengan berbagai cara untuk mengubah keadaan sifat suami maupun istri dan mencari jalan keluar/mencari solusi bersama setiap kali suami maupun istri baik dengan cara diam, mengalah, membujuk, maupun memberi nasihat kepada suami maupun istri.

Respon informan apabila dihubungkan dengan pengetahuan tentang UU KDRT, pada umumnya informan tahu tentang isi UU KDRT tetapi masih mempunyai pengetahuan yang terbatas, bahwa isi dari UU KDRT adalah merupakan tindak kriminal yang hanya mencakup kekerasan fisik, sehingga informan beranggapan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangganya merupakan masalah pribadi yang tabu untuk diceritakan kepada orang lain, baik kepada orang tua, mertua, teman, saudara, ataupun tetangga. Oleh karena itu, mereka cenderung diam, mengalah, dan hanya memendam penderitaannya dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku kekerasan suami maupun istri adalah jalan yang terbaik demi keutuhan rumah tangganya tanpa mengambil keputusan menggugat cerai melalui jalur hukum.

## D. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Analisis mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru dan kabupaten Kampar, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan suami-istri tentang jenis dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah seperti mencaci, memukul, meludahi, menendang, dan menyulut dengan rokok.
2. Tindakan yang cenderung merupakan kekerasan dalam rumah tangga adalah seperti : menghina atau tidak menghargai, main serong, menghabiskan uang penghasilan, tidak memberikan uang untuk belanja/ makan, dan istri tidak memberikan uang saku.
3. Pada umumnya responden menilai yang bukan termasuk jenis dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah “memberikan komentar dengan kata yang kasar atau jorok”. Sedangkan yang cenderung bukan termasuk kekerasan dalam rumah tangga adalah seperti membentak, dan ikut campur urusan pasangan.
4. Responden cenderung berbeda pendapat mengenai jenis dan bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti: memaksa melakukan hubungan seksual ketika pasangan tidak menginginkannya, tidak memperhatikan kepuasan seksual, mengancam, melarang pasangan bergaul atau berhubungan dengan saudara atau teman, pergi tanpa meninggalkan pesan.

Terhadap hal-hal tersebut suami cenderung kurang melihatnya sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga sedangkan istri lebih banyak melihatnya sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan suami maupun istri mempunyai pendapat yang berbeda tentang batasan kekerasan dalam rumah tangga, dimana suami berpendapat bahwa kekerasan, adalah suatu tindakan yang sifatnya fisik saja, sedangkan istri berpendapat bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang sifatnya fisik maupun non fisik yang mengakibatkan penderitaan pada orang lain.

5. Bahwa suami maupun istri pernah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tanggannya, namun korban kekerasan paling banyak dialami oleh para istri dalam berbagai jenis dan bentuk antara lain sebagai berikut:
  - a. Kekerasan seksual, ditemukan sebanyak 15 kasus, semua istri pernah mengalami kekerasan seksual dalam rumah

tangganya dalam bentuk suami “memaksa melakukan hubungan seksual”. Hal ini menunjukkan kekerasan seksual terhadap istri merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam perkawinan (*marital rape*) disebabkan karena adanya dominasi suami dengan keegoisannya dalam persetubuhan daripada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan seksual.

- b. Kekerasan fisik sebanyak 13 kasus, 5 kasus suami dan 8 kasus istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangganya dalam bentuk dipukul, diludahi, dijambak rambutnya, ditendang dan dilempar dengan mug dan piring. Suami korban kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena karakter istri yang pemarah, sehingga apabila ada konflik dimanfaatkan oleh para istri untuk melampiaskan kemarahannya sebagai wujud kompensasi untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Sedangkan istri korban kekerasan dalam rumah tangganya disebabkan akibat sistem gender yang patriarkhi, dimana laki-laki mempunyai kekuasaan superior dalam pengambilan keputusan dan kontrol dalam bentuk kekerasan fisik, sebagai bentuk mengekspresikan kekuasaan dan superioritas mereka sebagai laki-laki terhadap istrinya dalam keluarga.
- c. Kekerasan Seksual, Fisik, Psikologis dan Ekonomi
- d. Kekerasan Seksual, Fisik dan Psikologis
- e. Kekerasan Seksual dan Fisik
- f. Kekerasan Seksual dan Psikologis
- g. Kekerasan Seksual dan Ekonomi, dibandingkan dengan suami yang mengalami jenis dan bentuk kekerasan berganda antara lain sebagai berikut:
  - 1) Kekerasan fisik, psikologis dan Ekonomi
  - 2) Kekerasan fisik dan psikologis
6. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga antara lain:
  - a. Kondisi kepribadian dan psikologis suami-istri yang tidak stabil
  - b. Kemandirian ekonomi istri

- c. Perselingkuhan
  - d. Masalah anak
  - e. Cemburu
  - f. Campur tangan orang ketiga
7. Akar permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis gender dimana korban kekerasan lebih banyak dialami oleh istri adalah suatu bentuk ketidakadilan gender dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh nilai-nilai *patharkhi*, dimana memposisikan perempuan pada peran dan status yang tersubordinasi dalam sistem masyarakat Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar yang masih menempatkan peran gender perempuan pada sektor domestik sehingga masih banyak istri yang belum mampu memahami makna dari kesetaraan dan keadilan gender terhadap posisi dan peran mereka serta hubungannya dengan suami dalam rumah tangga.

b. Saran

Untuk mencegah terjadi dan meluasnya tindak kekerasan dalam rumah tangga perlu tindakan bersama antara semua pihak dari masyarakat sampai dengan aparat penegak hukum, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan sebagai berikut :

1. Dalam relasi suami istri perlu ditanamkan prinsip kemitrasejajaran dan keadilan gender, dimana suami maupun istri sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling keterbukaan, pengertian, menghormati, menghargai, kerjasama dan musyawarah dalam memutuskan sesuatu bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga.
2. Sosialisasi UU KDRT oleh pemerintah dan stakeholder perlu terus dilakukan.
3. Pemahaman mengenai makna perkawinan sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan UU KDRT perlu disosialisasikan oleh lembaga penasehat perkawinan (KUA) melalui konseling kepada calon pasangan suami istri sebelum memasuki perkawinan, agar mereka mengetahui tentang hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Saraswati, Ayu, Luh. 2000. *Kekerasan Negara, Perempuan, Dan Refleksi Negara Patriarkhi Dalam Negara Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Baso, Zohra, dkk. 2002. *Menghadang Langkah Perempuan*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Jogjakarta.
- Black, JA dan D.J. Champion. 1992. *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*. PT.Eresco, Bandung.
- Branen, Julia. 2002. *Memandu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Budiman, Arief. 1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Gramedia, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian kualitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Camara, Dom Helder. 2000. *Spiral Kekerasan*. Jokjakarta: Pres bersama Pustaka Pelajar, Pengantar Lambang Trijon.
- Ch, Mufida. 2004. *Paradigma Gender*, Edisi Revisi, Bayu Media Malang.
- Daniel, J. Sonkin dan Michael Durphy. 1989. *Learning to live Without Violence*. A Handbook for Men.
- Djanah, Fathul, dkk. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*. LKiS, Jogjakarta.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakih, Mansur. 1998. *Diskriminasi Dan Beban Keda Perempuan: Perspektif Gender*. Dalam Hj Bainar (Ed). *Wacana Perempuan Dalam KelIndonesiaan Dan Kemodernan*. Pustaka CIDESINDO, Yogyakarta.
- Fromm, Erich. 2000. *Akan Kekerasan Analisis Sosio-Psikologi atas Watak Manusia*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Gelles, R.J. 1985. *Domestic Violence: AN Overview*. Kingston: America Sociological Association.
- Gelles, R.J. 1990. *Intimate Violence<sup>in</sup> families*. California: Sage Publication.
- Gelles, R.J. 1995. *Violence in the Family: A review of Research in the Seventies*. Journal of Marriage and the Family, 42 (4).
- Ghoni, Djunaidi.M. 1988. *Dasar-Dasar Penelitian Eksperimen*. Usaha Nasional, Surabaya
- Handayani, Trisakti, sugiarti. 2002. *Konsep dan tehnik Penelitian Gender*. MM Press, Malang.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2004. *Domestic Violence (Kekerasan Dalam*



- Rumah Tangga)** *Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis*. Dalam Indonesian Journal Of International Law, Vol 1, Juli, Fakultas Hukum U1, Jakarta.
- Hass, Beth B. And Myra Max Ferre (eds). 1991. *Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research*. California, Sage Publications.
- Heise, Lori. 1992. *Violence Against Women The Missing Agenda*.
- Hendarso, Susanti Emi. *Gender dan Pembangunan*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), Ujung Pandang, 2-3 Nopember 1995.
- Kalibonson, R.S. 2000. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran Hak Asasi manusia*. Dalam A.S.Luhailima (Eds). *Pemahaman terhadap Bentuk-Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Kelompok Keda "Convention Watch", Pusat Kajian Wanita dan Fewleral, Jakarta.
- Kalyanamitra, 1999. *Fakta Kekerasan terhadap Perempuan*. Catatan Pemantauan dan Pendampingan Selama 1997- Awal Maret 1999, Author, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Mandan Maju, Bandung.
- Khairuddin, N.M. 1997. *Pelecehan Seksual terhadap Istri di Irian Jaya*. Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan Ford Foundation, Yogyakarta.
- Komnas Perempuan. 2002. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Ameepero, Jakarta.
- Massudi, Massdar F. 1997. *Perempuan dalam Wacana Keislaman*. dalam Perempuan dan Pemberdayaan : Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli, Jakarta, Kerjasama Program Studi Kajian wanita Program Pasca Sarjana universitas Indonesia, Harlan Kompas dan Penerbit Obor.
- Miles B, Matthew dan Huberman, Michael. A. 1992. *Analisis Data Kualitatif* UI Pres Jakarta.
- Mills, John Stuart. 1999. *Pria feminis why not*. jumul Perempuan edisi 12 : 27-29, November-Desember.
- Moeleong, J. Lexi. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moors, A. 1995. *Woman, Property, and Islam*. Cambricge University Press, New York.
- Murniaty P, Nunuk A. 2004. *Getar Gender dalam Perempuan Indonesia*

- dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Indonesiatara, Magelang.
- New South Wales (NSW) Child Protection Council. 1996. *Child Abuse and Domestic Violence: A Child Protection Perspective*, Author, Sydney.
- Nurhayati, Elli. 1999. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Rifka Annisa, Yogyakarta.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. PT. Sapdodadi, Jakarta.
- Umar, Nasaruddin, dkk. 2004. *Membangun Kultur Ramah Perempuan Reinterpretasi Dan Aktualisasi Pesan Kitab Suci*. Restu Ilahi, Jakarta.
- Undang-undang RI No.23 tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Citra Umbara, Bandung.
- Pandu, E. Maria 2003. *Sadar Sehat Berbasis Kemitraan Terpadu Dikalangan Keluarga Nelayan Mandar*. Proposal Penelitian, Program Pasca Sarjana UNHAS, Makassar,
- Pellu L.C., Suzana. 1998. *Masalah Mitra Sejajar Laki-laki dan Perempuan Dalam Kegiatan di Sektor Domestik dan Publik. (Studi Kasus Berdasarkan Mata Pencarian di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo-Kodya Kupang)*. Skripsi, FISIP-UNDANA.
- Penpada VVasti. 2002. *Studi sosiologis Tentang Kesetaraan Hak Antara Laki-laki dan Perempuan, di Teluk Mutiara, Kabupaten Alor*. Skripsi, FISIP-UNDANA.
- Population Reports, Ending Violence Against Women, Serial L (11)*. 1999. Maryland: The Centre for Health and Gender equity (CHANGE).
- Ritzer, George dan Gootman, J. Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana, Jakarta.
- Safilios-Rothschild, C. 1970. *The Study of Family Power Structure. - A Review*. Journal of Marriage and Family, 32.
- Salmi, Jamil. 2003. *Kekerasan Dan Kapitalisme*. Pustaka, Pelajar, Jogjakarta.
- Sharma, A. 1994. *Protection to Women in Matrimonial Home*. Deep And Deep Publication, New Delhi.
- Singarimbun, M. dan Effendi, Sofyan (ed). 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3S, Jakarta.
- Sinta, Ratna Dewi. 1996. *Kekerasan suami Pada Istri di Daerah Perkotaan Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Psikologi UGM.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Syamsury. 1978. *Pengantar Penelitian Ilmiah Sosial*. BP3M.
- Timor Express. 2005. *Kupang Metro*, 3 Juni, Kupang.

- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. 2001. *Perfindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama, Malang.
- Werner, N.A.,M.A.Zahn, dan R.S.Sagi. 1990. *Violence Pattern, Causes, Public Policy*. Harcourt Brace Jovanovich, New York.
- Wife Abuse, *What is it, What to do about it*. booklet Alberta Social Service Canada.
- Windhu,Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Kanisius, Yogyakarta.

PEMBANTU RUMAH TANGGA DI PEKANBARU:  
*Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga  
dengan Korban Pembantu Perempuan\**

---

Wilaela

---

## A. PENDAHULUAN

Sudah terlalu umum diketahui bahwa keberadaan perempuan sampai saat ini masih tetap ter subordinasi dalam relasinya dengan laki-laki. Bahkan ironis, di tengah maraknya perjuangan menuntut kesetaraan dan keadilan gender serta populernya kiprah gerakan perempuan, justru berbagai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan semakin intens terjadi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan secara kodrati merupakan makhluk Allah SWT yang istimewa dengan segala struktur organis-biologis yang membedakannya dengan sesamanya, makhluk laki-laki. Perempuan secara kodrati mengalami menstruasi, bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Karena kodrat ini pula ideologi gender telah menempatkan perempuan sebagai makhluk rumahan dengan segala feminitasnya seperti lemah lembut, submisip, setia, sabar sekaligus memiliki cinta tak berlimit dan tiada bertepi.

Ideologi gender dengan segala faktornya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pemahaman keagamaan, telah ambil andil dalam menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Termasuk ketidakadilan gender adalah fenomena kekerasan berbasis gender (*gender based violence*), di antaranya berupa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam relasi personal di dalam rumah tangga, atau dikenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT). Belakangan ini, pemakaian istilah kejahatan seksual atau kejahatan kemanusiaan, makin populer menggantikan istilah kekerasan (Nova, 26 Nov 2000; Kompas, Senin 4 Maret 2002; Kompas, Senin, 11 Maret 2002).

Intensitas KDRT di Indonesia cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Bentuk kejahatan yang sering mengambil korban istri dan anak-anak, tak terkecuali pembantu ini, tidak hanya berupa makian, cercaan, tamparan, tendangan, pemukulan, dan pemaksaan seksual (pemeriksaan) bahkan bisa sampai pada pembunuhan (Farcha, 1999). Hati kita masih miris menyaksikan berita bagaimana tubuh Sari, seorang pembantu rumah tangga (selanjutnya disingkat PRT) menjadi kurus kering dengan sekujur tubuh penuh luka akibat dianiaya majikannya. Begitupun, di awal tahun 2004 masih jernih dalam benak kita

bagaimana PRT Mulyani, yang masih belia tewas di tangan majikannya. Kasus Nirmala Bonat juga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dialami PRT dan menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia dan Malaysia di paruh kedua tahun 2004.

Data statistik yang lengkap mengenai kasus KDRT di seluruh Indonesia sendiri memang tidak tersedia. Sedikitnya ada dua alasan yang berkaitan untuk menjawab kekosongan data tersebut: *Pertama*, sejauh ini KDRT tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat. Persepsi yang berkembang di tengah masyarakat adalah KDRT sebagai urusan pribadi dan oleh karenanya pihak-pihak lain (termasuk aparat penegak hukum atau polisi) tidak sepatutnya turut campur tangan.

*Kedua*, kebanyakan korban tidak mau bicara secara terbuka tentang kasus KDRT yang dialaminya (Kalibonso, 2002:8-9). Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa persoalan KDRT sebagai aib dan tabu untuk dibesar-besarkan sampai ke luar rumah. Apalagi jika korbannya adalah PRT yang secara ekonomi tergantung dengan majikannya. Ketergantungan ini sering menjadi faktor kebisuan dan permisif PRT terhadap kekerasan yang dideritanya.

Memang, tidak semua kasus tentang PRT melibatkan mereka sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga majikan. Ada juga dijumpai kasus dimana PRT menjadi pelaku kejahatan terhadap majikannya. Misalnya, kasus Dar, seorang PRT yang tega menculik anak majikannya demi mendapatkan uang tebusan Rp. 3 juta (Riau Pos, Kamis, 10 April 2003). Ada juga PRT yang membuat pengakuan palsu di hadapan polisi bahwa dirinya diperkosa majikan. Yang terakhir ini disinyalir sengaja dilakukan PRT tersebut yang bekerjasama dengan pihak yayasan penyalurnya untuk memeras majikannya (Riau Pos: Senin 21 April 2003), dan masih banyak kasus yang membuat orang berfikir dua kali untuk mengambil jasa PRT.

Penelitian ini mengangkat isu atau persoalan tentang bagaimana kasus kekerasan yang menimpa PRT di Pekanbaru: alasan mereka memilih menjadi PRT, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku KDRT dan korban lainnya, serta relasi pembantu dengan majikan dalam kasus yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana

kasus-kasus KDRT yang menimpa PRT di Pekanbaru dengan melakukan analisis atas kasus-kasus kekerasan yang mereka alami dan bentuk-bentuknya.

Sepengetahuan peneliti, masalah KDRT apalagi dengan fokus pada kekerasan yang dialami oleh PRT di Pekanbaru kurang diminati sebagai objek penelitian terutama dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan dalam perspektif gender. Boleh jadi hal ini disebabkan karena masalah KDRT cenderung dipahami oleh masyarakat sebagai masalah personal dan privat sifatnya. Adalah tabu untuk mengekspos kasus-kasus rumah tangga termasuk kekerasan yang terjadi di dalamnya. Bahkan aparat penegak hukum seringkali memandang kasus-kasus KDRT yang dilaporkan sebagai kasus-kasus ringan yang tak perlu ditindaklanjuti laporannya atau kasus yang dipandang dapat diselesaikan secara kekeluargaan (cukup dengan berbaikan kembali antara pihak pelaku dengan korban).

Apalagi kalau korbannya adalah PRT yang terikat kontrak secara ekonomi dengan pelakunya. Korban dengan sendirinya lebih memilih mendiamkan berbagai kekerasan yang dialaminya. Belum lagi stereotipe karena umumnya PRT berjenis kelamin perempuan, sering dianggap menjadi penyulut terjadinya kekerasan. Hal ini diperparah oleh masih adanya persepsi dan sikap keluarga yang menganggap hak dan kedudukan PRT yang tidak sederajat dengan mereka.

Fenonema meningkatnya intensitas kasus-kasus KDRT yang dilansir oleh berbagai media, lokal dan nasional, cetak dan elektronik, telah menggerakkan banyak pihak ingin segera menyumbat arus KDRT. Salah satunya adalah RAN-PKTP (Rencana Aksi Nasional - Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) yang dicanangkan tahun 1999 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bersama masyarakat dan masih menjadi kebijakan pemerintah hingga sekarang. Aksi ini sendiri dilhami oleh semangat Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (JP 26:7). Bahkan Indonesia sejak tahun 1983 telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yaitu dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan. Sayangnya, Undang-Undang dimaksud kurang disosialisasikan (Kompas, 24 September 2001).

Cukup lama berbagai kalangan baik pemerintah maupun non pemerintah (LSM) melakukan aksi dan gerakan moral memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan. Akademisi bergerak melakukan penelitian. Praktisi atau aktivis dan relawan mengadakan advokasi terhadap korban kekerasan termasuk KDRT seperti yang dilakukan oleh *Women Crisis Centre* Rifka Annisa, Kalyanamitra, LBH APIK dan lain-lain, dengan metode antara lain *one stop service* (Farcha: 1999; Kompas, 10 September 2001).

Akhirnya berita cukup menggembirakan adalah disahkannya RUU PKDRT oleh Presiden Megawati Megawati Soekarno Putri tanggal 20 September 2004. Kemudian, dengan disahkannya UU PKDRT berarti kekerasan yang selama ini terjadi di ranah privat dilegalkan menjadi urusan publik bahkan urusan negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Diah, 2000) dan berbentuk studi kasus (Yin, 2000) yaitu studi yang dilakukan secara intensif terhadap kasus pembantu rumah tangga (PRT) di Pekanbaru. Diakui ada keterbatasan peluang akses dan kontrol peneliti dalam penelitian ini, sehingga perspektif gender yang ingin dilakukan ketika mendekati informan mengalami hambatan. Sepanjang yang dapat dilakukan, peneliti hanya mempengaruhi persepsi tentang pekerjaan PRT, tentang hak dan kewajiban pada informan. Dengan kata lain, proses pendampingan sejauh ini tidak berjalan maksimal dan hanya mengikuti rangkaian proses penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi wawancara mendalam, terbuka dan observasi. Subyek dalam penelitian ini adalah lima pembantu rumah tangga atau PRT yang bekerja pada keluarga yang berbeda. Keenam subyek ini diberi nama atau kode sesuai dengan nama panggilan mereka: Bude Sri, Ita, Heni, Ati dan Ana. *Proposisi* yang dikedepankan dalam studi kasus ini dilatari oleh hasil observasi pendahuluan terutama melalui tinjauan dokumen berita Riau Pos sepanjang tahun 2003, bahwa latar belakang seseorang memilih menjadi PRT umumnya seragam yaitu karena faktor ekonomi dan faktor pendidikan rendah minus ketrampilan lainnya. Sekalipun latar



belakang identitas PRT sebenarnya beragam, seperti suku, agama, dan usia, agaknya faktor rendahnya pendidikan orang tua dan responden sendiri, kemiskinan struktural dan persepsi bahwa PRT sebagai anak adalah barang milik sekaligus aset yang dapat dipergunakan sekehendak hati orang tua telah ikut ambil bagian untuk melempangkan jalan bagi langgengkan bisnis jasa tenaga manusia ini (Wilaela, 2003).

Namun studi kasus dalam penelitian ini tidak menekankan pada faktor latar belakang seseorang memilih profesi PRT, sebab tanpa melalui penelitian pun kita sudah mafhum bahwa 2 faktor dominan itu mewarnai setiap alasan yang ada. Tekanan justru diberikan kepada faktor-faktor pendukung yang memancing informan menjadi PRT. Dengan demikian, penelitian ini memang begitu kasuistik.

Kasus menarik lainnya dalam studi pendahuluan melalui telaah arsip Riau Pos tahun 2003 tersebut adalah ditemukannya 2 orang PRT, justru seorang bertindak sebagai pelaku kejahatan yaitu melakukan pencurian barang berharga majikannya dan seorang lagi nekad menculik balita majikannya dan menuntut uang tebusan. Mengetahui latar belakang terjadinya tindak kriminal yang dilakukan 2 PRT di tempat majikan mereka masing-masing merupakan motif lain bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Apalagi kasus tersebut kian memperkuat image bahwa PRT perlu diwaspadai, image mana kian melanggengkan kekerasan yang dialami PRT.

Namun perkembangan yang terjadi mendahului proses pengumpulan data, adalah di luar kemampuan kontrol peneliti, yaitu ketika dua informan di atas, dari enam informan yang direncanakan semula ternyata telah meninggalkan kota Pekanbaru. Padahal dua informan dimaksud diharapkan dapat mengusung profil lain dari profesi PRT yaitu terlibat tindak kriminal sebagai pencuri dan penculik. Dalam konteks KDRT, secara kasat mata mereka seolah bertindak menjadi pelaku kekerasan psikis dan ekonomi terhadap majikan. Sangat disayangkan kita tidak tahu, faktor apa sesungguhnya yang menyebabkan mereka melakukan kekerasan tersebut.

Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka terhadap informan-informan kunci. Informan kunci adalah pembantu

rumah tangga yaitu Bude Sri, Heni, Ita, Ati dan Ana. Untuk menghindari 'kemacetan' dalam wawancara dan mengingat informan tidak mesti dapat didesak untuk bekerja sama secara penuh dalam menjawab pertanyaan, maka peneliti menggunakan instrumen pedoman wawancara disamping menyiapkan informan pendukung. Informan pendukung dipilih dari mereka yang memiliki otoritas karena ketekunan mereka dalam penelitian tentang isu perempuan, juga mereka yang memakai jasa PRT, termasuk beberapa orang yang memiliki problem relasi majikan-PRT. Pertanyaan untuk informan pendukung dilakukan dalam bentuk dialog informal sehingga pendapat yang berkembang lebih banyak didasari pada pengalaman pribadi.

Observasi dilakukan selama wawancara berlangsung, sebelum atau sesudahnya. Ini merupakan suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk mengamati kegiatan-kegiatan kehidupan riil, perubahan emosi dan sikap informan selama wawancara, seperti: menangis, geram, marah, tidak serius, gagap, atau terbata-bata. Observasi juga dilakukan terhadap lokasi dimana mereka bekerja, dan untuk mengamati secara langsung bagaimana dampak fisik atau material akibat dari pilihan atau keterpaksaan informan menjadi PRT. Dalam hal observasi ini, peneliti bertindak hanya sebagai pengamat dengan membatasi perilaku yang akan mempengaruhi subyek penelitian.

## **B. BERBAGAI ALASAN SESEORANG MENJADI PRT**

Beberapa alasan klasik tentang mengapa seseorang memilih menjadi PRT, diantaranya adalah karena pendidikan yang rendah sehingga ia memilih bekerja menjadi PRT. Profesi ini sejauh yang dipahami memang tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu. Imbasnya adalah pada alasan lainnya dimana pekerjaan sebagai PRT tidak membutuhkan ketrampilan tertentu yang mesti dilatih di lembaga pendidikan formal. Untuk menjadi PRT, seseorang yang tidak sekolah pun bisa melakukannya. Bukankah cuci piring, memasak atau bersih-bersih itu pekerjaan rutin yang bisa karena biasa melihat atau melakukannya?

Disamping alasan klasik pendidikan rendah, alasan ekonomi juga mendominasi faktor latar seseorang memilih menjadi PRT. Karena kemiskinan, seseorang rela meninggalkan

kampung halamannya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu kemampuan dasar yang tidak diperoleh dari bangku sekolah, seperti bersih-bersih, mencuci, menggosok atau memasak, pekerjaan sebagai PRT.

Oleh karena alasan-alasan di atas telah umum dipahami tanpa melakukan penelitian intensif sekalipun, maka penelitian ini ingin melihat aspek lain dari faktor latar seseorang memilih menjadi PRT. Berikut ini, beberapa pernyataan dari informan yang menggambarkan alasan pilihan mereka menjadi PRT.

1. *Kejenuhan Tinggal di Kampung:*

Sebagai gadis remaja, selepas SMP Ati (18 tahun) hanya tinggal di rumah bersama kedua orang tuanya dan dua adiknya yang masih bersekolah di bangku sekolah dasar. Tidaklah mudah baginya, sebagai gadis remaja di kampung dimana masyarakat hanya berpikir hari ini untuk hari ini. Ati mulai bosan tinggal di kampung di suatu desa di Lampung Selatan. Ketika seorang kawannya, Lestari, mudik lebaran dan mengajaknya untuk bekerja di Jakarta seperti dirinya, ia langsung menyambut dengan antusias. Orang tuanya pun tidak melarang, sebab Ati hanya membantu sedikit di sawah dan ladang, selebihnya justru merisaukan karena hanya duduk-duduk di rumah dan tidak juga mau diijodohkan.

2. *Sebagai PRT Lebih Sesuai*

Lain Ati lain pula Heni (22 tahun), gadis berwajah lumayan manis dan berkulit kuning asal Palembang, Sumatera Selatan. Heni memilih menjadi PRT justru karena ia telah mencoba beberapa pekerjaan, dan menurutnya pekerjaan PRT lebih baik ketimbang menjadi pelayan toko, bekerja di pabrik, atau di perkebunan. Akan lebih menguntungkan kalau ia mendapat majikan yang baik. Jika kebetulan ia mendapat majikan yang suka mengomel dan marah-marah, maka itu sudah nasibnya. Menurut Heni, pekerjaan PRT walaupun mendapat gaji kecil dan tidak dapat mejeng, tetapi gajinya netto, gaji bersih, tanpa memikirkan harus mengeluarkan biaya makan dan sewa rumah. Bahkan sesekali ia juga mendapat bonus baju atau tip dari majikan. Oleh karena itu keputusan Heni bulat, menjadi PRT sebelum suatu saat ia akan dilamar orang.

3. *Karena Dibutuhkan Majikan*

Bude Sri (59 tahun) semula ia hanya menyiapkan makanan atau katering bagi rekan-rekan suaminya sesama tukang dan buruh yang membangun perumahan sebuah developer di Pekanbaru. Kemudian, karena kebetulan suatu saat majikannya tidak memiliki pembantu, Bude Sri diminta untuk membantu memasak. Sampai sekarang ia tetap berprofesi sebagai juru masak di rumah majikannya. Keahliannya yang lain adalah mengurus dan melulur orang. Dua keahlian ini membuat ia bertahan hidup sampai sekarang, bahkan tetap dipertahankan majikannya. Keahliannya memasak dan pengetahuannya tentang jenis masakan apa yang disukai dan tidak disukai majikannya tanpa harus diingatkan lagi, membuatnya tetap dibutuhkan majikan, membuat majikan percaya sepenuhnya kepadanya untuk menyiapkan makanan di meja makan. Paling-paling Bude Sri cukup diingatkan tentang menu yang sering berubah sesuai selera majikan putri dan anaknya.

Keahliannya mengurus membuat majikannya begitu tergantung kepadanya, karena majikan perempuannya sering merasa pegal dan Bude Sri bisa mengatasinya. Sering ia setelah selesai memasak tidak dapat langsung pulang karena harus mengurus majikan putri. Disitulah majikan putri suka berkeluh kesah tentang apa saja yang ingin dikeluhkannya kepada Bude Sri, ia tempat curhat. Intinya majikannya lah yang membutuhkannya karena ia tidak tergantikan karena keahliannya memasak dan mengurus, serta kesetiannya mendengar keluhan.

Bude Sri mengakui, bahwa gaji yang diperolehnya dari pekerjaan PRT tidak cukup untuk keperluan sehari-hari oleh karena itu ia harus membuka praktek urut. Sekalipun Bude Sri bekerja sebagai PRT karena dibutuhkan majikan, bukan berarti ia bisa mengajukan berapa gaji yang diinginkannya. Boleh saja ketergantungan majikan begitu tinggi dan kuat kepadanya, tetapi itu bukan jaminan membuat hak dan nasib Bude Sri berbeda dengan para PRT lainnya.

4. *Sekedar Pengalaman Kerja, Sebagai Batu Loncatan*

Ita (18 tahun) menjadi PRT karena ajakan kakaknya

Henri. Dia tidak sempat memikirkan pilihan atau melakukan perbandingan tentang pekerjaan yang bisa dilakukan, seperti yang dialami kakaknya. Pekerjaan PRT adalah profesi awal yang digelutinya kurang lebih 10 bulan ini. Bekerja tanpa sempat memilih, kemudahan, wajah manis, dan lonjakan hasrat ABG, membuatnya kadang-kadang berpikir bahwa masih ada pekerjaan lain yang bisa digelutinya, seperti menjadi sales counter di mall atau di toko. Itu tidak ingin berlama-lama menjadi PRT. Dia ia ingin mencoba pekerjaan lain, seperti di mal, karena ia paling tidak suka dengan anak majikan yang super nakal dan payah diatur.

5. Hanya pekerjaan PRT yang bisa dilakukan

Ana (32 tahun) lain lagi, janda tanpa anak ini memiliki masalah keterbelakangan mental. Ia dapat bekerja dengan baik, namun tidak mungkin diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus semua urusan rumah tangga. Ana yang berasal dari Pasaman Sumbar ini mengaku menjadi PRT karena orang seperti dirinya tidak akan diterima dimana-mana kecuali sebagai PRT. Agaknya Ana sadar betul akan keterbelakangan mental yang dialaminya, sekalipun itu tidak terlalu parah dan tidak mempengaruhi aktivitasnya dalam bekerja. Orang akan merasakan ia berbeda ketika diajak berkomunikasi. Kadang-kadang ia mengambil reaksi yang berbeda terhadap ucapan lawan bicara. Ucapannya sering berbeda dari yang diharapkan. Ia bisa tertawa untuk pembicaraan sedih, atau ia tiba-tiba murung dan berbicara masalah yang berbeda dengan topik yang dibahas saat itu. Satu hal yang agaknya selama ini ditekankan majikannya kepada Ana adalah bahwa ia bukanlah PRT seperti yang lainnya. Ana telah menjadi bagian dari keluarga sejak majikan mengambil keputusan untuk mengajaknya tinggal di rumah mereka sampai sekarang ini. Ana menjadi PRT di rumah majikannya sekarang merupakan bentuk balas jasa atas kebaikan majikannya yang telah menyelamatkannya dari ketelantaran. Sebelumnya, Ana adalah TKW migrant ilegal yang pulang dengan penderitaan. Kemudian majikannya mengajaknya tinggal di rumah mereka. Mulailah Ana menjadi PRT tanpa gaji.

## C. MAJIKAN VERSUS PRT

### 1. *Majikan Suka Mengomel dan Marah*

Bekerja dengan Ana yang agak lamban memerlukan kesabaran tersendiri. Kondisinya yang agak sulit berkomunikasi membuat siapapun perlu menahan diri untuk tidak perlu banyak bicara dengannya, apalagi marah-marah. Namun, ini yang sering dilakukan oleh majikannya terutama majikan perempuan. Ana sangat sadar kalau ia dimarahi, namun ia terkadang tidak dapat segera menyadari sumber penyulut kemarahan majikannya. Sehingga omelan dan kemarahan itu menjadi bagian dari rutinitasnya di rumah majikannya, seorang wiraswasta dan suami istri sekampung dengan Ana dari Pasaman.

Banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan tiap hari seperti mencuci, menggosok, beres-beres rumah dan mengurus anak bungsu majikan, membuatnya cepat merasa lelah. Apalagi penghuni rumah di kompleks Wadya Graha I ini berjumlah 7 orang, Ana mengaku cukup kerepotan. Ketika ditanyakan pendapatnya tentang pekerjaan yang paling disukainya, ia dengan lambat menjawab, *“suka atau tidak suka, ya harus dikerjakan, Kak. Tapi aku paling tidak suka mengurus anak bapak itu, si Naldo itu payah.”*

Begitu banyaknya pekerjaan dan orang di dalam rumah itu membuat Ana mengaku sering letih. Apalagi di rumah yang luas dan dihuni keluarga dengan banyak anak itu tidak mengenal kompromi pekerjaan yang tidak selesai. Ana punya kewajiban menyelesaikan pekerjaan per hari, tidak boleh menumpuk untuk dikerjakan pada hari berikutnya. Majikannya akan kembali marah kalau ia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Pernah juga ia memecahkan sebuah piring keramik yang baru dibeli majikannya, sekalipun pas kejadian tidak ada orang di rumah yang menyaksikannya, tetap saja Ana melaporkan kesialannya itu. Ketika ditanyakan mengapa perlu melapor, Ana menjawab, *“nanti juga Ibu tahu dan pasti akan marah. (lapor tidak lapor) sama saja.”*

### 2. *Wajah Cemberut Kalau Pekerjaan Tidak Selesai*

Ita punya pekerjaan wajib mencuci dan menggosok serta beres-beres rumah. Rata-rata semua pekerjaan itu bisa

dilakukannya dengan baik. Ia tidak diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus keperluan rumah tangga, kecuali mencuci, menyetraka dan membersihkan rumah. Kadang-kadang majikanIta memintanya untuk membeli sayur atau minyak ke warung dekat rumah, namun ia tidak pernah diminta berbelanja untuk kebutuhan penuh sehari.

Ita menganggap masalah justru pada pekerjaan membersihkan rumah. Rasanya tidak ada putus-putusnya sebab begitu dibersihkan dan dirapikan, anak majikannya mulai lagi menyerakkan mainan dan apa saja yang ingin diserakkan. Terkadang ia ingin hanya memegang sapu pada pagi dan sore hari saja, tetapi jika itu dilakukannya maka majikan perempuannya akan memasang muka cemberut dan mendiampkannya. Pekerjaannya memang sebenarnya tidak banyak, dan ia punya waktu istirahat asal saja pekerjaan mencuci dan menyetrakanya selesai. Masalahnya adalah tidak akan nyamantidur selagi anak majikan terutama yang bungsu belum tidur juga, sebab ada pekerjaan yang belum selesai, yaitu merapikan bekas mainan yang berserakan. Belum selesai pekerjaan berarti wajah cemberut majikan. Karena itu ketika ditanyakan pekerjaan apa yang tidak disukainya adalah mengurus anak majikan yang berjumlah 2 orang, laki-laki dan perempuan. Yang sulung perempuan kelas satu SD dan seorang laki-laki lagi belum bersekolah.

### 3. *Jadi Sasaran Kemarahan*

Siapa bilang dalam keluarga kaya penuh tawa dan canda, penuhkeceriahan dan kesenangan? Bude Sri adalah saksi yang sering menyaksikan pertengkaran demi pertengkaran di keluarga kaya tempat ia bekerja. Wanita tua ini begitu akrab dengan suasana kemarahan dan permusuhan antar majikan laki-laki dan majikan perempuan, atau antara majikan laki-laki dengan menantu dan atau dengan anaknya, atau antara majikan dengan karyawandi perusahaannya. Sekalipun ia bekerja paruh waktu, dari jam 08.00- 17.00, terkadang jam-jam tersebut tidak bebas dari suasana perang keluarga tersebut.

Dalam suasana seperti itu, terkadang apa yang telah dimasak dan disiapkannya ikut menjadi pengobar kemarahan, sehingga Bude Sri tersembur kemarahan. Biasanya mereka

memuji masakan yang dihidangkannya, namun kalau terjadi kemelut dan disharmoni, tidak jarang tiba-tiba masakannya diteriaki hambar atau gorengnya terlalu garing atau nasinya kelembekan. Itu belum seberapa, terkadang ia menjadi bola pingpong dipanggil majikan laki-laki, kemudian diteriaki majikan perempuan, atau dibentak anak majikan. Bude yang tingginya tidak kurang 135 cm ini serasa ingin membelah diri menjadi dua, satu untuk masing-masing kutub yang bertikai.

Bude Sri tidak sendiri di rumah itu, ada juga pembantu lainnya yang terbilang lebih muda darinya. Pembantu itu bertugas mencuci, menyetrika dan beres-beres rumah. Anehnya pembantu itu, jarang mengalami nasib seperti dirinya. Mungkin karena badan pembantu ini cukup besar, jadi tidak mudah untuk dijadikan tempat pelampiasan kemarahan majikan. Berbeda dengan Bude Sri yang kecil seolah-olah sasaran empuk yang tidak berdaya.

#### 4. *Majikan Terbaik*

Dihitung-hitung, selama wawancara berlangsung, ada 7 kali Ati memuji majikannya, laki-laki dan perempuan, dengan kata sangat baik. Ia membandingkan majikannya yang sekarang dengan majikannya dulu ketika untuk pertama kalinya ia bekerja sebagai PRT di Jakarta. Dulu, ia mengibaratkan dirinya dalam penjara dan majikannya sipir. Sebab majikannya tidak pernah mengizinkannya keluar rumah, atau bahkan untuk menerima telepon dari ibunya di kampungnya di Lampung Selatan. Setiap telepon dari orang tuanya berdering, majikan perempuannya selalu menyatakan salah sambung. Pekerjaannya begitu banyak, gajinya kecil, makanannya aneh dan tidak bisa ia makan tanpa syak. Ita mengaku masak untuk dirinya sendiri, karena majikannya sering memasak babi.

Keberuntungan kemudian menghampiri Ati, tidak lama setelah ia nekad melarikan diri dari majikan Tionghoanya. Ia sempat bekerja selama kurang lebih delapan bulan di Batam sebagai pelayan toko. Kemudian ia berhenti bekerja, dan tinggal di tempat majikannya sekarang, seorang karyawan PT CPI, suami-istri. Tugasnya hanya mengurus putra semata wayang majikannya. Sejak bayi berumur 3 bulan ia mengasuh



anak majikannya hingga sekarang telah berumur 3 tahun lebih. Ia merasa begitu dekat dengan anak tersebut sebagaimana anak tersebut tidak mau kehilangan dia barang sekejap pun.

Untuk mengurus rumah, seperti bersih-bersih, mencuci dan menggosok serta memasak, majikannya mempekerjakan pembantu yang jauh lebih tua dari dirinya. Pembantu itu tetangga yang rumahnya tidak jauh dari komplek, berasal dari salah satu daerah di Sumatera Barat. Pembantu itu datang pagi pulang sore. Praktis Atilah yang bekerja di malam hari, disamping mengurus anak majikan. Namun Ati mengaku tidak banyak pekerjaan yang dilakukannya, sebab kedua majikannya \_ Ati memanggil mereka dengan bapak dan ibu \_ cukup pendiam, tidak suka memerintah dan sering mengerjakan sendiri apa yang diinginkan. *"Bapak kadang buat mie sendiri, nggak mau nyuruh saya atau ibu. Kalau Ibu malah sering praktek masak kalau hari libur, kami tinggal bantu-bantu aja."*

#### 5. Majikan "Pasrah"

Heni mengaku semua urusan rumah tangga menjadi tanggung jawabnya. Mulai dari mencuci, menyetrika, beres-beres rumah, memasak dan mengurus dua orang anak majikannya. Memang di rumah Jl. Perhutut No 11 Pekanbaru itu ada pembantu lain, yaitu Nita, namun Heni mengaku pengaturan dan pengelolaan rumah tangga bahkan mengurus anak semua menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, ia mengaku sering lelah karena semua pekerjaan itu menjadi tanggung jawabnya. Rupanya majikannya tidak membuat pengaturan dan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab sekalipun PRT yang dipekerjakannya dua orang.

Mungkin karena begitu besar tanggung jawab yang mereka timpakan kepada Heni, majikannya umumnya tidak terlalu peduli dengan hasil pekerjaan Heni. Kesibukan suami istri bekerja sebagai karyawan sebuah bank swasta nasional membuat mereka tidak terlalu mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat Heni. Nita justru yang sering ditegur majikan perempuan. Bahkan untuk urusan Nita pun diserahkan kepada Heni. Seolah-olah Nita dipekerjaan untuk membantu Heni.

Bagi Heni, tanggung jawab yang besar tersebut tidak terlalu menjadi beban sebab ada kebebasan yang diberikan

majikannya dalam mengatur urusan rumah tangga. Tinggal Heni pandai-pandai mengatur sendiri semua urusan itu, pandai-pandai membagi waktu sehingga memiliki waktu untuk beristirahat dan pandai memenej Nita agar mau bekerja sama membantunya. Hal ini mungkin menyebabkan Heni tidak mengeluh dengan pekerjaannya sekalipun ia mengaku sering lelah. Biasanya bentuk pengertian dari majikan Heni ialah ia boleh istirahat penuh di hari minggu, boleh jalan-jalan ke Matahari atau Ramayana. Heni pun boleh pulang kampung ke Palembang, namun biasanya bersama-sama majikannya yang juga asli Palembang.

#### **D. DILEMA RELASIMAJIKAN - PRT: ANTARA BUTUH DAN KESAL**

Semula dengan mengeksplorasi kasus beberapa orang PRT yang dapat secara terbuka dan mudah kami hadapi, akan dapat mengungkapkan bentuk-bentuk lain dan alasan variatif terjadinya KDRT. Kenyataannya, ketika harus melewati tahap diskusi dengan sesama peneliti muda yang rata-rata memiliki pembantu, dan beberapa pihak dijadikan informan pendukung, seperti rekan sesama peneliti, atau tokoh masyarakat yang mempekerjakan PRT, nampaknya fenomena KDRT justru menarik jika dikaji dari aspek pengguna, atau majikan.

Secara garis besar, juga dapat disimpulkan pihak terakhir ini justru mengalami berbagai ketidaknyamanan dan ketidakberdayaan (baca kekerasan) dalam bentuk lain, berbagai bentuk kekerasan emosional atau psikis seperti tekanan perasaan, disamping memang tak dapat dipungkiri mereka mendapat keuntungan dari keberadaan PRT. Keluhan seperti:

*"tante saya tidak berani secara langsung memarahinya, kalau ingin menegurnya, ia menyuruh kami, sampai pembantu menganggap kami lah yang macam-macam hendak menyerangnya."*

*"Dia tidak bangun sebelum saya bangun, sekalipun ia duluan bangun, tapi ia memilih tidur-tiduran sampai kami keluar kamar. Bahkan gara-gara suami membela dia, saya pernah bertengkar dengan suami di depan dia." "Dia sebenarnya baik, hanya karena suka telpon-telpon dengan preman itu, saya jadi khawatir mana tahu preman itu punya niat tidak baik dengannya. Anak gadis orang lho, tetap aja menjadi tanggung jawab kita, bisa-bisa kita disalahkan orang tuanya. Aduuh,*

*apalagi mikir kalau-kalau preman itu ke rumah pas kita tidak ada."*

*"Aku sebel dengan pembantuku, masa anakku dikasih aja ke orang dibawa berkeliling naik motor. Kami panik mencarinya. Sambil nangis aku marahi dia." "Enak saja dia berbaring terlentang nonton TV, pakai celana pendek lagi, nampak sumpalnya, langsung aja besoknya diusir."*

*"Makanan harus disimpan, kalau tidak ia yang habiskan tanpa memikirkan anak-anakku"*

*"Cari pembantu sekarang payah, kalau tidak hati-hati, bikin susah aja. Baru sebulan sudah minta pulang, bekerja nggak bisa, capek ngasih tahu." "Anaknya baik, bersih dan tidak perlu lagi disuruh-suruh. Pandai pula ia dengan anak-anak. Tapi suka telpon-telpon itu bikin pening." "Memakai pembantu sekarang malah bikin masalah. Kalau tidak hati-hati, ia mencuri bahkan menggaet suami orang."*

Demikian diantara keluhan mereka yang memakai jasa pembantu. Memang tidak mungkin mengharapkan semua yang diinginkan majikan dapat diwujudkan atau dikerjakan oleh seorang PRT. Istilah pembantu saja sudah menunjukkan bahwa mereka bekerja hanya untuk membantu pekerjaan majikan yang tidak dapat ditangani atau diselesaikan sendiri oleh majikan. Kebanyakan pembantu memahami posisi ini sehingga mereka tidak bekerja selama tidak diperintah atau dibutuhkan oleh majikan, suatu keadaan yang bisa diterjemahkan oleh majikan sebagai pemalas dan tidak punya inisiatif.

Relasi yang timpang antara majikan dan pembantu tidak hanya dapat dilihat dengan terjadinya mala komunikasi dan persepsi keliru tentang pekerjaan dan tanggung jawab tersebut. Masih banyak hal lain yang dapat memicu konflik kedua pihak yang sebenarnya sama-sama membutuhkan tersebut. Diharapkan mereka dapat menciptakan hubungan simbiose mutualisme, namun yang terjadi adalah pemecatan karena anggapan tidak becus atau melarikan diri karena tidak suka kepada majikan.

Dari pernyataan beberapa pengguna jasa PRT di atas dapat dicermati bahwa menggunakan jasa PRT bukan berarti menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka yang bekerja di sektor publik atau bagi keluarga yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya tanpa bantuan or-

ang lain. Ternyata, para pengguna merasakan ketidaknyamanan karena berbagai perilaku PRT seperti etika, kebiasaan buruk suka menelpon, menghabiskan makanan, sikap menggoda, atau tidak bisa bekerja, dan lain-lain.

Selalu dijumpai para pengguna mengalami ketidaknyamanan karena ulah PRT yang dimilikinya. Namun sekalipun para majikan mengeluh, tapi relasi yang tercipta tetap saja timpang. Mereka tetap majikan, orang yang harus diterima semua pendapat dan pikirannya oleh pembantunya. Jika tidak, maka akan timbul ketidaknyamanan bagi majikan dan segera menuding penyebabnya PRT yang tidak benar, payah dan tidak becus.

Seperti apa yang dialami oleh informan, setelah tamat SD atau SMP, mereka bekerja menjadi PRT dengan pertimbangan pekerjaan itu yang paling mudah dilakukan dan mereka telah memiliki modal bisa memegang sapu, memasak air atau nasi, mencuci dan menyetrika.

Pendidikan formal SD atau SMP sendiri tidak mengajarkannya bagaimana mengoperasikan mesin cuci, setrika yang baik, mengatur suhu ruangan ber-AC, penghematan listrik, menyalahkan kompor gas, mengoperasikan vacuum cleaner, memasak di oven, bagaimana merawat manik-manik, barang keramik, kristal, kain sutra dan lain-lain. Mereka juga umumnya tidak tahu bahwa tidak boleh membangunkan majikan yang sedang tidur sekalipun jam istirahat telah lewat atau karena ada telpon, atau membukakan pintu kepada setiap orang yang mengetuk pintu. Sekalipun mungkin di kampung PRT, orang tidak perlu mengetuk pintu karena sudah terbuka lebar-lebar siap menerima tamu.

Apalagi ketika berhadapan dengan anak-anak majikan yang rewel, seringkali seorang pembantu bingung dan canggung. Seperti yang dialami Ita, ia tidak suka dengan salah satu pekerjaannya yaitu mengurus anak majikan karena yang terakhir ini kalau sampai menangis, maka Ita akan tertekan dengan tuduhan melalui sorotan mata majikan perempuannya. Ketidaksukaan kepada anak-anak majikan juga karena anak-anak tidak mau berkompromi dengan Ita dalam untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah yang juga menjadi tugas Ita.

Dalam kasus yang sama, hal yang berbeda dialami Ati. Ia begitu sayang dengan anak majikannya. Selama wawancara,

selain memuji majikan suami-istri, ia memuji anak majikannya sebagai anak yang baik dan menggemaskan. Volume suara Ati yang distel keras setiap kali berbicara agaknya tidak membuat majikannya atau anak asuhannya ketakutan, sekalipun menurut Ati majikannya pendiam. Agaknya sikap Ati yang begitu sayang dengan anak mereka, ditambah Ati belum pernah menyalahi kepercayaan yang mereka berikan membuat mereka tidak terlalu mempersoalkan kebiasaan Ati bersuara dengan volume (bukan nada) agak keras. Volume keras tidak berarti apa-apa dibandingkan sikap Ati yang penyayang kepada anak mereka.

Karena anggapan bahwa PRT dibeli jasa atau tenaganya, banyak majikan menganggap mengerjakan PRT tanpa mempertimbangkan kondisi dan waktunya sah-sah saja. Begitu pun ketika terjadi kesalahan akibat ketidaktahuan pembantu atau keteledoran PRT, mendidik dan mengajarkan bukanlah pilihan yang ditempuh. Kemarahan dan perasaan tidak dihargai dan dilecehkan pembantulah yang muncul. Karena mereka dibayar, sehingga persepsi majikan memperkuat sikap dan tindakan untuk menghukum PRT dan memberi mereka label negatif.

Satu hal yang terlewatkan adalah bahwa PRT umumnya berpendidikan lebih rendah dibandingkan majikan. Belum lagi mereka yang begitu mudah dan tidak berpengalaman bekerja sebelumnya. Sehingga masalah pekerjaan, maupun etika yang dianut oleh majikan serta peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam rumah majikan (yang berbeda status karena jenjang pendidikan dan ekonomi) tidaklah dipahami PRT. Mereka tuna dalam banyak hal, oleh karena itu melakukan banyak kesalahan.

Relasi PRT-majikan bisa beragam bentuk. Misalnya dalam perlakuan, banyak majikan yang mengaku PRT-nya telah dianggap sebagai anggota keluarga. Oleh karena anggota keluarga, maka mereka diperlakukan sama seperti anggota keluarga yang lain. Masalahnya ketika kepada anggota keluarga, anggap saja adik, yang menumpang, anak-anak, suami, istri, kita biasa melakukan hal-hal tanpa pertimbangan, maka sikap kepada PRT yang telah dianggap anggota keluarga pun menjadi sama. Untuk itu, di kalangan aktivis penggunaan kata-kata “dianggap sebagai keluarga” kadang dipandang sebagai pelecehan hak PRT.

Namun dalam hal ini kita kan melihat bagaimana hubungan

PRT-majikan yang terjadi dalam rumah tangga sehari-hari. Semua mengaku makan kapan terasa lapar, sebelum atau sesudah majikan makan. Mereka dapat makan bersama, seperti Heni atau Ati, atau makan sendiri-sendiri seperti Ita, Ana, dan Bude Sri. Mereka makan dengan makanan yang sama dengan majikan. Mereka juga memanfaatkan kamar mandi yang sama dengan anggota keluarga yang lain. Kecuali untuk kamar ibu dan bapak majikan yang umumnya memiliki kamar mandi sendiri.

Dapat disimpulkan tidak ada perlakuan berbeda, dalam hal kebiasaan aktivitas sehari-hari. PRT dapat menikmati fasilitas atau sarana yang ada di rumah majikan, disamping harus bertanggung jawab menjaga barang-barang majikannya.

#### **E. PROBLEM PRT SEBAGAI PEKERJA SEKTOR INFORMAL**

Pekerjaan sebagai PRT memang penuh dengan risiko, sebab pekerjaan ini berada di sektor informal. Selama pihak pengelola tidak mendaftarkan PRT yang ditanganinya ke disnaker, maka mereka sulit mendapat pendampingan dari pihak pemerintah. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Abdul Rahim, jabatan Kasi Balai latihan Kerja pada hari Jum'at 29 Oktober 2004, umumnya pihak penyalur tidak mendaftarkan yayasannya ke disnaker. Sampai pada hari itu hanya 3 pengelola jasa PRT yang mengajukan perbaharuan surat izin ke disnaker. Mereka umumnya minta pelatihan manajemen pengelolaan jasa penyalur PRT atau baby sitter. Dalam pelatihan biasanya pihak disnaker menyarankan kepada pengelola untuk memperhatikan kontrak kerja untuk menyelamatkan hak-hak PRT.

Praktis dapat dikatakan pihak disnaker tidak memiliki data tentang berapa jumlah PRT di Pekanbaru dan bagaimana sebarannya. Kalau sudah begini, maka nasib PRT hanya tergantung kepada pengguna. Apalagi jika pihak pengelola tidak membuat kontrak kerja sebelumnya dengan pengguna, maka memang hak-hak PRT sulit untuk diperjuangkan.

Namun bagaimanapun susahnya PRT, masih cukup banyak pihak pengguna yang berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Hal ini boleh jadi karena tidak ada aturan yang melindungi PRT sehingga para majikan bisa berbuat seenaknya. Mungkin juga karena

tidak ada ikatan apa-apa sehingga seorang PRT dapat berbuat tindak kriminal kepada majikannya.

Adanya UUPKDR sendiri bukannya dapat menyelesaikan persoalan PRT dan kekerasan yang melingkupinya. Sebab UU ini jarang menyinggung korban PRT, sebagian besar perhatian agaknya diberikan kepada pengguna rumah tangga seperti istri dan perhatian kepada anak dengan porsi yang sedikit lebih kecil. PRT sekalipun ada dalam definisi tapi agak luput dari pembahasan. Padahal faktanya, begitu banyak kekerasan domestik yang dilansir media dialami oleh sejumlah PRT baik status TKI maupun buruh dalam negeri. Ada PRT yang disiksa seperti Nirmala Bonat, ada PRT yang terpaksa membunuh majikan karena tidak tahan penganiayaan sehingga yang bersangkutan terancam hukuman mati. Namun pada perkembangan di peradilan, PRT tersebut divonis hukuman seumur hidup. Tahun lalu kasus Sari masih terlintas di benak, bagaimana PRT ini berusaha terjun dari lantai dua rumah majikannya untuk melarikan diri. Tubuhnya yang tinggal kulit membalut tulang begitu mengenaskan bagi siapapun yang melihatnya. Kasus lainnya adalah majikan, bibi dan ponakan, tega membantai PRT-nya dan dikuburkan di halaman rumah mereka.

Mengapa PRT rawan sasaran tindak kekerasan dalam rumah tangga? Dalam perspektif gender dan isu perempuan mungkin jawabannya diantaranya karena PRT tersebut umumnya perempuan yang mengalami subordinasi dan marginalisasi. PRT memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi kepada majikannya. Karena itu majikan merasa punya hak untuk memberikan pelajaran-pelajaran atas ketelodoran PRT dengan cara penelantaran atau bentuk kekerasan lainnya.

PRT karena tergantung secara ekonomi terhadap majikan akan menahan diri atas segala siksaan, sehingga kemungkinan ia mengalami siklus kekerasan dimana pada puncaknya ia menjadi semakin imun dan imun. Imunnya seorang PRT sebagai korban dari kekerasan majikan, akan membuatnya tampak semakin bandel, keras kepala, dan tidak mau mendengar nasehat majikan. PRT terlihat seperti membangkang, padahal proses imun telah terjadi pada dirinya.

Sebagian memang ada yang tidak tahan dan memilih untuk berhenti bekerja atau ada yang minggat bahkan dengan melupakan gajinya, seperti yang dilakukan Ati. Dia memang tidak dipukul oleh

majikannya, tetapi ia terlalu sering diomeli, majikannya gemar mengomel. Sehingga ia mengalami kekerasan psikis, bukan fisik. Akan tetapi dampaknya cukup kuat mendorong Ati untuk lari dari rumah majikannya tanpa membawa baju dan barang-barang pribadinya termasuk upahnya.

### **HAK-HAK PRT**

Kasus relasi majikan-pembantu memang beragam. Yang jelas kekerasan yang terjadi antara majikan dan PRT itu disebabkan relasi yang timpang antara majikan dan PRT. Memang relasi yang baik antara majikan dan PRT dimana mereka dapat menjalin keharmonisan dalam relasi tersebut juga ada. Hal itu tercipta jika masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban masing-masing, sehingga otomatis hak-hak masing-masing akan terpenuhi. Berikut ini apa saja hak-hak PRT yang mestinya dapat dimilikinya.

#### **1. Upah**

Bude Sri menerima gaji Rp. 300.000 setiap bulan tanpa potongan, sekalipun ia pernah izin tidak bekerja beberapa waktu. Ia juga mendapat uang transport dari majikan laki-laki Rp. 100.000 tiap bulan sehingga total ia menerima gaji Rp. 400.000. Gaji tersebut ia manfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Itu saja tak cukup menghidupi ia dan suaminya dan anak-anaknya yang kerap berkunjung. Sejak suaminya semakin rabun, suaminya lebih sering tidak bekerja seperti dulu. Praktis Bude Srilah yang bertanggungjawab mencari nafkah bagi keluarga. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, Bude Sri selalu menerima pasien urut dan lulur di rumahnya.

Namun dalam pertemuan berikutnya, tanggal 27 November 2004, Bude Sri bercerita bahwa rumah couple yang sekarang ditempatinya berasal dari gajinya sebagai pembantu yang ditabungnya. Terkumpul sekitar 45 juta dan digunakan untuk membeli material. Degan nilai uang sejumlah itu, jadilah rumah couple minus tukang, karena suami dan anaknya yang mengerjakannya.

Sebenarnya ia pergi pulang bekerja naik becak Rp. 3.000, sehingga sebulan menghabiskan biaya Rp. 150.000,- Terkadang ia diberi tip oleh majikan laki-laki. Bude Sri tidak mendapat tunjangan lain, namun gajinya juga tidak dipotong.



Ati mendapat gaji Rp.1.000.000 dimana uang tersebut tidak pernah langsung ia terima melainkan ditransfer majikannya ke rekeningnya. Ati tinggal mengeceknya melalui ATM. Untuk keperluan sehari-hari ia tinggal menyebutkan di awal bulan, seperti sabun, pasta gigi, bedak dan lain-lain. Ia juga menerima tip sekitar Rp. 70.000 per bulan di luar gaji yang masuk ATM, sehingga praktis ia tidak pernah mengambil uangnya di bank. Belum lagi Ati sering mendapat sepotong baju baru kalau majikan perempuannya membeli baju.

Ada kesan tidak percaya dengan Ita bahwa ia menerima gaji per bulan yang bilangannya begitu besar untuk seorang pembantu. Tapi dari apa yang disampaikan selama wawancara, terdapat kesan bahwa Ati dibutuhkan oleh majikannya lebih dari segalanya, karena anak mereka. Ati adalah baby sitter \_sekalipun ia tidak mendapat pendidikan khusus untuk itu\_ dimana sang anak begitu tergantung kepadanya. Ati tidur dengan anak majikannya, dan bertanggung jawab tentang segala kebutuhan si anak. Dengan usia 3 tahun di bulan Januari tahun depan, anak majikannya memiliki berat 10 kg. Berat itu akan turun, kalau Ati pergi untuk beberapa hari, balik kampung misalnya. Bagi majikannya, Dani, gaji sebanyak itu seimbang dengan apa yang telah dilakukan Ati bagi anak mereka.

Nasib Ati dalam hal upah memang beruntung. Selain mendapat upah bersih tanpa potongan, mendapat fasilitas kebutuhan harian, juga jika ia pulang ke kampungnya di Lampung, transportnya diberikan. Biasanya majikannya langsung memberikan tiket pulang pergi pesawat ke Jakarta. Sambil bercerita, Ati mengeluh mengaku sedih dengan rekannya sesama PRT yang tinggal bersebelahan di komplek. "Boleh pulang, tapi biayanya tanggung sendiri," katanya. Karena itu, Ati yang memakai jilbab ini sering mengucapkan alhamdulillah. Tampak memang ia bersyukur dapat pekerjaan seperti yang dilakukannya sekarang. Bahkan ia mengatakan ia tidak berlama-lama di kampungnya, ia harus pulang segera ke Pekanbaru karena anak majikan bisa kurus kalau ia tinggalkan, apalagi dalam waktu yang lama.

Ita menerima gaji Rp. 150.000 untuk pekerjaan mencuci, menggosok dan bersih-bersih rumah yang menjadi tugasnya. Pekerjaannya pun dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu

lama. Pagi-pagi jam 07.00 dia mencuci dengan mesin cuci. Hanya beberapa baju tertentu yang dicuci tangan karena dikhawatirkan rusak. Setelah kering kira-kira jam 12.00 ia menyetrika. Jam 14.00 biasanya ia sudah dapat beristirahat dengan tenang karena pekerjaannya telah selesai. Menggosok sebenarnya enak karena bisa dilakukan sambil nonton TV. Sehingga pekerjaannya cukup ringan dan rileks. Hanya saja satu pekerjaan yang membuatnya jengkel adalah beres-beres rumah. Hal ini terkait dengan kenakalan anak majikan yang gemar bermain dan menyerakkan mainan di dalam rumah. Ita mengaku pernah juga mendapat tip, yaitu dari majikan perempuan, “untuk beli bedak” katanya.

Heni menerima gaji Rp. 300.000 per bulan tanpa potongan. Menurut pengakuannya, Heni menabung gajinya pada majikan, sebab untuk keperluan sehari-hari seperti makan, peralatan mandi dan kebersihan, serta bedak dan lain-lain yang kecil-kecil telah dipenuhi atau ditanggung majikannya. Ia memang tidak mendapat bonus atau tip dalam bentuk uang, tetapi kadang-kadang ia dibelikan baju. Oleh karena itu, sekalipun tidak mendapat uang lembur atau tip dalam bentuk uang tunai, semua itu tidaklah mengecilkan hati Heni. Gajinya merupakan tabungan baginya dan saat ini ia tidak berpikir untuk segera menggunakannya.

Nasib Ana agaknya cukup memiriskan dibandingkan informan lainnya. Ia tidak digaji, ia tinggal di rumah majikan semata numpang hidup untuk itu ia bekerja layaknya pembantu. Kecuali kebutuhan kecil lainnya seperti peralatan mandi, atau bedak diberikan majikan. Ia tidak mendapat bonus atau tip atau tunjangan dalam bentuk apapun, seperti yang diterima Ati, Heni, atau Bude Sri. Apa yang ada dalam pikiran majikan tentang sikap mereka kepada Ana adalah karena mereka telah menyelamatkan Ana dari keadaan terlantar. Oleh karena itu, menurut hemat mereka tanpa digaji pun Ana akan mau bekerja dengan mereka karena telah diselamatkan.

## 2. *Fasilitas kamar*

Bude Sri tidak punya kamar sendiri di rumah majikannya, sebab ia datang pagi pulang petang. Ati punya kamar sendiri, namun hari-harinya ia lebih banyak di kamar anak majikannya. Sebab ia tidur dengan anak majikannya. Heni memiliki kamar sendiri ukuran 2x3 meter yang terletak di samping rumah induk. Ukuran kamar ini

paling kecil dibandingkan dengan 3 kamar lainnya di rumah itu. Ia tidak memiliki kamar mandi sendiri, melainkan memanfaatkan kamar mandi yang berhadapan dengan kamarnya, bersama dengan penghuni rumah lainnya. Keperluan seperti peralatan mandi (sabun, pasta gigi, pembalut, shampo disediakan oleh majikan. Begitupun dengan alat-alat kecantikan seperti bedak, lipstik atau parfum rutin ia terima jika persediaannya telah habis.

Ita juga memiliki kamar sendiri, namun ukurannya jauh lebih kecil. Hanya cukup untuk tempat tidur dan satu buah bopet kecil untuk baju dan beberapa perlengkapan di atasnya. Semua kebutuhan peralatan mandi dan kecantikan ia penuhi sendiri dengan gajinya yang kecil. Lain halnya dengan Ana, ia tidak memiliki kamar sendiri. Sehari-hari Ana menempati kamar yang terbilang cukup besar bergabung dengan anak-anak majikannya. Letak kamar tersebut di bagian belakang. Segala kebutuhan Ana seperti sabun, pasta gigi, bedak dan lainnya diberikan oleh majikan. Tentu saja karena Ana memang tidak akan dapat membelinya, ia tidak digaji.

### 3. Kesehatan

Jika Bude Sri sakit maka ia boleh tidak masuk bekerja, hanya saja urusan sakit adalah tanggungjawab sendiri. Bude Sri beruntung karena kalau hanya sakit ringan ia dapat mengatasinya sendiri dan sampai saat ini daya tahan fisiknya cukup kuat, dan ia jarang sakit. Ati mengaku bersyukur karena jarang sakit yang membuat majikannya yang begitu baik hati menjadi repot. Ia jarang sakit karena pekerjaannya tidak terlalu menuntut begitu banyak pikiran dan tenaganya. Ita beruntung tidak mengalami sakit yang berarti yang membuatnya tidak dapat bangkit dari tempat tidur. Sebab sakit ringan pun yang dialaminya, tidaklah membuat majikannya menaruh perhatian. Ia tidak ditawari obat atau diantar ke dokter. Karena itu, Ita berusaha untuk berhati-hati jangan sampai sakit, sebab sakit berarti uangnya akan berkurang.

Lain halnya dengan Heni, karena pekerjaannya yang berat, sebagai “ibu rumah tangga”, maka segala keperluan termasuk kesehatan menjadi tanggungan majikannya. Keluhan sakit kepala, pegal dan lain-lainnya sering ditanggapi serius oleh majikannya, terutama majikan perempuan dengan segera menyuruh pembantu yang lainnya, Nita, ke warung terdekat.

Sama halnya dengan Heni, jika Ana mengalami kelelahan fisik dan sakit, maka majikannya akan membantunya dengan membeli obat atau membawanya ke dokter. Bagaimanapun hal ini memang menjadi tanggung jawab majikannya, karena Ana berbeda dengan PRT lainnya. Ia berbeda karena kondisinya sendiri yang memiliki keterbelakangan mental. Dan Ana menjadi berbeda dengan pembantu lainnya, karena majikannya juga, diantaranya tidak memberinya upah.

#### 4. Pemberdayaan

Semua informan yang diteliti mengaku tidak pernah ditawarkan majikan untuk mendapatkan tambahan ketrampilan dengan mengikuti kursus tertentu. Paling yang terjadi adalah majikan mengajarkan menggunakan peralatan yang ada untuk kali pertama kemudian menyerahkan kepada mereka untuk menggunakan sekaligus merawatnya. Jika terjadi kesalahan dalam penggunaan, maka ada yang mendapat marah seperti Ana, namun ada juga majikan yang tidak ambil pusing, seperti yang dialami Heni. Ia mengaku majikannya tidak pernah meluangkan waktu untuk mengajarkannya tentang apa yang baik dan benar untuk dilakukan, atau sebaliknya. Bagi mereka Heni cukup mampu mengatasi segala persoalan rumah tangga tanpa harus digurui lagi oleh majikan.

Niat Ita semakin kuat untuk tidak menjadikan PRT sebagai suatu pekerjaan di masa-masa mendatang. Ia mengaku majikan tidak pernah mengajarkan banyak hal kepadanya, sama halnya dengan Ana. Bedanya Ita bisa cepat belajar banyak karena kondisi fisik dan mentalnya, sementara mengajarkan Ana perlu waktu dan perhatian khusus karena keterbelakangan mentalnya. Ana tidak merasa perlu belajar. Satu hal yang diinginkannya, majikan perempuannya tidak memarahinya terus.

#### 5. Istirahat dan rekreasi

Heni mengaku memiliki satu hari penuh untuk istirahat maupun rekreasi yang ia inginkan. Ia dapat pergi berbelanja ke mal dan lainnya. Sering Heni ikut rekreasi dengan majikan, karena memang ia telah dianggap menjadi bagian keluarga. Apalagi anak-anak majikannya sudah akrab dengan dirinya. Jika ada ibu kedua bagi anak-anak majikannya, dialah Heni. Heni sendiri seolah-olah merasa pekerjaannya sebagai PRT ibarat sebagai ibu rumah tangga (IRT).

Pengalaman Ana agak berbeda, karena ia memang jarang diajak rekreasi. Ana sendiri tidak suka pergi rekreasi dengan majikannya. Sebab pernah terjadi, ia harus tetap mengasuh anak majikannya selama rekreasi. Jadi ia tidak menikmati kegiatan rekreasi tersebut. Untuk itu, ia lebih senang memilih tinggal di rumah saja, sementara seluruh anggota keluarga yang lain bepergian.

Pengalaman Ati mengikuti keluarga pak Dani memang penuh dengan suka cita. Jika majikannya pergi membawa anak mereka, itu berarti Ati harus ikut. Ati pun jarang ditinggal di rumah sendirian, karena mobil majikan masih cukup lapang untuk dapat membawanya. Apalagi anak majikan lebih senang duduk di belakang bersamanya. Ati memiliki jam kerja mengikuti kebiasaan anak majikannya. Jika anak majikannya masih tidur, maka Ati juga belum punya kewajiban. Pekerjaan dimulai ketika si anak terbangun. Selebihnya, Ati memiliki waktu luang yang banyak. Hanya saja ia memang tidak berani mengambil risiko dengan menyambi pekerjaan mengasuh anak dengan melakukan pekerjaan lain, seperti membaca, mendengar musik atau nonton TV. Khawatir jika terjadi apa-apa dengan si anak, kemungkinan majikan akan kecaewa.

Sementara pengalaman yang agak berbeda dialami oleh Bude Sri. Ia tidak pernah diikuti untuk kegiatan rekreasi atau jalan-jalan yang dilakukan majikannya. Sebab ia punya keluarga dan kegiatan di rumahnya sendiri. Bude Sri memang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan acara keluarga majikan karena ia hanyalah juru masak. Biasanya kalau keluarga majikan bepergian, maka yang diperlukan adalah baby sister, bukan juru masak. Yang terakhir ini dapat diatasi dengan makan di restoran.

Ita lain lagi. Ia tidak suka ikut rombongan keluarga majikan untuk jalan-jalan. Sebagai gadis mudah belia, ia lebih suka jalan-jalan di hari Minggu dengan teman-temannya, biasanya tetangga sesama PRT. Biasanya mereka pergi ke mal. Bagi Ita yang ceria, tentu saja lebih mengasikkan pengalaman berjalan dengan kawan sebaya ketimbang pergi dengan keluarga majikan. Bukankah ia paling tidak tahan berhadapan dengan anak majikannya?

#### 6. Kesempatan beribadah

Semua informan menjadi PRT dari majikan yang seiman, yaitu beragama Islam. Agaknya hal ini cukup membuat mereka

dapat menikmati kebebasan sekaligus kewajiban menjalankan perintah agama, seperti shalat dan puasa. Ati misalnya, ia mengaku bersyukur tinggal dengan majikan yang taat beragama. Majikan laki-laki sering berjama'ah di masjid. Ati yang memakai jilbab ini mengaku tidak pernah mengabaikan shalat karena pekerjaan dan majikannya sangat mendukung ia untuk shalat.

Ana juga mengaku melaksanakan shalat. Masalahnya anak-anak majikannya bandel-bandel dan mereka tinggal di kamar yang sama dengan dirinya. Ia sering merasa tidak nyaman ketika shalat, karena kamarnya ramai.

Bagi Ita, kegiatan shalat merupakan kesempatan untuk melarikan diri dari kejenuhan berhadapan dengan anak-anak majikan. Kamarnya yang begitu sempit membuatnya sering melakukan shalat berjama'ah misalnya Magrib dan Isya di masjid. Kemudian ia mencoba beristirahat di masjid dengan mengulur-ngulur waktu pulang. Bukan pekerjaan yang dihindarinya, karena pekerjaan mencuci dan menggosok biasanya telah selesai di siang hari. Disamping bisa terbebas dari suasana rutinitas rumah majikan, ia juga dapat bertemu dengan kawan-kawannya. Karena itu ia rajin shalat di masjid.

Kalau Heni mengaku tidak punya waktu untuk berlama-lama shalat apalagi harus ke masjid. Kamarnya masih memungkinkan untuk ia gunakan untuk menggelar sajadah. Teman sebayanya jarang ke masjid. Kalaupun ada biasanya beda kelas, mereka bukan pembantu tetapi mahasiswi-mahasiswa. Oleh karena itu, ia lebih senang melakukan shalat di rumah. Ia memiliki kebebasan seberapa lama ia ingin beristirahat termasuk shalat. Semuanya terserah kepadanya untuk mengatur bagaimana urusan pribadinya dengan urusan rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

Apa yang membuat PRT betah diantaranya adalah karena hubungan yang terjadi dalam rumah tangga adalah relasi kemitraan, atau hubungan kerja. Sebagaimana diungkapkan Heni, pekerjaannya yang menggantikan peran ibu rumah tangga bisa menjadi mudah dilaksanakan karena ada kepercayaan dari majikan. Ia dipercaya mengelola semua urusan rumah tangga, untuk itu ia diberi imbalan mendapat perlakuan yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Jika keluarga makan, maka

Heni pun ikut makan bersama-sama dengan makanan yang sama. Jika acara piknik keluarga atau jalan-jalan, Heni wajib ikut sebab anak-anak majikan lebih senang bersama Heni. Dalam tataran ini tidak jarang hubungan kerja yang tercipta adalah hubungan kekeluargaan. Kita sering mendengar para pengguna menyatakan bahwa PRTnya telah dianggap sebagai keluarga. Sekalipun cepat-cepat dikatakan bahwa kata “dianggap” akan berkonotasi negatif menunjukkan bahwa PRT akan selalu dianggap saja, tidak benar-benar menjadi bagian keluarga.

Ita mungkin berbeda, dengan usia yang masih muda, ia memiliki harapan tentang hidupnya, tidak sekedar menjadi PRT. Kerja sebagai PRT menyita banyak waktu, sekalipun ada jam istirahat. Namun pekerjaan mengalir setiap saat. Berbeda misalnya dengan menjadi sales counter di mal. Ia hanya punya tanggung jawab pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu, di dalam benak Ita menganggap pekerjaan sebagai PRT hanyalah sementara menunggu datangnya pekerjaan yang ia inginkan.

#### 7. Jam Kerja

Siapa pun yang melakukan pekerjaan domestik, tidak majikan maupun PRT, biasanya tidak memiliki jam kerja tertentu. Artinya mereka bisa bekerja sepanjang waktu tergantung kepada pekerjaan yang dihadapi. Sebagai ibu rumah tangga, seorang isteri dapat bekerja mengurus rumah tangga sejak subuh hingga malam hari. Oleh karena tidak ada jam kerja dan pekerjaan rumah tangga sering tidak dinilai dengan uang, karena itu pekerjaan ini sering diremehkan. Banyak suami selaku pencari nafkah akan menjadi superior menganggap pekerjaan ranah publik yang menghasilkan uang adalah yang disebut pekerjaan. Dan cukup banyak istri yang menganggap pekerjaan domestik yang tidak dinilai dengan uang adalah pekerjaan pengabdian. Apa yang terbentuk dalam pikiran adalah pekerjaan mencuci, menyapu atau memasak bahkan mengurus anak adalah inheren dengan keberadaan perempuan.

Persepsi seperti ini menjalar ketika mereka mempekerjakan seorang PRT di rumah mereka. Begitu banyak pengguna yang tidak rela mengeluarkan uang begitu besar untuk menggaji PRT yang hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan uang. Sehingga

sebagai kompensasinya mereka menuntut begitu banyak tanggung jawab dan kewajiban kepada PRT. Karena sadar telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pekerjaan yang selama ini ketika ia lakukan sendiri tidak dinilai dengan uang, seorang majikan akan merasa kecewa menemukan pembantu yang hasil kerjanya tidak sesuai dengan yang ia harapkan.

Karena itu, untuk mengimbangi apa yang mereka telah keluarkan, majikan tidak segan memerintah atau mempekerjakan pembantu tanpa jam kerja seperti lazimnya pekerjaan domestik. Dalam kasus yang diteliti, jam kerja Ati sebagai pengasuh anak tergantung dengan anak majikannya tersebut. Ia mengasuhnya 24 jam jika si anak taidak ingin bergabung dengan orang tuanya ketika tidur, dan ini yang sering terjadi. Ati mulai bekerja ketika si anak membuka mata dan beranjak dari tempat tidur untuk bermain, makan dan bermain. Ati dapat istirahat ketika si anak tidur. Namun anak tersebut jarang tidur siang, sebab ia menunggu orang tuanya pulang untuk makan siang.

Heni agak leluasa mengatur pekerjaannya. Ia juga tidak khawatir jika pekerjaannya tidak selesai, sementara ia memerlukan istirahat karena letih, maka ia akan beristirahat. Karena semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawabnya, maka Heni punya hak untuk mengatur kapan ia beristirahat atau kapan ia harus menyelesaikan pekerjaan. Ibarat Heni adalah ibu rumah tangga, karena itu tidak ada yang marah atas kekurangan-kekurangan yang ia lakukan.

Ita punya jam kerja tertentu, yaitu tergantung pekerjaan mencucinya selesai, jemurannya kering lalu menyetrikannya. dua pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu banyak, kecuali ada jam-jam tertentu dimana pekerjaan dilakukan. Yang jadi masalah bagi Ita adalah pekerjaan bersih-bersih rumah, karena pekerjaan ini seperti tidak ada habis-habisnya. Selama anak-anak majikan asyik bermain dan membuat rumah berserakan maka itu berarti pekerjaannya belum selesai. Namun Ita punya waktu istirahat untuk membersihkan rumah, misalnya di hari Minggu dimana ia diizinkan untuk berjalan-jalan bersama kawan-kawannya.

Bude Sri menghabiskan sepanjang siangnya di rumah majikan, termasuk di hari Minggu, kira kira 8 jam sehari. Kadang ia harus kerja ekstra ketika majikan menjadi tuan rumah yang menjamu



relasinya. Untuk pekerjaan seperti ini, ia bekerja cukup berat dan kadang melebihi 8 jam dan jarang mendapat bonus atau tip. Paling-paling ia dapat membawa pulang kelebihan hidangan pesta.

Nasib Ana mengenaskan, sebab tidak ada pekerjaan yang dapat ditunda penyelesaiannya. Semuanya harus diselesaikan per hari. Sebab untuk hari berikutnya pekerjaan yang sama pun telah menunggunya. Tidak ada pekerjaan yang ditunda sebab akan menimbulkan penumpukan pekerjaan. Penumpukan pekerjaan akan banyak menimbulkan masalah, diantaranya Ana cepat menjadi lelah dan sering melakukan kesalahan. Tentu saja setiap kesalahan berarti instruksi, nasehat-nasehat dan omelan yang semuanya malah membuat Ana tidak nyaman.

### **KEWAJIBAN PRT**

Mendapatkan PRT idaman bagi pengguna bukanlah hal mudah. Banyak pengguna merasa tertipu dan kecewa dengan PRT yang ditemui dari penyalur. Oleh karena itu mereka kadang berupaya sendiri menemukan PRT yang diinginkan. Mungkin mereka mendengar cerita dari mulut ke mulut antar teman sekantor, atau sengaja pergi ke kampung untuk mencari sendiri orang yang diinginkan. Apapun upaya yang dilakukan, ini hanyalah langkah kecil untuk menemukan relasi yang harmonis antara PRT dengan majikan. Selebihnya suasana yang harmonis banyak ditentukan oleh bagaimana persepsi sekaligus sikap kita terhadap PRT.

PRT jika dipandang dan diperlakukan sebagai orang yang membantu kita dalam mengerjakan sejumlah tugas dalam rumah tangga, maka kemungkinan para pengguna cukup puas dengan pekerjaan mereka. Sebaliknya jika anggapan yang dibangun tentang PRT sebagai pekerja pengganti dalam menyelesaikan urusan rumah tangga, maka pengguna dalam hal ini majikan akan mengalami banyak kekecewaan, karena tidak semua PRT sanggup menjadi substitusi bagi majikan. Begitu banyak PRT butuh bimbingan majikan karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman mereka. Banyak PRT yang senang diberi tahu sekalipun majikan berarti cerewet, ketimbang dibiarkan mengerjakan pekerjaan tanpa mengetahui salah-benarnya. Artinya banyak PRT yang membutuhkan kerjasama dengan majikan. Dalam hal ini tentu mengecewakan mendapati PRT tidak dapat melakukan banyak hal

sendiri. Padahal kendala majikan adalah dalam hal pemberdayaan PRT, dimana keterbatasan waktu sering membuat mereka tidak bisa mengajarkan PRT atau menyempatkan PRT untuk belajar menambah ketrampilan di luar rumah. Belum lagi jika majikan stress di kantor kemudian mendapati PRT yang tidak siap bekerja sendiri atau mengambil inisiatif sendiri, maka bisa saja kemarahan dan kemarahan majikan yang dialami PRT.

Profesi PRT jika memang ini sebagai tujuan merupakan pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Namun tidak semua orang menyadari pentingnya peranan PRT bagi kesuksesan suatu keluarga. Bayangkan, seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita karier (*double burden*) biasanya akan membutuhkan jasa PRT untuk membantu menyelesaikan urusan di dalam rumahnya. Bukan hanya itu, fenomena saat ini keluarga kecil menengah ke bawah pun membutuhkan jasa PRT, paling tidak untuk sebagian jenis pekerjaan rumah tangga. Ada yang hanya untuk mencuci dan menggosok, ada juga untuk membersihkan rumah dan memasak, atau hanya untuk menjaga anak untuk beberapa waktu tertentu.

Bagi tiap pengguna, mempekerjakan PRT dengan harapan pekerjaan yang tidak dapat diatasi sendiri dapat diselesaikan dengan bantuan jasa PRT. Karena itu, bagi majikan, PRT haruslah bisa bekerja kalau perlu tanpa diajari lagi, sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Selebihnya tiap majikan mendambakan PRT yang bisa dipercaya atau jujur. Bisa bekerja dan jujur ini merupakan prasarat yang diajukan pengguna ketika untuk kali pertama mencari PRT.

Kenyataannya, tidak semua PRT dapat memenuhi keinginan pengguna ini. Ada banyak diantara mereka yang bekerja sebagai PRT karena tidak menemukan pekerjaan lain yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sementara pekerjaan sebagai PRT diyakini oleh mereka tidak memerlukan kompetensi tertentu. Sehingga baru tamat pendidikan dasar atau menengah, ada yang berani menjadi PRT. Padahal pekerjaan tersebut memerlukan tanggung jawab yang besar seperti diinginkan tiap pengguna. Akhirnya, kekecewaan demi kekecewaan yang dialami pengguna karena mengharapkan orang yang dapat membantu tetapi ternyata tambah pekerjaan untuk mengajarkan banyak hal.

Belum lagi masalah kejujuran. Banyak orang berkedok jasa PRT namun punya niat lain, yaitu sambil mencuri, atau pura-pura menjadi

PRT dimana kelak sebagai “orang dalam” yang akan membukakan pintu bagi kawannya untuk menguras kekayaan majikan. Belum lagi ada PRT yang punya semacam kebiasaan buruk yaitu kleptomania, jadi mengutil barang berharga atau kesayangan majikannya.

Dalam kasus yang diteliti, tidak ada PRT yang melalaikan kewajibannya dalam arti tidak bisa bekerja dan tidak dapat dipercaya. Kasus Heni sebagai “ibu rumah tangga” di dalam rumah tangga majikannya menunjukkan bagaimana peran PRT dalam membantu persoalan suami-istri yang bekerja. Suami yang memiliki bisnis besar, dan istri yang karyawan sebuah bank membutuhkan bantuan orang lain untuk mengatasi urusan rumah tangga mereka. Mereka mempercayakan semuanya kepada Heni, bahkan untuk membantu pekerjaan Heni mereka mempekerjakan PRT lain. Jadi Heni adalah PRT yang memiliki pembantu.

Ati tentu saja bisa bekerja dan memuaskan majikannya. Tidak hanya itu, untuk urusan anak, mereka hanya berani menyerahkan kepada Ati karena terbukti Ati mampu memenuhi harapan mereka. Ati tidak mau keluar rumah ketika majikan tidak ada di rumah. Ati juga mengikuti pesan majikan untuk tidak membukakan pintu kepada sembarang orang yang datang bertamu. Anak majikan pun tumbuh bongsor dan menggemaskan. Bagi orang yang bekerja dengan tuntutan ekstra ketat seperti di CPI, adanya pembantu yang bisa diandalkan dan dipercaya merupakan kesempatan emas, karena itu mereka tidak peduli dengan berapapun gaji, yang penting PRTnya betah.

Sebagai PRT, Ana bekerja kepada majikan dengan keluarga besar. Majikan perempuan sendiri tidak bekerja, selain sebagai ibu rumah tangga. Bagi Yanti, sang majikan, Ana cukup menyusahkan karena keterbatasan mental yang dideritanya. Jika kepada orang normal cukup berbicara satu dua kali, maka kepada Ana harus sesering mungkin (justru karena itu, Ana merasa majikannya cerewet dan pemarah). Tapi hasil kerjanya cukup membantunya mengingat anaknya yang banyak, 5 orang. Mengenai kejujuran, Ana dapat diandalkan, karena itu sebagai pengguna, majikannya tidak terlalu memperhatikan kelemahan Ana.

Karena keterbatasan kesempatan untuk eksplorasi, maka memang tidak ditemui dalam kasus yang diteliti tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan PRT dalam tataran kejujuran dan kemampuan bekerja. hal-hal kecil yang mengecewakan tentu saja

ada. Ana pernah memecahkan piring ketika majikannya tidak ada di rumah. Namun karena takut dimarahi jika tidak jujur, akhirnya ia melaporkan kejadian itu. Ternyata bagi Ana, melapor tidak melapor sama saja tetap dimarahi. Tidak ada penghargaan dari majikan atas kejujuran yang dilakukan Ana (dengan keterbatasan mentalnya) justru merupakan ketidakadilan lain yang dilakukan majikan kepadanya. Belum lagi bahwa Ana berada di rumah tersebut sebagai PRT yang tidak dibayar. Namun istilah majikan, Ana telah diselamatkan dan dianggap sebagai keluarga.

## F. SIMPULAN

Beberapa alasan seseorang dalam kasus yang diteliti memilih menjadi PRT adalah sebagai berikut: kejenuhan tinggal di kampung, membuat PRT merantau mencari pekerjaan. Pekerjaan sebagai PRT menjadi tujuan untuk pertama kali seseorang bekerja untuk meninggalkan kampung karena pekerjaan ini dipandang bebas dari syarat kualifikasi dan kompetensi tertentu. Alasan lainnya karena pekerjaan PRT dipandang lebih sesuai. Oleh karena itu, seorang informan seperti Heni merasa yakin dengan pilihannya sebagai PRT. Menurutnya pekerjaan PRT lebih baik ketimbang menjadi pelayan toko, bekerja di pabrik, atau di perkebunan, walaupun mendapat gaji kecil dan tidak dapat mejeng, tetapi gajinya netto, gaji bersih, tanpa memikirkan harus mengeluarkan biaya makan dan sewa rumah.

Ada pula yang beralasan karena dibutuhkan majikan maka ia menjadi PRT. Bagi Bude Sri, keputusannya menjadi PRT karena majikannya sangat membutuhkannya untuk pekerjaan memasak. Seandainya suatu saat majikan tidak membutuhkannya lagi, maka ia tidak bermaksud menjadi PRT lagi. Ada yang menjadi PRT karena sekedar mencari pengalaman kerja, sebagai batu loncatan. Suatu saat Ita bermaksud bekerja di sektor public, bertemu banyak orang dan memiliki jam kerja. Alasan yang memilukan seperti yang dikemukakan oleh Ana. Ia menjadi PRT karena hanya pekerjaan PRT yang bisa dilakukan. Lagi pula ia berada di rumah majikannya sekarang karena ia tidak punya gambaran dimana ia akan bekerja selanjutnya, pekerjaan apa yang dapat dilakukannya, dan bagaimana ia menjalani hidupnya kelak.

Sebagai kelompok yang memiliki ketergantungan ekonomi

dengan orang lain, dalam hal ini majikan, PRT sangat mudah mengalami kekerasan. Hanya saja sangat disayangkan ketika UU PKDRT kurang mengakomodir pekerja sektor informal ini. Dalam perspektif pembantu, mereka merasa majikan melakukan berbagai bentuk kekerasan, yang terutama adalah kekerasan psikis atau emosional. Sebagaimana dialami oleh Ana. Sebenarnya majikan tahu bahwa Ana memiliki sejumlah persoalan terkait dengan kondisi fisik dan psikisnya, yaitu keterbelakangan mental. Sehingga penanganannya tidak akan tepat dengan marah-marah atau mengomel. Ana memang akan tetap lamban, karena orang sepertinya memang lamban. Dan omelan yang diterimanya justru makin menambah kedukaannya disamping tekanan lainnya seperti tidak mendapat gaji.

Wajah cemberut majikan juga membuat tekanan bagi PRT. Ita mengalaminya jika pekerjaannya tidak selesai. Ita punya pekerjaan wajib mencuci dan menggosok serta beres-beres rumah. Pekerjaan terakhir inilah yang membuatnya sering stress. Sebab seperti tiada putus-putusnya, begitu dibersihkan dan dirapikan, anak majikannya mulai lagi menyerakkan mainan dan apa saja yang ingin diserakkan. Belum selesai pekerjaan berarti ada kekerasan psikis yang diterima.

Bude Sri begitu akrab dengan suasana kemarahan dan permusuhan antar majikan laki-laki dan majikan perempuan, atau antara majikan laki-laki dengan menantu dan atau dengan anaknya, atau antara majikan dengan karyawan di perusahaannya. Dalam suasana seperti itu, terkadang apa yang telah dimasak dan disiapkannya ikut menjadi pengobar kemarahan, sehingga Bude Sri tersembur kemarahan.

Ati berkisah tentang majikannya yang pertama, ia mengibaratkan dirinya dalam penjara dan majikannya sipir. Sebab majikannya tidak pernah mengizinkannya keluar rumah, atau bahkan untuk menerima telepon dari ibunya di kampungnya di Lampung Selatan. Pekerjaannya begitu banyak, gajinya kecil, makanannya aneh dan tidak bisa ia makan tanpa syak.

Henri mengaku semua urusan dan pengelolaan rumah tangga menjadi tanggung jawabnya. Dia mengaku sering lelah. karena semua pekerjaan itu menjadi tanggung jawabnya. Rupanya majikannya tidak membuat pengaturan dan pembagian

pekerjaan dan tanggung jawab sekalipun PRT yang dipekerjakannya dua orang.

Mengenai pelaku kekerasan dalam rumah tangga kaitannya dengan PRT, dapat dilihat dalam dua sisi. Jika dilihat dari perspektif PRT, maka pelaku kekerasan bisa datang dari majikan perempuan yang banyak mengomel dan memerintah atau marah dan cemberut. Bisa juga datang dari anak majikan yang ribut seperti dialami Ana karena ia tidur bersama anak-anak. Atau Ita yang bertugas membereskan rumah yang sering diserakkan oleh anak majikan.

Mereka tidak mengalami kekerasan fisik, namun lebih bersifat psikis dan umumnya pelakunya majikan perempuan. Agaknya disebabkan karena urusan PRT adalah urusan yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga yang umumnya diatur atau diolah oleh ibu atau majikan perempuan. Kalaupun ada kekerasan psikis lainnya biasanya juga datang dari anak majikan seperti tidak berhenti bermain dan menyerakkan mainan di dalam rumah, padahal pembantu bertanggung jawab membersihkan rumah. Pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya ini membuat pembantu menjadi stress.

Kekerasan ekonomi misalnya gaji yang kecil sejauh ini tidak menjadi masalah bagi pembantu. Agaknya mereka puas dengan gaji dan tip yang diberikan, dan dipandang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Pengecualian untuk kasus Ana. Ia mengalami kekerasan ekonomi disamping kekerasan psikis dari majikan dan anak-anaknya.

Dilihat dari perspektif pengguna, justru PRT adalah pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengambil bentuk kekerasan psikis. Relasi Majikan dan PRT memang ibarat dibutuhkan namun mengesalkan. Secara garis besar, juga dapat disimpulkan pihak terakhir ini justru mengalami berbagai ketidaknyamanan dan ketidakberdayaan (baca kekerasan) dalam bentuk lain, berbagai bentuk kekerasan emosional seperti tekanan perasaan, disamping memang tak dapat dipungkiri mereka mendapat keuntungan dari keberadaan PRT. Menggunakan jasa PRT bukan berarti menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka yang bekerja atau ibu rumah tangga yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya tanpa bantuan or-

ang lain. Ternyata, para pengguna merasakan ketidaknyamanan karena berbagai perilaku PRT seperti etika, kebiasaan buruk suka menelpon, menghabiskan makanan, sikap menggoda, atau tidak bisa bekerja, dan lain-lain.

Boleh jadi para pengguna mengalami ketidaknyamanan karena ulah PRT yang dimilikinya. Namun, sekalipun para majikan mengeluh, tapi relasi yang tercipta tetap saja timpang. Mereka tetap majikan, orang yang harus diterima semua pendapat dan pikirannya oleh pembantunya. Jika tidak, maka akan timbul ketidaknyamanan bagi majikan dan segera menuding penyebabnya PRT yang tidak benar, payah dan tidak becus.

Tipe majikan yang dapat melakukan kekerasan psikis dalam kasus-kasus ini diantaranya karena majikan adalah ibu rumah tangga biasa yang sehari-hari menghabiskan waktu di rumah. Banyaknya waktu di rumah membuat majikan dapat mengamati secara leluasa apa yang dikerjakan PRT. Sehingga kekurangan-kekurangan dapat segera terbaca dan dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk kekerasan psikis (emosional). Apa yang dialami Ana dan kurang lebih yang dialami Ita adalah sama. Ita memiliki majikan perempuan yang bekerja di kantor yang tidak jauh dari rumahnya, sehingga sewaktu-waktu kapania mau dapat pulang ke rumah. Bisa saja saat majikan datang, Ita tidak siap dengan pekerjaan yang paling tidak disukainya adalah membersihkan rumah.

Sedikit berbeda dengan majikan yang kebetulan suami istri bekerja. Apa yang dialami Heni dapat dijadikan contoh. Majikannya, suami-istri tidak terlalu peduli apa yang dikerjakan Heni selama mereka pergi. Mereka tidak banyak mengeluh dengan piring yang pecah atau ada pekerjaan yang belum siap. Bagi mereka cukuplah ada orang yang membantu menyelesaikan sebagian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan karena mereka bekerja di luar rumah.

Memang tidak mungkin mengharapkan semua yang diinginkan majikan dapat diwujudkan atau dikerjakan oleh seorang PRT. Istilah pembantu saja sudah menunjukkan bahwa mereka bekerja hanya untuk membantu pekerjaan majikan yang tidak dapat ditangani atau diselesaikan sendiri oleh majikan. Kebanyakan pembantu memahami posisi ini sehingga mereka

tidak bekerja selama tidak diperintah atau dibutuhkan oleh majikan, suatu keadaan yang bisa diterjemahkan oleh majikan sebagai pemalas dan tidak punya inisiatif. Relasi yang timpang antara majikan dan pembantu tidak hanya dapat dilihat pada terjadinya mala komunikasi dan persepsi keliru tentang pekerjaan dan tanggung jawab tersebut. Masih banyak hal lain yang dapat memicu konflik kepada dua pihak yang sebenarnya sama-sama membutuhkan tersebut. Mestinya mereka dapat menciptakan hubungan simbiosis mutualisme, namun yang terjadi adalah pemecatan karena anggapan tidak becus atau melarikan diri karena tidak suka kepada majikan.

Seperti apa yang dialami oleh informan, setelah tamat SD atau SMP, mereka bekerja menjadi PRT dengan pertimbangan pekerjaan itu yang paling mudah dilakukan dan mereka telah memiliki modal bisa memegang sapu, memasak air atau nasi, mencuci dan menyetraka.

Pendidikan formal SD atau SMP sendiri tidak mengajarkannya bagaimana mengoperasikan mesin cuci, setrika yang baik, penghematan listrik, menyalahkan kompor gas, mengoperasikan vacuum cleaner, memasak di oven, bagaimana merawat manik-manik, barang keramik, kain sutra dan lain-lain. Mereka juga umumnya tidak tahu bahwa tidak boleh membangunkan majikan yang sedang tidur sekalipun jam istirahat telah lewat, menerima telepon dan mengaku majikan ada, atau membukakan pintu kepada setiap orang yang mengetuk pintu.

Apalagi ketika berhadapan dengan anak-anak majikan yang rewel, seringkali seorang pembantu bingung dan canggung. Seperti yang dialami Ita, ia tidak suka dengan salah satu pekerjaannya yaitu mengurus anak majikan karena yang terakhir ini kalau sampai menangis, maka Ita akan tertekan dengan tuduhan melalui sorotan mata majikan perempuannya. Ita tidak menyukai anak-anak majikan juga karena alasan tersendiri yaitu karena anak-anak tersebut tidak mau berkompromi dengannya masalah kebersihan dan kerapian rumah yang menjadi tanggung jawabnya.

Karena anggapan bahwa PRT dibeli jasa atau tenaganya, banyak majikan menganggap mengerjakan pembantu tanpa mempertimbangkan kondisi dan waktunya sah-sah saja.



Begitupun ketika terjadi kesalahan akibat ketidaktahuan pembantu atau kesalahan pembantu, mendidik dan mengajarkan bukanlah pilihan yang ditempuh, melainkan kemarahan dan perasaan tidak dihargai dan dilecehkan pembantu. Tentu saja karena mereka dibayar, sehingga persepsi kita memperkuat sikap dan tindakan untuk menghukum pembantu dan memberi label negatif mereka payah, tidak becus, dan sebagainya.

Satu hal yang terlewatkan adalah bahwa pembantu umumnya berpendidikan lebih rendah dibandingkan majikan. Belum lagi mereka yang begitu mudah dan tidak berpengalaman bekerja sebelumnya. Sehingga masalah pekerjaan, etika yang dianut oleh majikan tidaklah dipahami. Mereka tuna dalam banyak hal, oleh karena itu melakukan banyak kesalahan.

Agaknya memberi kesimpulan dengan mengungkapkan analisis tentang relasi yang harmonis PRT-majikan dalam persepsi PRT perlu diungkapkan. Diharapkan bagian ini sedikit banyak baik langsung maupun tidak langsung dapat menjadi celah untuk membawa nasib yang lebih baik bagi PRT.

Setiap PRT tentu menginginkan pekerjaan yang dilakukannya mendapat *reward* dari majikan, seperti apapun bentuknya. Pujian adalah *reward* termudah yang dapat dilakukan majikan namun berefek sangat tinggi bagi PRT. Apa yang dilakukan Heni dengan segala tanggung jawab IRT yang melelahkan biasanya mendapat *reward* dengan dikutkan dalam semua kegiatan keluarga atau pemberian tip dan bonus baju. Ia bagaikan anggota keluarga. Oleh karena itu, letihnya Heni akan terobati karena penghargaan tersebut. Semua itu kian membentuk keyakinan diarinya bahwa pekerjaan PRT bukanlah hal yang perlu ditolak, atau sekedar alternatif. Heni bertekad untuk tetap menjadi PRT (walaupun dengan majikan yang berbeda).

Sejak awal Ita tidak berharap menjadi PRT. Dia berharap dapat bekerja di tempat umum, dimana ia dapat bertemu dengan banyak orang, dengan dandanan untuk di luar rumah. Sebagai PRT tentu saja ia tidak dapat berdandan seandainya, apalagi melebihi majikan. Ati termasuk yang merasakan nikmatnya menjadi PRT hanya karena ia bertemu majikan yang sangat tergantung kepadanya dalam urusan mengasuh anak. Sekalipun begitu, Ati ingin menikah dan berkumpul dengan suaminya kelak di desanya

di Lampung. Ia tidak ingin selamanya menjadi pembantu bahkan sekalipun usianya masih begitu muda dan memiliki majikan yang diakuinya sangat baik. Agaknya jatuh cinta dan keinginan menikah lebih kuat dari pekerjaannya sekarang.

Bude Sri sudah lama ingin berhenti bekerja menjadi pembantu. Namun rasa kasihan dengan majikan membuatnya bertahan. Bude Sri tahu, ditengah mengomelnya sang majikan, di tengah konplik dan hiruk pikut pertengkarannya yang terjadi, ia masih dibutuhkan majikannya. Tidak hanya sekedar untuk menyiapkan masakan di meja, tetapi tempat curhat majikan perempuan setelah “perang rumah tangga” usai.

Apa yang dapat disimpulkan dari keadaan informan dalam relasi majikan-PRT adalah terjalinnya hubungan yang harmonis dan saling pengertian antara majikan selaku pihak yang dibantu dengan PRT yang membantu. Ada yang tidak dapat diselesaikan dengan marah-marah atau muka cemberut, tetapi dengan memberikan pengertian dan pengetahuan atau informasi mungkin lebih berguna. Banyak diantara PRT yang menunggu diperintah, sekalipun itu untuk tugas pertama kali. Instruksi penting, karena mereka khawatir melakukan kesalahan. Ketika mereka telah mengaku dengan kesalahan yang mereka lakukan, atau ketika pekerjaannya telah begitu membantu pengguna, apalagi yang dapat dilakukan pengguna selain memberikan *reward*, sekedar ucapan terima kasih yang tulus, pemberian tip atau mengajak jalan-jalan.

Mungkin dengan menyadari perlunya membangun hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara PRT dan majikan, maka persoalan KDRT yang terkait dengan PRT (baik sebagai korban atau pelaku) dapat diminimalisir. PRT, mudah mengalami kekerasan psikis, fisik, ekonomi dan seksual. UU PKDRT sendiri tidak terlalu banyak menyinggung masalah PRT, padahal kelompok ini adalah bagian paling rentan yang mengalami kekerasan karena posisi tawar mereka yang rendah atau karena status mereka yang berbeda dalam keluarga majikan.

\*\*\*

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### **Buku:**

Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. terjemahan Farid Wajdi dan Farha Ciciek Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya

Farcha, Ciciek. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw.* Jakarta: LKAJ bekerjasama dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation

Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Darajat, Zakiyah. 1996. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang

Diah, Mohammad. 2002. *Penelitian Kualitatif dalam Penerapan*. Pekanbaru: Depdiknas Pusat Bahasa, Balai Bahasa

Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina

UU PKDRT tahun 2004

Yin, K. 2002. *Studi Kasus*. Jakarta: Kanisius.

### **Aritkel dalam Jurnal:**

Arivia, Gadis. 1998, "Logika Kekerasan terhadap Perempuan". *Jurnal Perempuan*. edisi 08. Agustus-Oktober

Leksono-Supeli, Karlina. 1998. "Pemerintah yang Berdiri di Atas Darah Perempuan". *Jurnal Perempuan*. edisi 08. Agustus-Oktober

Ollaora. 1998. "Kekerasan Sebuah Budaya?". *Jurnal Perempuan*. edisi 08. Agustus-Oktober

Kalibonso, Rita Serena. 2002. "Kejahatan itu bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Perempuan* No. 26

\_\_\_\_\_. 2002. "Laki-laki: Pelaku atau Korban Kekerasan?". *Jurnal Perempuan*. No. 26.

Rahayu, Ruth Indiah. 1999. "Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia". *Jurnal Perempuan*. edisi 9

Heraty, Tuti. 1999. "Perempuan dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Perempuan*. edisi 9 November 1998-Januari 1999

Harian dan Tabloit

Kompas. 2002. "One Stop Sevice: Korban Kekerasan Tak Perlu Takut Lagi". Senin 4 Maret

Kompas. 2002. "Budaya Berperan Tingkatkan Kasus-Kasus Kekerasan", Senin. 4 Maret

Kompas. 2002. "Kejahatan Perkawinan dan Pemberdayaan Perempuan". Senin 11 Maret

Kompas. 2002. "Kekerasan Tidak Untuk Didiamkan. Senin 14 Oktober

Kompas. 2001. "Menghapus Mitos yang Menyesatkan". Senin 10 September

NOVA. 2000. "Kekerasan Suami Terhadap Istri Bisa Diperkarakan", No. 665/XIII 26 November

Riau Pos. Tahun 2003-2004

---

### Endnotes

\*Tulisan ini disarikan dari laporan hasil penelitian tahun 2004. Data, kondisi dan situasi yang diceritakan dalam tulisan ini meliputi tahun tersebut. Sampai saat diterbitkan buku ini, cukup banyak peristiwa KDRT yang menjadikan PRT perempuan sebagai korbannya, baik di dalam negeri maupun yang menimpa pekerja migran perempuan Indonesia di luar negeri. Kasus kekerasan yang menimpa PRT perempuan, terutama yang bersifat psikologis, masih minim menjadi perhatian. Sementara kasus yang banyak diceritakan di media adalah kasus kekerasan fisik.

**DAMPAK PERJUDIAN TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**  
*(Studi Kasus Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan  
di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu)*

---

Nurhasanah Bakhtiar

---

## A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan yang paripurna. Kepariपूर्णannya terletak pada tiga aspek; yakni aspek aqidah, aspek ibadah dan aspek akhlak (El-Jazair, 1990:v). Meskipun diakui aspek pertama sangat menentukan, tanpa integritas kedua aspek berikutnya dalam perilaku kehidupan muslim, maka makna realitas kesempurnaan Islam menjadi kurang utuh, bahkan diduga keras akan mengakibatkan degradasi keimanan pada diri muslim, sebab eksistensi perilaku lahiriyah seseorang adalah perlambang batinnya.

Keutuhan ketiga aspek tersebut dalam pribadi muslim sekaligus merealisasikan tujuan Islam sebagai agama pembawa kedamaian, ketenteraman dan keselamatan. Sebaliknya pengabaian salah satu aspek akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Salah satu persoalan yang terdapat dalam aspek ibadah sekaligus akhlak Islam adalah agar umat muslim menghindari perjudian, karena perjudian merupakan perbuatan keji yang dapat meruntuhkan martabat manusia dan menghancurkan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum. Islam berulang kali menyoroti masalah judi, seperti yang tertera dalam surah al'-Baqarah ayat 219 yang artinya: *Mereka bertanya kepadama tentang khamar dan judi. katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfa'ainya* (QS: al-Baqarah:219). Maksudnya ialah bahwa melakukan kedua perbuatan itu mengandung dosa besar karena di dalamnya terdapat kemudharatan-kemudharatan dan kerusakan material dan keagamaan. Sekalipun kedua hal itu mempunyai manfa'at secara material, yaitu keuntungan bagi penjual khamar dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah bagi penjudi, akan tetapi dosa dan akibat negatifnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Ayat lain yang berbicara masalah judi terdapat dalam surah al-Maidah ayat 90-91, yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan*

*dan kebencian di antarakamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu. (Q.S al-Maidah: 90-91).*

Allah melarang keempat perbuatan di atas karena:

- a. Keji dan menjijikkan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai pikiran waras.
- b. Merupakan godaan dan tipu daya syaitan
- c. Akibatnya yang akan membawa kepada permusuhan dan persengketaan
- d. Dapat melalaikan muslim dari mengingat Allah dan sholat serta kewajiban agama lainnya.

Atas dasar itulah menurut Sayyid Sabiq perbuatan judi hukumnya haram mutlak (*qath'i*) yang harus ditinggalkan secara mutlak (Sayyid Sabiq, 1993: 37). Dengan demikian seyogyanya dalam masyarakat Muslim menghentikan perbuatan judi. Namun berbeda dengan apa yang penulis lihat di lapangan, yaitu di Kecamatan Kepenuhan, yang masyarakatnya mayoritas muslim serta kuat berpegang pada adat istiadat dengan semboyan *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*. Judi sudah menjadi sebuah fenomena yang menggelisahkan. Berbagai tempat seperti kaki lima, warung, bahkan rumah pribadi pun dijadikan tempat perkumpulan sekelompok pejudi.

Hal ini tentunya membawa dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. Seorang suami yang waktunya banyak terbuang di meja judi lupa tanggung jawabnya terhadap keluarga, bahkan terkadang sampai berhari-hari tidak pulang ke rumah. Kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri mulai terabaikan dan perlakuannya terhadap istri juga mulai kasar.

Percekcokan antara suami istri sering terjadi bahkan sampai Pada tahap perceraian. Dalam Islam seorang suami, disamping wajib memenuhi nafkah keluarga, juga wajib memperlakukan istrinya dengan baik, seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat- 1, artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara baik Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah ), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*. Dalam hadisnya, Rasulullah s.a.w. juga menekankan agar para suami memperlakukan istrinya dengan baik, seperti SabdaNya: artinya: *"Orang mukmin yang baik imannya yaitu yang*

*paling baik akhlakunya. Dan yang paling baik diantara kamu yaitu orang yang sangat baik kepada istrinya."*

Seorang muslim hendaknya tidak melakukan kekerasan terhadap istri. Kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikis, seringkali lebih berkisar sebagai "isu" dalam perbincangan atau pemberitaan media massa. Penanganan sampai tuntas, apalagi sampai pada tahap penuntutan dan kemudian mengadili pelakunya, sering terbentur pada berbagai kendala, baik yang berasal dari aparat yang berwenang menangani maupun situasi dan kondisi masyarakat di mana kasus tersebut terjadi. Biasanya keadaan akan semakin rumit dan kompleks bagi korban jika kasusnya terjadi di dalam rumah tangganya sendiri.

Menurut Harkristuti Harkriswono yang merujuk pada salah satu publikasi PBB yang di laporkan *Division for the Advancement of Women, Center for Social Development and Humanitarian Affair* yang berpusat di Vienna, bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam arti luas, meliputi "segala tindakan seseorang yang menyakiti seorang perempuan, baik secara fisik maupun non fisik (Haridadi, 1995: 513).

Berbagai faktor penyebab terselubungnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga di Indonesia umumnya antara lain karena besarnya rasa malu, *self guilty*, dan rasa *respect* pada keyakinan pentingnya menjaga nama baik dan keutuhan keluarga serta kondisi *of crime* pada perempuan lebih besar dari laki-laki. Faktor-faktor ini akan lebih nampak nyata pada ruang lingkup keluarga yang *center social lifenya* masih ketat bersendikan pada tradisi dan adat istiadat.

Upaya untuk menemukan indikasi dan bentuk kekerasan, khususnya yang berkaitan dengan peta situasi kekerasan di dalam keluarga di Kecamatan Kepenuhan dapat dikatakan penting dan cukup mendesak. Untuk itu perlu dilakukan studi komprehensif tentang berbagai kasus rumah tangga, khususnya, tentang kekerasan terhadap perempuan (istri) dan anak dalam keluarga, agar kasus-kasus ini bisa terungkap dan mendapatkan suatu tanggapan positif dalam konteks mencari suatu pola ataupun program kerja yang berkaitan dengan aspek pencegahan dan advokasinya (pendampingnya).



Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimana latar belakang keluarga dalam kasus yang diteliti? *Kedua*, Bagaimana bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri/anak sebagai akibat perjudian? *Ketiga*, Bagaimana upaya penanggulangan untuk mencari solusi/upaya perlindungan dan advokasi bagi istri dan anak yang menjadi korban kekerasan akibat perjudian? Dengan demikian, tujuan dari penelitian adalah: *pertama*, mengetahui secara akurat tentang latar belakang keluarga dalam kasus yang diteliti. *Kedua*, menemukan data tentang bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri/anak sebagai akibat perjudian. *Ketiga*, mencari upaya penanggulangan untuk mencari solusi/upaya perlindungan dan advokasi bagi istri dan anak yang menjadi korban kekerasan akibat perjudian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami istri atau anak dari suami yang berjudi, dan berusaha menampilkan kedalaman sekaligus detail dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga pada kasus yang diteliti.

Bentuk penelitian adalah kasus, yaitu studi yang dilakukan secara intensif terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami sebagai akibat perjudian yang dilakukan pada kasus yang diteliti di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Informan kunci dalam penelitian sebanyak lima orang istri yang mengalami kekerasan sebagai akibat perilaku suami yang memiliki kebiasaan berjudi. Pertimbangan dalam mengambil kelima kasus tersebut adalah karena latar belakang keluarga yang berbeda, demikian juga tingkat usia dan jumlah anak juga berbeda. Adapun informan pendukung adalah anak-anak dan keluarga serta kerabat korban yang memiliki informasi dalam kasus yang diteliti serta pihak-pihak yang memiliki otoritas, seperti lurah dan datuk-datuk adat.

Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah:

1. Nama Informan : Zainab (Bu Izai)
- Umur : 42 tahun
- Pekerjaa : Ibu Rumah Tangga
- Nama Suami : Lubis

- Pekerjaan suami : Buruh tani  
Jumlah Anak : 4 orang (Boy 12 tahun, Ari 9 tahun, Indah 6 tahun dan Tia 3 tahun).
2. Nama Informan : Nelawati (Bu Inel)  
Umur : 25 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Nama Suami : Ali  
Pekerjaan suami : Wiraswasta  
Jumlah Anak : 2 orang (Rafi 6 tahun, dan Rahu 4 tahun)
3. Nama Informan : Zuraida (Bu Ida)  
Umur : 26 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Nama Suami : Darmawi  
Pekerjaan Suami : tidak tetap/ harian  
Jumlah anak : 3 orang (Roni 5,5 tahun, Desi 4 tahun dan Neni 1,5 tahun).
4. Nama Infoemen : Naimah (Bu Imah)  
Umur : 47 tahun  
Pekerjaan : PNS  
Nama Suami : Darwis  
Pekerjaan suami : Tidak tetap  
Jumlah Anak : 3 orang (Neni 12 tahun, Ayu 9 tahun, Akil 6 tahun).
5. Nama : Bu Asmah  
Umur : 36 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Nama Suami : Ucok  
Pekerjaan : Buka Warung  
Jumlah anak : 2 orang (Siti 3 tahun, Latifah 1,3 tahun).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dijang dengan menggunakan teknik wawancara terhadap informan kunci. Wawancara bersifat mendalam, terbuka dengan dukungan pedoman wawancara. Wawancara juga dilakukan kepada informan pendukung untuk membuat perbandingan akselerasi draft wawancara dengan informan kunci. Selain itu digunakan teknik observasi, yaitu upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan

mengamati secara seksama tentang sikap perilaku, keadaan emosi informan kunci selama wawancara berlangsung. Observasi juga meliputi kegiatan mengamati keadaan fisik rumah tangga pada lingkungan kasus yang diteliti.

Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul di lapangan. Tema-tema tersebut diikuti dengan proses koding dan reduksi data yang terkait secara langsung. Kemudian disusun dalam bentuk draf yang untuk selanjutnya dibawa dalam diskusi kelompok terarah. Hasil diskusi tersebut akan ditulis dalam bentuk deskripsi laporan penelitian sehingga memperlihatkan kondisi yang real di lapangan tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak perjudian dalam masyarakat di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

## **B. SETTING LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di kota Tengah Kecamatan Kepenuhan. Kata “kepenuhan” terambil dari kata “penuh” yang artinya sudah terisi semua. Dinamakan Kepenuhan karena pada zaman dahulu daerah ini sangat ramai dan padat yang didiami oleh masyarakat yang berasal dari turunan suku Melayu Riau dan sebahagian kecil berasal dari suku Minang dan Batak. Kesemuanya adalah penganut agama Islam dan teguh memegang adat istiadat.

Pada zaman penjajahan Belanda (sekitar tahun 1901), daerah Kepenuhan disebut dengan “Luhak Kepenuhan”, merupakan salah satu daerah dari lima daerah kerajaan yang pada waktu itu pusat pemerintahan kewedanannya berada di daerah Pasir Pengarayan dan rajanya yang terkenal “Tuan Kontler”. Kelima kerajaan tersebut adalah:

1. Kerajaan Luhak Rambah dengan ibu negerinya Pasir Pengarayan
2. Kerajaan Luhak Tambusai dengan ibu negerinya Dalu-dalu
3. Kerajaan Luhak Rokan IV Koto dengan ibu negerinya Rokan
4. Kerajaan Luhak Kunto Darussalam dengan ibu negerinya Kota Lama
5. Kerajaan Luhak Kepenuhan dengan ibu negerinya Kota Tengah.

Luhak kepenuhan pada mulanya dikepalai oleh seorang raja yang berasal dari kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat

yang rajanya bernama Bundo Kandung.

Berdasarkan sumber sejarah Kepenuhan, pada tahun 1903 M, Kecamatan Kepenuhan dipimpin oleh seorang raja Yang Dipertuan Besar yang bernama Tengku Tampung yang wafat pada tahun 1901 M. Beliau dimakamkan di pemakaman Rajo Maro Keluang, Kota Tengah. Raja ini diganti oleh Yang Dipertuan Muda yang bernama Tengku Sultan Sulaiman. Inilah raja Kepenuhan yang terakhir.

Raja-raja di kecamatan Kepenuhan tersebut diangkat oleh datuk-datuk dari kepala suku yang ada pada ketika itu, yang terdiri dari tujuh suku, yaitu:

1. Suku Mais
2. Suku Melayu
3. Suku Moniliang
4. Suku Pungkuing
5. Suku Kanang Kopuh
6. Suku Kuti
7. Suku Ampu

Pada kelompok kerajaan yang berfungsi sebagai pelindung dan penyatu adat dari suku-suku yang tujuh di atas terdapat pula tiga suku (Dt. Bendahara Sakti, 15-10-2004), yaitu:

1. Suku Rajo-rajo (Bangsawan)
2. Suku Anak Rajo
3. Suku Nan Seratus

Kepala-kepala suku tersebut dikenal dengan “pucuk suku” diketuai oleh Datuk Bendahara Sakti di dalam Lembaga Kerapatan Adat (LKA) yang bertugas menyelenggarakan kerapatan adat dan dibantu oleh Wakil Ketua I yang bergelar Datuk Rang kayo Marajo. Wakil Ketua II yang bergelar Datuk Paduko Jalelo, serta Wakil Ketua III yang bergelar Datuk Bijinso. Keempat pemuka adat ini disebut “Empat Dibalai Besar”.

Datuk-datuk dari wilayah kepenuhan akhirnya menghadap pimpinan adat raja Kerajaan Kagaruyung yang bergelar Datuk Parpatih nan Sabatang dengan tujuan memohon agar wilayah Kepenuhan diserahkan langsung kepada datuk-

datuk adat Kepenuhan untuk dikelola sepenuhnya. Dalam arti, kata tidak lagi bernaung di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Permohonan para datuk adat dari wilayah Kepenuhan ini dikabulkan oleh Raja Bundo Kandung.

Dengan keputusan raja ini, maka datuk-datuk pimpinan suku yang ada di Luhak Kepenuhan selanjutnya membina sukunya masing-masing. Untuk mencari kehidupan yang layak sebagai petani mereka membuka hutan untuk membuat perkampungan dan lahan bercocok tanam yang sesuai dengan kebutuhan hidup.

Keadaan seperti ini terus berlanjut hingga masuknya penjajahan Jepang pada tahun 1942 M. Ketika Jepang masuk, raja-raja dalam Luhak Yang Lima itu tunduk pada kekuasaan penjajahan Jepang yang berpusat di Pasir Pengarayan.

Pada zaman kemerdekaan luhak-luhak yang ada di dalam daerah Pasir Pengarayan dijadikan kecamatan dan ditambah satu lagi yaitu kecamatan Tandun yang semuanya dipimpin oleh seorang camat (asisten wedana).

Beberapa tahun kemudian, (sekitar tahun 1949) status kecamatan yang ada dalam wilayah Pasir Pengarayan diturunkan menjadi kewalian-kewalian, sehingga Kecamatan Kepenuhan berubah menjadi Kewalian Kepenuhan yang dipimpin oleh seorang wali negeri yang membawahi 18 (delapan belas) daerah kepenghuluan, sedangkan kecamatannya kembali berpusat di Pasir Pengarayan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah RI, maka pada tahun 1961 keenam luhak yang ada dikembalikan statusnya menjadi kecamatan, sehingga pada saat itu Kecamatan Kepenuhan dibagi menjadi lima kewalian (desa) yang berpusat di Kota Tengah. Kelima desa itu adalah:

1. Desa Kepenuhan Hulu yang berpusat di Pekan Tebih
2. Desa Kepenuhan Barat yang berpusat di Sei Emas
3. Desa Kepenuhan Tengah yang berpusat di Kota Tengah
4. Desa Kepenuhan Timur yang berpusat di Pasir Pandak
5. Desa Kepenuhan Hilir yang berpusat di Ulak Patian

Oleh karena sulitnya mencari pekerjaan di daerah ini, maka penduduk yang semulanya ramai, banyak pula pindah ke daerah

lain seperti ke Teluk Pulau dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis (Amiruddin Burhan, 14-10-2004). Sedangkan masyarakat yang masih menetap di Kecamatan Kepenuhan hidup dari hasil pertanian dengan tanaman kacang, padi, ubi, dan sebagainya serta mendapatkan biaya hidup dengan menyadap karet.

Kecamatan Kepenuhan terletak di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas daerah 918,82 KM<sup>2</sup>. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tambusai. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kunto, sebelah Barat berbatasan dengan Kepenuhan Barat dan sebelah timur berbatasan dengan Kepenuhan Timur (Data Kantor Lurah Kepenuhan Tengah).

Mata pencaharian umumnya masyarakat Kota Tengah adalah bertani. Di samping itu ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, PNS dan wirausahawan. Pertanian di Kota Tengah pada mulanya sejenis "berladang padi" dan menyadap karet. Tetapi untuk lima tahun terakhir beralih kepada perkebunan sawit. Sebahagian masyarakat ada yang mengolah sawit sendiri dan ada melalui kerjasama dengan perusahaan yang menanamkan modalnya di daerah ini. Masyarakat sebagai pemilik tanah diberi kaplingan sawit rata-rata dua hektar perkeluarga.

Dengan hasil sawit yang diperoleh setiap bulannya, ekonomi masyarakat kelihatan meningkat. Hal ini terlihat dari pemilihan kendaraan sepeda motor yang hampir dimiliki tiap keluarga, rumah-rumah berdirimegah dan daya beli masyarakat meningkat.

Dalam bidang pendidikan, lembaga pendidikan yang tersedia mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SLTP, Madrasah Tsanawiyah, SMU dan Madrasah Aliyah. Salah satu SD di Kota Tengah menjadi salah satu SD percontohan di Rokan Hulu. Namun sekolah-sekolah lainnya terutama SLTP dan SLTA masih sangat memerlukan perhatian untuk pengembangannya.

Pada umumnya penduduk asli yang ada di Kecamatan Kepenuhan menganut agama Islam yang diwarisi secara turun temurun. Adapun agama lain yang ada di Kecamatan Kepenuhan dianut oleh pendatang dari daerah lain seperti penduduk transmigrasi yang berasal dari daerah Jawa dan pendatang yang berasal dari tanah Batak. Dengan demikian, masyarakat yang mulanya homogen menjadi heterogen.

## C. LATAR BELAKANG KELUARGA KORBAN KDRT

### a. Agama

Mukti Ali (1971:4) pernah mengatakan barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama. Pernyataan ini didasarkan pada tiga alasan. *Pertama*, bahwa pengalaman agama adalah soal batini, subyektif dan sangat Individualis. *Kedua*, barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional dari pada orang yang membicarakan agama. Karena itu setiap pembahasantentang arti agama selalu ada emosi yang melekat erat sehingga kata agama itu sulit didefinisikan. *Ketiga*, konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi itu.

Agama merupakan sebuah kecenderungan dasar manusia untuk memilikinya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan "fitrah". Setiap manusia yang akan ditiupkan rohnya ketika masih berada dalam rahim sang ibu, telah mengadakan perjanjian dengan Allah SWT. *Alastu Bi Rabbikum ? Qaalu Bala Syabidna* (QS. 21: 172). Persaksian ini merupakan proses fitriah manusia yang selalu memiliki kebutuhan terhadap agama.

Meskipun pada dasarnya fitrah manusia beriman, ia mempunyai dua potensi diri, yaitu *fujur* (kejelekan) dan *taqwa* (kebaikan) (QS. 91: 8). Di sini terdapat perbedaan manusia dengan malaikat dan perbedaan manusia dengan iblis. Dua potensi ini pada dasarnya merupakan konsekwensi ajaran *khiyar* (pilihan). Manusia diberi kebebasan untuk memilih baik atau buruk dan Allah SWT akan menyediakan hasil (balasan) dari perbuatannya itu sebagai konsekwensi pilihannya.

Kehadiran agama dalam diri seseorang begitu penting dan urgen karena agama dapat memberi, pedoman dan rambu-rambu kepada manusia apa yang baik dilakukan dan apa yang tidak baik dilakukan. Manusia di samping dianugerahi akal pikiran juga diberi nafsu. Untuk dapat mengendalikan nafsu tersebut manusia harus kembali kepada batas-batas agama, karena agama sudah memberikan batasan yang jelas antara *rusyd* (jalan yang benar) dan *ghayy* (jalan yang sesat)

Untuk dapat menjalankan agama dengan baik diperlukan kesadaran beragama. Kesadaran meliputi rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap dan

tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian (Ahyadi, 1987:37). Tercapainya kematangan kesadaran beragama bergantung pada kecerdasan, kematangan alam perasaan, kehidupan motivasi, pengalaman hidup dan keadaan lingkungan sosial budayanya.

Kurangnya kesadaran beragama dalam diri seseorang diperburuk lagi dengan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agamanya. Pemahaman yang keliru ini seperti menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Hak ini diberikan karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi. Suami adalah pemimpin, pemberi nafkah serta “mempunyai kelebihan-kelebihan” kodrati yang merupakan anugerah Tuhan (Farha Ciciek, 1999:26).

Kesadaran dan pengamalan beragama dalam keluarga kasus yang diteliti masih tergolong rendah. Pak Lubis, suami Bu Izai masih sering meninggalkan sholat fardhu lima waktu, bahkan yang ditinggalkan lebih banyak daripada yang dikerjakan. Demikian juga dengan sholat Jum'at. Bu Izai mengatakan bahwa selama menikah dengannya bisa dihitung berapa kali suaminya sholat Jumat. Bu Izai sendiri dalam kesibukannya mencari kebutuhan hidup menghadapi permasalahan rumah tangga, terkadang masih meninggalkan sholat.

Informan kedua, Bu Inel, tingkat keberagamaannya agak lebih baik dari Bu Izai. Karena tingkat ekonominya menunjang, ia tidak perlu memikirkan masalah ekonomi. Waktunya banyak tersita di rumah. Untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, ia juga masih memanfaatkan tenaga orang lain (pembantu) seperti mencuci pakaian dan menyeterika. Kesempatan Bu Inel untuk menjalankan agama lebih besar. Untuk sholat lima waktu jarang sekali ia tinggalkan (masih ada yang tertinggal dalam kondisi yang sangat sibuk). Ibadah yang lain, seperti puasa dan sedekah juga dilakukannya dengan sepenuhnya. Tetapi jika ada puasa yang batal (karena haid) ia belum mampu meng*qadhanya*.

Bagi Pak Ali, suami Bu Inel, sholat dilakukan bila ada



waktu yang luang. Maksudnya, Pak Ali yang statusnya sebagai “bisnisman” selalu berada di luar rumah. Terkadang ia ikut mengawasi mobil angkutannya jurusan Kota Tengah – Pekanbaru. Dalam kondisi yang sedemikian, ia tidak melakukan sholat. Demikian juga dengan puasa, jika terlalu melelahkan ia tidak puasa.

Demikian juga kesadaran dan pengamalan agama pada Pak Ucok, Pak Mawi dan Pak Darwin, sangat tipis. Terbukti banyak ketentuan agama yang tidak ia ketahui. Demikian juga dengan ibadah sholat, lebih banyak yang ditinggalkan daripada yang dilakukan. Karena tidak ada keasadaran dan tanggung jawab beragama, Pak Ucok membuka tempat perjudian di rumahnya. Rumah yang menjadi tempat tinggal istri dan anak-anak sudah bertambah fungsinya menjadi “sarang” pejudi. Demikian juga Pak Mawi, suami Bu Ida menjadikan rumahnya sebagai tempat berkumpulnya para petagih judi. Di sana mereka menghabiskan waktu, tidak mengenal siang atau malam, dan sering para pejudi itu pulang ketika subuh menjelang (Bu Ida & Bu Izai, 12-11-2004).

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pemahaman dan kesadaran untuk menjalankan agama dalam keluarga kasus yang diteliti masih rendah. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup bagaimana seharusnya kewajiban dan tanggung jawab seorang suami. Jauhnya dari nilai-nilai agama akan mengakibatkan seseorang akan lepas kontrol dan sulit mengendalikan diri.

#### b. Pendidikan

Pendidikan dalam pengertian bahasa disebut proses melatih dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pikiran, prilaku dan lain-lain. Pendidikan secara esensi merupakan proses transver nilai, pengetahuan dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda, agar mereka dapat mampu hidup (Qodri A. Azizy, 2003: 19). Pengertian ini sangat umum dan meliputi pendidikan formal, non formal dan informal. Artinya ini juga meliputi privat antara orang tua dengan anaknya dan publik yang biasanya ditentukan oleh kebijakan politik sesuai dengan sistem yang ada di negara itu.

Ada tiga hal penting yang akan ditransfer melalui pendidikan, yaitu nilai (*values*), pengetahuan (*knowledge*), dan

keterampilan (*skills*). Untuk itu, tujuan pendidikan juga beragam sesuai dengan pandangan dan falsafah hidup suatu bangsa.

Bu Izai, sebagai informan pertama, hanya sempat mengecam pendidikan formal sampai kelas tiga SD. Karena desakan ekonomi yang tidak memungkinkan dan kurangnya motivasi untuk sekolah, Bu Izai putus sampai di situ. Dengan modal sekolah yang kurang dari tiga tahun itu ia dapat mengenali huruf latin dan angka walaupun untuk membacanya harus dicermati betul-betul. Untuk membaca huruf Arab ia tidak bisa termasuk membaca Al-Qur'an. Kemampuannya membaca ayat dan bacaan sholat ia peroleh sebatas kemampuan hapalan. Demikian juga suaminya Pak Lubis, pendidikannya sampai kelas lima Sekolah Dasar. Untung ia dapat menulis, membaca huruf latin dan Al-Qur'an. Namur karena tidak adanya pembiasaan, dalam membaca Al-Qur'an Pak Lubis masih terbata-bata (Bu Izai, 2-12-2004).

Selanjutnya, Bu Inel, Bu Ida dan Bu Asmah sempat menamatkan pendidikannya sampai SD. Lain halnya dengan Pak Ali, ia tidak ada kemauan untuk melanjutkan pendidikannya pada hal ia dari keluarga yang orang tuanya tergolong mampu. Pak Ali hanya mampu untuk menyelesaikan pendidikannya setingkat SD itu pun dengan keterpaksaan dan kemauan yang minim (Bu Inel, 2-10-2004).

Selanjutnya, Bu Imah mengecam pendidikan setingkat SLTA, yaitu SMA di Pasir Pengarayan, lulus tahun 1980. Tamatan SMA pada tahun 1980-an merupakan prestasi yang cemerlang. Bu Imah juga langsung lulus pada ujian seleksi masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada akhir tahun 1980 Bu Imah diangkat menjadi tenaga administrasi (TU) di SLIP Kota Tengah. Ia juga sesekali mengajar di sekolah yang sama pada bidang studi Bahasa Inggris. Tapi suaminya Pak Darwis hanya lulusan Sekolah Dasar.

Lembaga pendidikan formal (sekolah) merupakan bentuk transformasi nilai yang utama. Karena itu tingkat pendidikan formal seseorang sangat mempengaruhi wawasan berpikir. Seseorang yang lulusan SLTA, apa lagi sarjana akan punya wawasan luas dan pandangan hidup masa depan yang lebih terarah dibandingkan dengan orang yang tamatan SD atau SLTP.

Para suami dan istri dalam kasus yang diteliti hanya sebatas tamatan SD dan SLTA, kecuali satu orang, Bu Imah, yang menamatkan SLTA. Dengan demikian rendahnya pendidikan sangat menentukan bentuk manajemen rumah tangga.

c. *Ekonomi*

Islam tidak menutup diri terhadap berbagai kemajuan ekonomi. Islam memandang bahwa pada hakekatnya praktek perekonomian itu menjadi urusan manusia yang terus akan berkembang dari zaman ke zaman. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut (Ajid Thohir, tth.: 344):

1. Islam memandang bahwa harta atau benda ekonomi lainnya bukan hak mutlak manusia.
2. Manusia hanya diberi amanat untuk memelihara harta yang mutlak milik Allah SWT.
3. Islam membolehkan mengambil manfaat dari harta ekonomis melauli cara-cara yang benar.
4. Keberadaan harta itu sebesar-besarnya harus dimanfaatkan untuk kebaikan.

Islam sebagai agama yang inovatif dan kreatif, menganjurkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Pemenuhan ekonomi keluarga yang meliputi pangan, sandang dan papan di tambah lagi pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain tidak mungkin dipenuhi dengan bermalas-malas. Dalam Al-Qur'an dinyatakan: *Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi (berusaha).*

Menurut Farha Ciciek (1999:25), kebudayaan telah mendorong perempuan atau istri supaya bergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Dan salah satu akibatnya, istri sering kali diperlakukan semena-mena sesuai dengan kehendak suami. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemicu tindak kekerasan terhadap istri sering disebabkan karena suami frustrasi ditempat kerja dan tidak mampu mengatasi persoalannya dan dengan sangat mudah melampiaskan kejengkelan pada istri.

Tingkat ekonomi keluarga Bu Izai dapat digolongkan rendah. Suaminya yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak tetap. Kadang-kadang dalam seminggu

diperoleh Rp.100.000 bahkan seringkali kurang. Untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Bu Izai ikut membanting tulang memeras keringat. Bu Izai bekerja apa saja yang mendatangkan uang asalkan halal, seperti sebagai buruh tani, mengambil upah cucian dan bekerja di ladang orang, kadangkala ia mencari sesayuran di dalam hutan seperti daun paku dan daun pucuk *sominyak* untuk dijual (Bu Izai, 24-11-2004).

Rendahnya tingkat ekonomi mereka tercermin dari keadaan rumah yang sederhana. Mereka tinggal di sebuah rumah yang walaupun belum siap betul tapi sudah merupakan milik sendiri. Rumah tersebut berukuran 6 x 10 meter dengan dinding papan, lantai kasar, atap seng dan tidak diplafon. Rumah tersebut kelihatan kurang teratur dan nampak berserakan. Di ruang depan tidak terdapat kursi tamu, hanya sebuah sepeda yang parkir di situ. Di ruang tengah terdapat sebuah TV berukuran 16 inc, VCD dan sebuah almari bofet yang lusuh. Sedangkan di ruang belakang terdapat kulkas. Barang-barang elektronik seperti TV, VCD dan kulkas, semuanya masih dalam masa kredit (penyicilan).

Ketika penelitian ini dilakukan, Bu Izai nampak kurus dan kusut. Di badannya menempel sehelai daster lusuh dan sudah mulai robek. Dengan rambut yang acakan dan mata yang berbinar-binar ia menceritakan menceritakan semua kehidupannya. Boy, anak pertamanya sedang berbaring di dipan yang terletak di ruang tengah. Anak keduanya, Indah tidak berada di rumah. Indah bersiap -untuk menjajakan *paku* (pakis) sepanjang kampung. Anak ketiganya sedang main di depan rumah. Sedangkan anak keempatnya, Tia merengek-rengok minta makan. Keempat anaknya, kecuali Boy, berperawakan kecil, kurus dan sering sakit-sakitan.

Berbeda dengan Bu Inel, taraf ekonomi mereka dapat digolongkan pada tingkat menengah. Profesi Pak Ali, suaminya, sebagai wirausahawan yang bergerak di bidang perkebunan sawit membuat ekonomi mereka semakin terangkat. Di samping itu mereka juga mempunyai mobil angkutan jurusan Kota Tengah - Pekanbaru. Bu Inel tidak merasa ada masalah dengan kebutuhan hidupnya. Bahkan mereka mampu menggaji pembantu rumah tangga untuk

pekerjaan tertentu seperti mencuci dan menyetrika.

Selanjutnya bagaimana keadaan ekonomi Bu Ida? Suaminya juga tidak punya usaha tetap. Jika suatu saat dapat “order” yang lumayan, uangnya hanya sebagian saja yang diberikan kepada Bu Ida, sebagian besar dihabiskan di meja judi. Belanja rumah tangga sangat dibatasi oleh suaminya. Dengan uang Rp. 50.000 perminggu harus cukup untuk biaya semuanya termasuk jajan kedua anaknya (Bu Ida, 13-11-2004).

Himpitan ekonomi juga dirasakan Bu Imah. Kenapa? Suami yang seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga ternyata tidak memenuhi kewajibannya. Gaji dan penghasilan Bu Imah sebagai PNS akhirnya terpaksa digunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Bahkan untuk makan dan rokok, suami sering minta kepada Bu Imah (Bu Imah, 14-10-2004).

Lantas bagaimana dengan ekonomi keluarga Bu Asmah? Dengan berlinangan air mata Bu Asmah menceritakan kisah hidupnya yang memprihatinkan. “Adek bisa lihat dari pakaian yang saya pakai sekarang, penampilan saya sekarang keadaan anak-anak yang kurus. Mereka kurang gizi, tidak ada uang beli susu dan makanan bergizi”, tutur Bu Asmah. Usaha suaminya hanya dengan membuka warung kecil-kecilan di rumahnya. Itupun hasilnya banyak dihabiskan di meja judi. Jangankan mendapat untung, lama kelamaan modal bisa terkuras (Bu Asmah, 14-10-2004).

Dengan demikian kebanyakan yang terjun ke meja judi di Kota Tengah justru dari kalangan ekonomi lemah. Kebiasaan tersebut melekat diawali dengan iming-iming keuntungan besar, ditambah kurangnya etos kerja dan tidak berpikir realistis. Ada juga sebagian dari kalangan ekonomi menengah melakukannya dengan alasan mengisi waktu kosong. Tapi pada dasarnya, judi merupakan perbuatan setan yang apabila seseorang coba-coba untuk mendekatinya apalagi bermain-main dengannya, akan menjadi ketagihan yang sulit untuk ditinggalkan.

d. *Sosial Budaya*

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain untuk menemani dan menjalani hidup bersamanya. Hidup bersama tersebut dinamakan “bermasyarakat”. Hubungan seseorang dengan anggota masyarakat dipengaruhi oleh aspek-aspek lain seperti budaya, pendidikan, pengalaman, terlebih pemahaman keagamaan (Zahrudin AR, 2004: 134).

Antara Sosial dan budaya merupakan dua hal yang saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Kehidupan sosial suatu masyarakat akan membentuk sebuah budaya. Demikian juga budaya seseorang atau suatu masyarakat akan tecermin dalam hubungan sosialnya. Seperti pendapat Van Peursen (1985:5) dalam bukunya yang berjudul *Strategi Kebudayaan*, bahwa kebudayaan merupakan proses belajar yang mempunyai wujud tertentu. Wujud kebudayaan selain sebagai kompleksitas ide, gagasan, nilai, dan norma, maupun sebagai peraturan, juga mencerminkan pola tingkah laku dalam masyarakat yang terjadi karena ekspresi atau manifestasi hasil proses belajar. Ekspresi ini juga terwujud dalam hasil karyanya sebagai buah budi dayanya.

Adanya fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan sama dalam masyarakat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya masyarakat percaya bahwa lelaki berkuasa atas perempuan, suami berkuasa atas istri. Istri sepenuhnya milik suami sehingga harus selalu berada dalam kontrol suami. Jika istri “keliru” menurut cara pandang suami, maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri segera “kembali ke jalan yang benar”. Termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan. Demikian juga cara mendidik dan membesarkan anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Anak laki-laki dilatih untuk berani, kuat, tahan banting serta berkuasa atas dirinya dan orang yang berada di sekelilingnya.

Persoalan KDRT tidak dianggap sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami dan istri. Orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang dengan sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja “menutup

mata” terhadap KDRT yang lazim terjadi. Buktinya, jika seseorang perempuan yang tak dikenal diserang di jalan oleh seorang laki-laki, maka masyarakat berupaya menolongnya. Tetapi jika diketahui yang menyerangnya itu adalah suaminya, masyarakat lalu meninggalkan mereka. Sikap inilah yang mengakibatkan kejahatan dalam rumah tangga terus berlangsung (Farha Ciciek, 1999:27)

Paradigma dan budaya yang terdapat dalam masyarakat yang menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki tersebut perlu diluruskan. Demikian juga penafsiran dan interpretasi terhadap ajaran agama perlu diperbaharui agar sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri yang sesungguhnya menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Dalam keluarga-keluarga yang diteliti masih terlihat budaya bahwa laki-laki adalah pemegang tampuk keluarga. Semua keputusan suami yang menentukannya, sang istri tinggal mengiyakannya.

#### **D. BENTUK-BENTUK KDRT YANG TERJADI PADA RESPONDEN**

Definisi KDRT menurut UUD PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita fisik, seksual, psikologis penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Farha Ciciek, 1999:27). Ia bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh suami.

KDRT, khususnya penganiayaan istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai temuan penelitian memastikan bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan istri saja, tetapi ia akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat juga.

Berbagai bentuk dan tindak kekerasan yang dilakukan, jika ditelusuri secara seksama, ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian memperlihatkan bahwa 50 % sampai 80 % laki-laki yang memukul istri atau anak-anak ternyata

dibesarkan dalam rumah tangga yang ayah memukul ibunya. Ironisnya, mereka menganggap bahwa penganiayaan adalah sesuatu yang wajar (Kalyanamitra, 1999:28).

Penganiayaan terhadap istri sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang bersifat badani seperti menampar, menggigit, memukul, menendang, membentur ke tembok sampai membunuh. Ada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, mengecilkan istri, sampai membatasi ruang gerakannya. Penganiayaan ekonomi seringkali diterima istri dalam rumah tangga. Pembatasan pembiayaan rumah tangga yang di luar batas minimal berdampak juga pada penganiayaan psikologis.

Selain penganiayaan fisik dan mental, kaum istri kerap kali mengalami penganiayaan seksual pula. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap melakukannya, hubungan seksual yang diiringi dengan penyiksaan atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri (Farha Cicik, 1999:27).

Adapun bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan pada kasus yang diteliti adalah sebagai berikut:

*a. Kekerasan Psikologis*

Kekerasan psikologis merupakan kekerasan terberat yang dialami oleh seluruh ibu-ibu dalam kasus yang diteliti, mulai dari Bu Izai, Bu Inel, Bu Ida, Bu Imah dan Bu Asmah. Akibat kebiasaan judi sang suami, keutuhan rumah tangga menjadi berantakan. Serentetan penderitaan lainnya akan bermunculan saling tumpang tindih.

Beban psikologis yang mereka rasakan berupa penderitaan karena menanggung beban malu dengan masyarakat sekitar akibat sikap suami. Demikian juga kasih sayang dan perhatian tidak sepenuhnya lagi tercurah pada keluarga. Karena keasyikan di meja judi suami lupa waktu dan tidak pulang semalaman. Hal ini menyakitkan hati istri yang senantiasa menunggu kehadiran suami.

Karena tidak mampu menahan diri, suatu hari Bu Inel (informan ke 3) pergi menemui suaminya di tempat perjudian setelah tiga hari tidak pulang. Dengan rasa marah dan kesal yang



tinggi Bu Inel pergi sambil membawa sebilah pisau dapur. Dengan marah Bu Inel menghampiri suaminya dan mengacungkan pisau tersebut ke arah suami (Bu Inel, 2-10-1994).

Apa yang terjadi? Apakah suami insaf dari perbuatannya? Ternyata tidak. Tidakan Bu Inel yang sedemikian dinilai oleh suami sebagai tindakan kedurhakaan, istri berani melawan kepada suami. Akhimya suami menceraikan Bu Inel dengan menjatuh talak satu (Bu Inel, 2-10-1994). Kejadian tersebut tidak diduga sama sekali terjadi. Terpaksa Bu Inel dan kedua anaknya mengungsi ke rumah orang tuanya. Penderitaan batin bertambah dalam dialami Bu Inel dengan kasus perceraian tersebut. Bagaimana nasib kedua anaknya tidak bisa dibayangkannya sementara dirinya tidak punya usaha dan penghasilan.

Setelah berselang beberapa bulan, pihak keluarga bermaksud mendamaikan kedua belah pihak. Akhirnya antara Bu Inel dan suami rujuk kembali, dengan syarat istri tidak boleh ikut campur dalam apapun yang dilakukan suami termasuk jika ia berjudi. Walau dengan berat hati, Bu Inel terpaksa menerima persyaratan tersebut karena ketergantungannya pada suami.

Ini merupakan sebuah kekerasan psikologis yang dalam. Sampai saat ini Bu Inel pasrah dengan keadaan dan tidak pernah ambil pusing dengan perilaku suaminya. Hanya saja terkadang dari pihak keluarga suaminya sendiri seperti ayah, ibu, abang dan adik-adiknya sering mengingatkannya dan mendatangkinya ke tempat judi apabila sudah berhari-hari tidak pulang.

Demikian juga dengan Bu Ida, setelah menikah sampai usia perkawinannya 3 tahun (sampai lahirnya anak kedua), keluarga Bu Ida tinggal bersama orang tuanya. Orang tua Bu Ida sering mengeluh atas perilaku menantunya. Dia tidak habis pikir kenapa anaknya begitu sabar atas segala ulah menantunya. Beberapa kali peselisihan dan persengketaan antara orang tua dan suami Bu Ida. Orang tua Bu Ida bermaksud mengingatkan menantunya agar lebih serius mencari nafkah dan hasilnya jangan digunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. -Di samping itu, dekatkanlah diri kepada Allah SWT dan berdoalah kepadaNya, karena dialah memberi rizki. Hal ini disampaikan oleh orang tua Bu Ida karena jarang sekali melihat menantunya sholat. Sholat lima waktu lewat begitu saja, hanya sekali-sekali

ia lakukan, sedangkan sholat Jum'at bisa dikatakan sekali satahun.

Nasehat dan maksud baik orang tua Bu Ida disambut negatif oleh sang menantu. Ia mengira orang tua Bu Ida tidak ikhlas mengizinkan mereka tinggal di rumahnya. Untuk itu Bu Ida dan anak-anaknya di boyong oleh suaminya ke rumah orang tua suaminya. Bu Ida mengikuti kehendak suaminya dan tinggal di rumah mertua. Apa yang terjadi? Karen sikap sang suami tidak berubah, orang tua sendiri tidak betah dengan sikap anaknya. Mereka hanya bertahan tinggal di sana selama 6 bulan. Akhimya mereka kembali ke rumah orang tua Bu Ida (Ramli, 15-10-2004)

Informan ke empat, Bu Imah menganggap bahwa beban psikologis adalah penderitaan terberat. Status Bu Imah sebagai guru di salah satu SLTP Kota Tengah menuntutnya untuk menjadikan dirinya dan keluarga sebagai suri tauladan. Namun Bu Imah tidak berdaya menghadapi kebiasaannya suaminya. Berulang kali Bu Imah mencoba mencegah dan memberikan masukan kepada sang suami, namun tidak digubris sedikitpun. Bahkan setiap kali Bu Imah melarang suami, pertengkaran pun terjadi.

Terlebih lagi Bu Asmah. Rumahnya yang ditambah fungsi oleh suaminya dengan menggunakannya sebagai tempat berkumpul para penjudi, menjadi beban psikologis yang mendalam. Bu Asmah tidak mampu berbuat apa-apa. Walau dengan perasaan batin yang memberontak ia terpaksa menerima kenyataan bahwa rumahnya adalah sarang pejudi. Bu Asmah sendiri berasal dari latar belakang pendidikan agama yang kuat dan menjalankan agama dengan teguh. Sebelum menikah ia terkenal aktif di berbagai organisasi kegamaan di Kota Tengah. Tetapi setelah menikah, Bu Asmah berubah 180 derajat karena terpesok dengan kebiasaan dan keotoriteran suami.

Penderitaan batin yang dialami Bu Asmah terpancar dari wajahnya yang kurus, kusut dan menggambarkan penuh beban. Ditambah lagi dengan mengurus kedua anaknya yang masih kecil-kecil sementara suami tidak mau peduli. Untunglah Bu Asmah punya ibu yang begitu memperhatikan dan peduli kepadanya. Hampir setiap hari ia mampir ke rumah ibunya yang kebetulan berada tidak begitu jauh dari rumahnya. Di sana ia lebih merasa ada tempat untuk berbagi, terutama dalam mengurus anak-anaknya.

*b. Kekerasan Ekonomi*

Akibat kebiasaan judi sang suami, Bu Izai, Bu Ida, apalagi Bu Asmah menanggung beban ekonomi yang berat. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi keluarga yang pada mulanya sudah sangat sederhana ditimpa dengan musibah kebiasaan judi sang suami, ekonomi keluarga menjadi semakin sulit. Dulunya, walaupun sedikit uang diperoleh, tetapi semuanya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Namun sejak kebiasaan judi sang suami, lebih banyak penghasilan suami tersita untuk berjudi, ditambah lagi kurangnya waktu untuk berusaha, karena keasyikan di meja judi. Dengan ketagihan judi, sang suami sering berbohong kepada istn tentang kemana ia pergi dan berapa penghasilan yang ia dapatkan. Kejujuran yang selama ini di bina lenyap begitu saja. Dari penghasilan yang didapat suami hanya sepertiga yang diberikan, dan bahkan kadang--kadang tidak ada sama sekali.

Bu Izai sendiri yang sejak awal juga ikut menopang biaya kebutuhan rumah tangga agar meringankan beban suami, paling tidak untuk kebutuhan sendiri, jajan anak-anak dan membeli perabotan rumah tangga, harus lebih keras membanting tulang demi makan dan kebutuhan anak-anak. Jangankan menerima uang dari suami, Bu Izai sendiri pernah menerima tagihan hutang suaminya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Ketika ditanya untuk apa uang sebanyak itu dihabiskan, suaminya berkilah hutang itu untuk biaya belanja rumah tangga. Bu Izai terpaksa membayar hutang tersebut dengan cara mencicilnya (Bu Izai, 14-10-2004).

Himpitan ekonomi juga sangat dirasakan oleh Bu Ida, karena ia sepenuhnya menggantungkan hidup kepada suami. Ia tidak "pandai" dan tidak punya usaha apa-apa. Sementara suaminya juga tidak punya usaha tetap. Jika suatu saat sang suami mendapat "order" yang lumayan, uangnya hanya sebagian saja yang diberikan kepada istri, sebagian besar dihabiskan di meja judi. Belanja rumah tangga sangat dibatasi oleh suaminya. Dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perminggu harus cukup untuk biaya semua kebutuhan rumah tangga termasuk jajan kedua anaknya –yang dalam usia tidak mau tau apakah sang ibu punya uang atau tidak–. Dan tidak jarang uang yang hanya Rp 50.000 itu dikurangi (Bu Ida, 14-11-2004).

Lantas bagaimana dengan ekonomi keluarga Bu Asmah?

Dengan berlinangan air mata, Bu Asmah menceritakan kisah hidupnya yang memprihatinkan. *“Adek bisa lihat dari pakaian yang saya pakai sekarang, penampilan saya sekarang, keadaan anak-anak yang kurus. Merekakurang gizi, tidak ada uang beli susu dan makanan bergizi.”*

Dari ungkapan Bu Asmah di atas menggambarkan ketertindasan dan ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi suaminya. Bu Asmah harus pasrah dalam ketidakberdayaan tersebut. Bu Asmah pernah bercerai dengan suaminya akibat kekerasan yang dilakukan suaminya pada Desember 2003. Dengan perundingan dan beberapa kesepakatan keduanya ruju' kembali pada Januari 2004 (Amiruddin, 14-10-2004). Permintaan ruju' dari suami di terima Bu Asmah karena Bu Asmah merasa tidak sanggup membelanjai anak-anaknya dan juga dengan harapan rumah tangganya dapat kembali harmonis.

Keharmonisan itu berlalu singkat sekali. Dua bulan berikutnya suaminya kembali kepada kebiasaan lamanya, kembali ke meja judi dan menjadikan rumahnya sebagai pusat perjudian.

c. *Kekerasan Fisik*

Kekerasan fisik yang dialami ibu-ibu pada kasus yang diteliti, sebenarnya berawal dari kekerasan psikologis dan ekonomis. Sang istri menanyakan atau bahkan mendatangi tempat mangkal suami berjudi. Hal ini menjadi kemarahan suami yang mengakibatkan pertengkaran, percekcoan yang akhirnya sampai pada kekerasan fisik.

Bu Izai misalnya, sudah berusaha untuk menyadarkan dan menghentikan sang suami dari kebiasaan buruknya tersebut, tetapi ternyata sia-sia. Ajakan dari teman-temannya sesama pejudi lebih kuat untuk mendorongnya terus maju ke meja judi. Berulang kali Bu Izai mendatangi suaminya di meja judi untuk diajak pulang. Terkadang sang suami mau pulang dan terkadang acuh saja bahkan dihujani dengan kata-kata yang menyakitkan. Begitu juga setelah sampai di rumah tidak jarang percekcoan dan perkelahian terjadi. Semua kata yang tidak baik keluar dari mulut suami dan bahkan juga sampai pada kekerasan fisik.

Kesabaran Bu Izai sudah berada pada titik kulminasi. Pada hari diadakannya pemilihan umum untuk memilih calon legislatif tahun 2004, perkelahian terjadi antara Bu Izai dan suaminya. Sang suami marah karena Bu Izai terus “mengomel” dengan perilaku

judinya. Barang-barang yang ada di rumah dihancurkan, bahkan Bu Izai sendiri ingin ditampar tetapi tidak kesampaian. Akhirnya Bu Izai keluar dan pergi dari rumah sampai tiga hari.

Ketika Bu Izai tidak berada di rumah, suaminya pulang bukan untuk memperbaiki tingkah lakunya, tetapi membuat tindakan kriminal lainnya. Ia membongkar tempat simpanan uang Bu Izai dan berhasil menemukan satu bentuk cincin mas seberat satu mas yang sengaja disimpan Bu Izai untuk berjaga-jaga demi keperluan keluarga. Untuk bisa membeli satu cincin itu bagi Bu Izai sudah susah payah dengan mengumpulkan tabungan dalam waktu yang cukup lama. Seenaknya sang suami mengambil dan membawa kabur cincin tersebut. Uangnya dimakansendiri dan tentunya juga banyak tersita di meja judi.

Kejadian tersebut sangat mengecewakan dan menyakitkan Bu Izai. Ia tidak menyangka sedikitpun orang yang masih berstatus sebagai suaminya tega berbuat sekejam itu pada dirinya. Sejak hari itu sampai saat penelitian ini dilakukan, suami Bu Izai pergi entah kemana. Ia tidak pernah mengirim berita, apalagi mengirim belanja kepada istri dan anak-anaknya. Bu Izai sendiri juga tidak ada keinginan untuk mencari tau di mana suaminya berada. Rasa kesal, kecewa dan marah tersimpan jauh dalam lubuk hatinya.

Dengan fisik yang kurus lagi lesu, Bu Izai menceritakan segala pengalaman pahitnya kepada peneliti sambil berlinangan air mata. Rasa haru dan simpati yang mendalam bagi peneliti ketika mendengarkan kisah yang dialami Bu Izai. Tidak jauh berbeda dengan nasib Bu Izai, Bu Ida mengalami berbagai kekerasan sebagai dampak judi sang suami. Mulai dari kekerasan psikologis, ekonomi sampai pada kekerasan fisik. Sehingga tidak mengherankan ada perubahan pada diri Bu Ida yang dulunya terkenal ceria jadi pemurung dan fisiknya terlihat kurus.

Demikian juga Bu Asmah dan Bu Inel. Pernah merasakan tamparan sang suami akibat percekocokan karena suami terus berjudi. Mereka hanya dapat mengadukan permasalahan mereka kepada keluarga dan *ninik mamak* (sesepuh adat). Ninik mamak berusaha mendamaikan pasangan suami istri tersebut dengan syarat adanya introspeksi dari masing-masing pihak. Demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak, ibu-ibu ini merelakan penderitaannya dan tetap berharap dan berdo'a agar suaminya sadar.

## E. UPAYA PENANGGULANGAN KDRT

Para Ibu korban kekerasan tersebut telah berusaha untuk melarang, mengajak dan menasehati suami untuk meninggalkan kebiasaan judi, namun semua itu tidak membuahkan hasil. Para suami tidak berubah, malah bersikap lebih kasar.

Menurut Farha Ciciek (1999:22), umumnya para istri yang menjadi korban kekerasan suami dalam rumah tangga cenderung diam dan mencoba bertahan, karena beberapa hal:

a. *Takut pembalasan suami*

Banyak istri yang diancam dengan penganiayaan yang lebih kejam, bahkan pembunuhan jika mereka berupaya meninggalkan rumah tangga atau melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada orang lain, apalagi kepada polisi.

b. *Tidak ada tempat berlindung*

Banyak istri bergantung secara ekonomi kepada suami, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mencoba bertahan dalam derita yang berkepanjangan.

c. *Takut dicerna masyarakat.*

Banyak perempuan takut dicap sebagai perempuan tidak baik karena diketahui sebagai korban kekerasan akibat didera suami. Sebagian tidak siap dengan status sosial sebagai janda, karena masyarakat menganggapnya rendah.

d. *Rasa percaya diri rendah*

Akibat penganiayaan, baik jasmani, rohani maupun seksual, istri merasa tidak berarti dan tidak percaya mempunyai kepercayaan untuk mengatasi masalah.

e. *Untuk kepentingan anak*

Istri khawatir anak-anak akan mengalami penderitaan yang lebih buruk berpisah dari ayah mereka.

f. *Istri masih mencintai suami*

Mereka mendambakan berhentinya kekerasan, bukan putusnya perkawinan. Mereka berharap terus menerus agar suaminya berubah, menjadi baik kembali.

g. *Mempertahankan perkawinan*

Banyak istri yang percaya bahwa perkawinan itu

sesuatu yang luhur dan perceraian adalah sesuatu yang buruk sehingga harus dihindari. Mereka menganggap lebih baik tetap menderita dalam perkawinan daripada bercerai karena tahu atau “dilarang agama”.

Untuk mengatasi masalah KDRT di berbagai belahan dunia, baik masyarakat maupun negara telah mencoba membangun sistem penanganan masalah kekerasan secara umum dan KDRT secara khusus. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengawali usaha ini dengan menyetujui konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (Convention the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1979) (Jurnal Perempuan, 2003: 7).

Berikutnya dunia internasional telah bertekad untuk menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan dibuatnya deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang disepakati dalam konferensi HAM di Jenewa tahun 1993. Dalam deklarasi tersebut juga menuntut masyarakat untuk turut bertanggung jawab terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan (Farha Ciciek, 1999: 38).

Di Indonesia, usaha senada juga telah mulai dikembangkan. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi CEDAW tahun 1984 dengan tanggung jawab pelaksanaannya pada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Bentuk perhatian lain adalah dengan mendirikan berbagai pusat pelayanan perempuan korban kekerasan. Diantara layanan yang diberikan adalah memberikan konsultasi melalui telepon (*hotline*), mengupayakan pendampingan psikologis serta memberikan bantuan media dan pendampingan hukum. Diantara lembaga tersebut ada juga yang menyediakan tempat singgah (*shelter*) bagi korban yang memerlukan.

Lembaga bantuan hukum yang mengkhususkan diri menangani persoalan perempuan hadir untuk mendampingi korban guna mengupayakan pembelaan secara hukum. Dalam proses ini korban akan mendapatkan penjelasan tentang berbagai kemungkinan untuk mengatasi permasalahannya secara hukum. Jika dibutuhkan pengacara LBH juga mendampingi korban dalam proses pengadilan. Dengan berbagai upaya mengatasi KDRT terlebih lagi memberikan pemahaman kepada korban bahwa KDRT yang dialaminya bukan

sebatas masalah “keluarga” tapi sudah menyangkut masalah publik (hukum), KDRT paling tidak dapat diminimalisir.

## F. PENUTUP

Perjudian merupakan salah satu perbuatan yang dilarang baik oleh norma agama maupun norma susila dan hukum negara. Hal ini disebabkan karena judi banyak membawa kemudaratn. Salah satu kemudaratn yang langsung dan segera adalah terhadap keharmonisan antara suami—istri dan anak-anak dalam rumah tangga.

Dari keterangan tentang latar belakang keluarga kasus yang diteliti, ternyata umumnya suami yang terjun ke meja judi lebih disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap ajaran agama. Hal ini diperburuk lagi dengan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga mereka tidak punya wawasan dan cara pandang yang jauh ke depan. Sedangkan untuk taraf ekonomi rendah atau tinggi tidak terlalu mempengaruhi. Orang yang tingkat ekonominya tinggi masih ada yang bergelimang di meja judi dengan alasan hoby, iseng dan mengisi waktu kosong. Demikian juga orang yang tingkat ekonominya rendah banyak juga yang bergelut dengan judi dengan alasan ingin meraih keuntungan besar, pada hal karena kurangnya etos kerja dan tidak berpikir realistis.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh istri yang suaminya punya kebiasaan berjudi yang lebih berat dirasakan adalah kekerasan psikologis. Istri menanggung beban batin akibat hubungan antara suami dan istri tidak harmonis. Perhatian tidak maksimal percekcoakan sering terjadi dan kegelisahan selalu menjelma. Beban psikologis ini semakin berat jika ditambah dengan kekerasan ekonomi yang menghimpit. Kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, kebutuhan anak terbelengkalai termasuk biaya sekolah anak-anak.

Akibat kekerasan psikologis dan ekonomis, kekerasan fisik mulai muncul. Istri selalu menuntut suami dan mempertanyakan bagaimana tanggung jawabnya, sedangkan suami malah marah lalu bertindak kasar terhadap istri. Kekerasan demi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sering kali berakhir dengan perceraian-. Berbagai usaha telah dilakukan istri untuk merubah



kebiasaan suami berjudi sebagai pangkal ketidak harmonisan. Istri sudah mencoba mengingatkan mulai dengan cara yang paling lembut sampai pada tingkat pertengkaran. Namun semua itu tidak membuahkan hasil bahkan kerugian di pihak istri seperti adanya kekerasan fisik. Pihak keluarga, orang tua dan saudara juga sudah berupaya mengingatkan, namun tidak ada perubahan.

Harapan besar yang dapat mengatasi semua permasalahan di atas adalah dengan peran aktif pemerintah setempat termasuk aparat kepolisian. Jika aparat kepolisian sebagai penegak hukum telah bertindak, antara lain dengan cara memusnahkan tempat perjudian tersebut, besar kemungkinan praktek perjudian dapat diatasi. Dengan demikian, suami akan kembali ke rumahnya dan membangun hubungan yang harmonis dengan istri serta anak-anak tanpa kekerasan.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabir El-jazair, 1990. “Minhaj al–Muslim”, Terj. Rachmat Djatnika Dkk, *Pola Hidup Muslim*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Abdul Aziz Ahyadi, 1987. *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*, Sinar Baru Algensido, Bandung.
- A. Qodd A. Azizy, 1990. *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial*, Aneka Ilmu, Semarang
- Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Islam*
- Farha Ciciek, 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LKAJ, Jakarta
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2003. *Jurnal Perempuan* No 26
- Sayyid Sabiq, 1993. *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, PT. Al-Ma’arif, Bandung
- Sri Sanituti Haridadi. 1995. “Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita dalam Keluarga” dalam T. Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Van Peursen, 1985. *Strategi Kebudayaan*, Kanisius, Jakarta
- Zahrudin AR, dkk. 2004. *Pengantar Studi Akhlak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

# *KDRT terhadap Perempuan dan Penyelesaiannya Versi Pengadilan Agama*

---

Sofia Hardani

---

## A. PENDAHULUAN

Sejak dahulu kala, manusia membangun rumah yang berfungsi untuk tempat berlindung dari kekerasan alam, baik dari cuaca, binatang, maupun dari manusia sendiri. Demikian juga, dalam normalitas kemanusiaan, orang membangun rumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang tenang dan bahagia dalam suasana *mawaddah wa rahmah*, dan kekal. Ketegangan maupun konflik yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah terjadi karena bersatunya dua orang yang berasal dari dua latar belakang yang berbeda, baik latar belakang kebiasaan, tabiat, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan pemukulan terhadap istri, selama ini juga dianggap hal yang wajar. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, orang menyadari bahwa tindakan sewenang-wenang dari suami kepada istrinya adalah pelanggaran hak azasi perempuan.

Kesadaran akan perlunya pembelaan hak perempuan dari perlakuan kekerasan yang diterima di dalam rumah, tempat yang seharusnya berfungsi sebagai perlindungan dari kekerasan, dalam skala internasional dinyatakan dengan adanya Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Nairobi tahun 1985, dilanjutkan dengan Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) serta Beijing Platform for Action (BPFA) tahun 1995.

Indonesia sebenarnya telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sejak tahun 1984. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun intensitas kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat. Menurut LSM Mitra Perempuan, dari tahun 2002 hingga 2003 kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Pada tahun 2002 jumlah kasus KDRT hanya 226, dan pada tahun 2003 menjadi 272 kasus. Dari data tersebut kasus KDRT berarti meningkat 20.35% (Riau Pos, 17-5-2005). Data yang dihimpun oleh Badan Kesejahteraan Sosial Propinsi Riau menunjukkan bahwa dalam bulan Januari sampai Juni 2006, dari 93 kasus kekerasan yang dilaporkan (ke pihak kepolisian) terdapat 56 kasus (60,22 %) adalah Kekerasan Dalam Rumah

Tangga. Angka tersebut diyakini akan berlipat ganda jika semua kasus tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikhis, dilaporkan.<sup>1</sup>

Oleh karena Konvensi ini belum begitu efektif melindungi perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka pada tahun 2004 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sampai sekarang ini masih terus disosialisasikan.

Berbagai survey dilakukan untuk mengungkapkan kasus-kasus KDRT yang masih terjadi. Akan tetapi, ada sumber data yang tak kalah pentingnya yang luput dari perhatian, yaitu kasus-kasus yang menjadi penyebab gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Pekanbaru, menurut Drs. Ahmad Anshari, Humas PA Pekanbaru (2006), lebih dari 50 % gugatan perceraian diajukan dengan alasan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Selebihnya merupakan gugatan dengan alasan lainnya (kekerasan psikhis), seperti perselingkuhan suami, suami tidak memberikan nafkah, suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama, tabiat suami yang tidak baik seperti suka berjudi, mabuk, pencandu narkoba, dan sebagainya. Perlakuan kekerasan terhadap istri, khususnya kekerasan fisik, menurut Anshari dan Dra. Hj. Mursyidah, Panitera PA Pekanbaru (2006), biasanya lebih terungkap didalam persidangan, karena di dalam surat gugatan kebanyakan penggugat hanya mencantumkan alasan gugatan karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga, atau karena seringnya terjadi percekocan.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Mengacu kepada pengertian dan kriteria Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang diatas, maka

dapat dinyatakan bahwa semua kasus gugatan perceraian adalah disebabkan tindakan kekerasan terhadap istri, yang meliputi kekerasan fisik maupun kekerasan psikhis.

Di dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan diikat sebagai ikatan yang suci dan sakral untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Q.S. Ar-Rum: 21). Oleh karena tujuan yang suci tersebut, tindakan kekerasan terhadap istri, apapun bentuknya, adalah melanggar prinsip ajaran Islam (Lihat QS, II:19).

Apabila tujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak dapat dilakukan, sering terjadi pertengkaran yang diwarnai kekerasan fisik maupun psikhis, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Meski perceraian adalah sesuatu yang dilarang dan dibenci Allah, akan tetapi dibolehkan sebagai “pintu darurat” demi kemaslahatan dan menjaga hak-hak masing-masing pihak dalam keluarga. Hal ini dapat dipahami melalui QS. Al-Nisa’ ayat 34, 35, dan 128, Al-Baqarah ayat 228 dan 229, dan Al-Ahzab ayat 49.

Berdasarkan kenyataan diatas, penting artinya dilakukan kajian yang mendalam, dalam bentuk penelitian. untuk mengungkap lebih jauh bagaimana kondisi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan telah mempengaruhi tingkat perceraian masyarakat Pekanbaru.

Ada dua permasalahan pokok yang diungkapkan dalam penelitian ini, yaitu: sejauhmana KDRT terhadap perempuan mempengaruhi tingkat pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan bagaimana penyelesaian kasus gugatan perceraian karena KDRT versi Pengadilan Agama.

Dengan mengungkapkan kenyataan problematika relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang jelas mengganggu dan bahkan dapat mengancam kelanggengan rumah tangga, dapat disusun langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga, dan pada gilirannya akan mewujudkan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga dan memperkecil angka perceraian. Penelitian ini juga akan besar manfaatnya dalam memberikan pemahaman yang benar terhadap relasi suami istri

dalam rumah tangga serta pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ajaran Islam.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini pada prinsipnya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, sumber primer data yang dibutuhkan adalah dokumen-dokumen dan berkas-berkas gugatan perceraian yang beralasan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai sumber data sekunder adalah para hakim dan panitera yang memproses sidang gugatan tersebut dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data-data dari bahan dokumen yang ada di Pengadilan Agama dikumpulkan untuk mempelajari kasus-kasus kekerasan apa saja yang dialami perempuan (istri) sehingga ia memutuskan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, demikian juga data tentang proses dan penyelesaian perkara. Mengingat banyaknya jumlah gugatan yang masuk, dan tidak mungkin melakukan penelitian satu persatu, diambil data bulan Januari sampai Juni 2006 dan Januari sampai Juni 2007. Dari data yang terkumpul diambil sampel kasus secara acak sebanyak 10 %. Sampel tersebut selanjutnya dikelompokkan lagi sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.

Untuk melengkapi data yang diperlukan, dilakukan wawancara (interview) dengan para hakim serta panitera yang memproses sidang gugatan perceraian yang disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Data-data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori dan persamaan jenis dan diuraikan serta dibandingkan antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti, kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah umum tentang permasalahan tersebut.

## C. PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

### 1. Pengertian dan Dasar Kebolehan Perceraian

Pada prinsipnya, perkawinan adalah ikatan yang sakral dan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan ini diatur secara terhormat oleh Allah SWT untuk mengembangkan keturunan dan menjaga kelangsungan kehidupan di alam ini, untuk memelihara dan menjaga naluri sex yang tidak terkontrol, memelihara keturunan yang baik, dan menjaga agar kaum perempuan tidak dijadikan sebagai objek sex sebagaimana hubungan biologis pada binatang.

Sebuah perkawinan dilaksanakan atas nama Allah berdasarkan suka sama suka dengan ucapan *ijab-qabul* dan dihadiri oleh para saksi. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Akan tetapi, banyak hal yang dapat terjadi di dalam sebuah perkawinan. Perbedaan pandangan, kebiasaan, prinsip dan sebagainya, yang tidak berhasil disatukan, dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berakibat kepada konflik dan keretakan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Perceraian sinonim dengan kata *thalaq* (bahasa Arab) yang diartikan dengan “perpisahan suami-istri” atau “putus hubungan sebagai suami isteri.” (Poerwadarminta, 1984:201). Kata-kata *talak* lebih populer daripada kata-kata ‘cerai’ di dalam buku-buku fikih yang dijadikan dasar atau rujukan oleh Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara. Oleh karena itu, dalam tulisan ini kedua kata tersebut dipakai tanpa membedakan makna dan arti.

Menurut istilah syara', *talak* berarti melepaskan ikatan perkawinan dan bubarnya hubungan suami istri (Sayyid Sabiq, tth:206), atau melepaskan ikatan perkawinan seketika itu atau untuk masa yang akan datang (Abu Zahrah, 1957:248; Ad-Dzahaby, 1968:243) dengan ucapan (*lafaz*) yang khusus atau sindiran (*kinayah*) (Ad-Zhahaby, 1968:243). Abu Zakaria al-Anshariy mendefinisikan *talak* dengan ‘melepaskan ikatan



akad nikah dengan kata-kata “talak” atau kata-kata yang serupa (Al-Anshary, tth.:72). Djamil Latif mengartikan *talak* dengan melepaskan (seperti melepaskan seekor burung dari sangkarnya, atau melepaskan seekor binatang dari rantainya). Dengan demikian, *mentalak* istri berarti membebaskan istri dari ikatan perkawinan (Djamil Latif, 1982:80).

Selanjutnya, Djamil Latif membedakan pengertian talak dalam pengertian yang umum dan dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang umum, *talak* berarti setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami kepada istrinya, baik menggunakan kata-kata yang jelas (*sharih*) atau dengan kata-kata sindiran (*kinayah*). Talak dalam pengertian yang sempit berarti perceraian yang timbul karena kata-kata “talak”, umpamanya yang diucapkan suami secara jelas atau sindiran, yang maksudnya melepaskan atau membebaskan istrinya dari ikatan perkawinan.

Menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian berarti terputusnya ikatan perkawinan dengan sebab-sebab tertentu. Perceraian baru dianggap sah apabila diucapkan di depan sidang pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (UUPA, pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).

Hal ini sekilas berbeda dengan ketentuan Islam, bahwa talak dapat dinyatakan sah segera setelah suami mengucapkan kata-kata “talak’ kepada istri. Kedua hal ini dapat dikompromikan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami harus disahkan oleh hakim untuk menghormati lembaga perkawinan agar pihak suami maupun istri tidak menganggap masalah perceraian sebagai masalah yang sepele. Hal ini sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu “mempersulit terjadinya perceraian.”

Prinsip undang-undang tersebut sesungguhnya juga berdasarkan pada prinsip Islam, bahwa perceraian pada prinsipnya dilarang, dan sangat dibenci Allah SWT. Hal ini berdasarkan pada Sabda Nabi saw.: “*Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian*” (HR Abu dawud, Ibn Majjah, dan Al-Hakim dari ‘Umar) (as-Suyuti, Juz I, tth.:5). Akan tetapi, jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, perceraian dibolehkan sebagai

alternatif terakhir setelah diupayakan berbagai cara untuk mempertahankan rumah tangga tersebut.

Dasar kebolehan perceraian dapat ditemukan dalam firman Allah SWT, antara lain, dalam Surat An-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَاتٍ زَوْجٍ

"dan jika kamu ingin mengganti istri-istimu dengan istri yang lain..." (QS. 3:20)

Surat Al-Baqarah ayat 228:

"Apabila kamu mentalak istri-istimu lalu mereka mendekati 'iddahnya, maka rujuklah dengan cara yang baik (ma'ruf) atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik... (QS. 2:228)

Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَنِ

"Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu ia boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf..." (QS. 2: 229)

Dalam salah satu hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Ibn 'Umar disebutkan bahwa seseorang pada masa Rasulullah menceraikan istrinya, ketika itu istrinya dalam keadaan haid, maka ia bertanya kepada Rasulullah tentang kebolehan hal tersebut. Rasulullah saw bersabda: "Perintahkanlah kepadanya untuk merujuknya, kemudian perintahkanlah agar ia meninggalkannya sehingga suci kemudian haid, kemudian suci. Jika kamu bermaksud untuk hidup sebagai suami istri dan jika kamu ingin mentalaknya sebelum bergaul, maka yang demikian itu 'iddah yang telah ditetapkan Allah dan cara mentalak istri. (Muttafaq 'alaih) (Al-Asqalani, tth.:165).

Isyarat Allah SWT dan hadis-hadis dari Rasulullah saw diatas diterima oleh para ahli fikih, khususnya para imam mazhab, sebagai dasar untuk menetapkan hukum menjatuhkan talak.<sup>2</sup> Hukum talak tersebut ditetapkan bergantung kepada keadaan yang menyebabkannya.

Adakalanya *wajib*, *sunat*, *mubah*, dan adakalanya *haram* ataupun *makruh*. Yang perlu diperhatikan adalah menghindari hal-hal yang merusak hubungan baik antara suami dan istri. Karena, sebagaimana disebutkan, perceraian adalah sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

## 2. Alasan-alasan yang Membolehkan Perceraian

Menurut para ulama fikih, ada tiga kemungkinan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yaitu *nusyuz*, *syiqaq*, dan *li'an*.

### a. *Nusyuz*

Secara sederhana, *nusyuz* diartikan dengan “membangkang” atau “melawan”, yaitu perilaku istri ataupun suami yang mengabaikan hak-hak pasangannya dan tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

*Nusyuz* dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila sudah dilakukan langkah-langkah perdamaian terlebih dahulu.

Petunjuk tentang langkah-langkah perdamaian dapat disimak dalam surat An-Nisa', 4: 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“...perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Petunjuk tersebut memberikan jalan bahwa jika istri *nusyuz*, langkah pertama yang harus diambil adalah menasehatinya, menjelaskan segi positif dan negatif dari tindakannya (*al-tarhib wa al-targhib*) (Lihat An-Nawawy, tth.: 146). Apabila usaha pemberian nasihat tidak diindahkan, langkah kedua adalah memisahkan diri dari tempat tidurnya, meski dalam satu rumah. Langkah ini dimaksudkan agar

dengan demikian istri dapat berfikir kembali tentang berbagai akibat dari tindakannya. Akan tetapi jika langkah kedua tersebut juga tidak berhasil menyadarkan istri, maka langkah berikutnya adalah member pelajaran, dalam bahasa Al-Quran “memukul” nya. Para *mufassir* dan ahli fikih sepakat bahwa “memukul” yang dimaksud disini adalah pukulan yang tidak melukai. Dengan kata lain, memukul dengan tujuan untuk mengajarnya. Dengan demikian, dapat berarti bahwa memukul dengan kata-kata, perbuatan, ataupun secara fisik, asalkan tidak melukai fisik istri.

Pada umumnya, masyarakat muslim memahami bahwa *nusyuz* merupakan label yang diberikan kepada istri saja. Perbuatan istri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suami disebut melawan atau membangkang (*nusyuz*). Padahal, seperti disebutkan diatas, label *nusyuz* juga berlaku untuk suami yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri. Persoalannya adalah, bagaimana cara menghadapi suami yang *nusyuz*, apakah juga berlaku langkah-langkah yang telah ditentukan Allah dalam ayat ke-34 surat An-Nisa’ diatas.

Untuk hal tersebut, ditemui petunjuknya dalam surat yang sama ayat 128:

وَأِنْ أَرْثَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*“Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh). Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa apabila *nusyuz* terjadi di pihak suami, maka istri pun harus berupaya terlebih dahulu untuk melakukan upaya perdamaian.

Menurut Sayuti Thalib (1986: 94), ayat ini dijadikan

dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan, maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan masalah apabila suami melakukan *nusyuz*.

b. *Syiqaq*

*Syiqaq* adalah terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri secara terus menerus. Hal ini dapat menyebabkan perceraian setelah upaya-upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil.

Menghadapi masalah *syiqaq*, Allah SWT memberi petunjuk penyelesaiannya dalam surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

" Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Penunjukan hakam (juru damai) dari kedua belah pihak diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan antara kedua suami istri. Jika hakam tidak dapat melaksanakan tugasnya, ditunjuk lagi hakam yang lainnya.

c. *Li'an*

*Li'an* adalah saling tuduh menuduh antara suami dan istri bahwa salah satu pihak telah melakukan perbuatan *fahisyah* (zina). Penyelesaian masalah ini adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan. *Li'an* dianggap telah memasuki gerbang putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *bain kubra* (talak yang tidak boleh lagi rujuk untuk selamanya).

Dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

disebutkan tentang alasan-alasan yang membolehkan terjadinya perceraian (Lihat pasal 19). Alasan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan diatas ditambah lagi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (g) dan (h) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perceraian tersebut dapat juga dilakukan jika suami melanggar taklik talak dan beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (KHI ps. 116).

Apabila sudah cukup alasan untuk melakukan perceraian, kedua belah pihak (suami atau istri) boleh mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama. Artinya, perceraian baru dianggap sah apabila diucapkan di depan sidang pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. (UUPA, pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).

Dalam Islam perceraian dibolehkan, akan tetapi ia sangat tidak disukai (dibenci) Allah. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. (As-Sayuthi, tth: 5):

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق  
(رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

*Diriwayatkan dari Ibn 'Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:  
"Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak  
(perceraian)". (HR Abu Dawud, Ibn Majjah, dan Al-Hakim).*

### 3. Bentuk-Bentuk Perceraian di Pengadilan Agama

Undang-Undang Pengadilan Agama (UUPA) Nomor 7 tahun 1989 membedakan bentuk perceraian kedalam dua macam, yaitu perceraian atas kehendak dan diajukan oleh suami yang disebut dengan *cerai talak* dan perceraian atas kehendak dan diajukan oleh istri yang dikenal dengan sebutan *cerai gugat*. Permohonan cerai pada cerai talak disebut dengan "permohonan" dan permohonan cerai pada cerai gugat disebut "gugatan". Pelaksanaan kedua macam permohonan tersebut telah diatur oleh hukum positif yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

#### a. *Cerai Talak*

Di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam setiap sidangnya, Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri). Apabila pengadilan menyimpulkan bahwa kedua pihak tidak mungkin didamaikan lagi, dan telah cukup alasan untuk bercerai dengan bukti autentik, maka majelis hakim akan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap hal ini istri dapat meminta banding dalam waktu 14 hari setelah putusan ditetapkan. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Pengadilan Agama akan menentukan waktu sidang "penyaksian ikrar talak" dan memanggil suami dan istri atau wakilnya yang diberi kuasa

husus untuk mengucapkan ikrar talak dengan dihadiri istri dan kuasanya. Jika istri telah mendapat panggilan secara patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, maka pihak suami dapat mengucapkan ikrar talak tanpa kehadiran pihak istri. Akan tetapi, jika suami dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang dan tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara patut, maka penetapan menjadi gugur dan permohonan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama (Lihat ps. 71 UUPA No. 7, 1989).

Panitera mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang ikrar talak, dan hakim harus membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dan atas penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

*b. Cerai gugat*

Pelaksanaan pengajuan permohonan cerai gugat sama halnya dengan pengajuan cerai talak (Bandingkan ps. 66 dengan ps. 73 UUPA No. 7, 1989). Demikian pula halnya dengan pemeriksaan perkara dalam kasus cerai gugat ini, diberlakukan sama dengan pemeriksaan perkara pada kasus cerai talak, yaitu sama-sama berdasarkan pasal 82 dan 83 UUPA No. 7 tahun 1989.

Apabila alasan gugatan disebabkan oleh salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti, penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (ps. 74 UUPA).

Jika alasan gugatan dikarenakan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka majelis hakim dapat memerintahkan tergugat memeriksakan diri ke dokter. Jika alasan perceraian karena *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan harus didengarkan terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang bersal dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami atau istri. Setelah



mendengar keterangan saksi tentang sifat pertengkaran, majelis hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam* (penengah).

Prosedur penetapan putusan antara cerai talak dengan cerai gugat adalah sama, sebagaimana terungkap dalam pasal 84 dan 85 Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989. Persamaan antara kedua bentuk cerai ini terlihat karena isi pasal 69 dan 72 tentang cerai talak adalah mengacu kepada pasal 82,83,84, dan 85, yang mengatur tentang cerai gugat.

#### **D. KDRT TERHADAP PEREMPUAN PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM**

##### *1. Undang-Undang No.23 tahun 2004*

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga merupakan dambaan setiap orang. Keutuhan dan kerukunan tersebut dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri seseorang tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara wajib untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (2) uud 1945 menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga, maka sangat diperlukan adanya pembaruan hukum yang berpihak kepada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan. Hal tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itulah pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tersendiri, meskipun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsure-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur di dalam KUHP. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitive dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Di dalam Bab I pasal 1 Undang-Undang RI nomoer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berarti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk kejahatan yang sering mengambil korban para istri ini tidak hanya berupa kekerasan psikhis, tetapi juga kekerasan fisik, seperti penelantaran, makian, cercaan, tamparan, tendangan, pemukulan, pemaksaan seksual (perkosaan), sampai kepada penganiayaan berat dan pembunuhan (Suara Apik, 2000).

## 2. Perspektif Hukum Islam

Menurut pemahaman kebanyakan masyarakat muslim, dalam kehidupan rumah tangga, “fikih” telah mengatur bahwa istri adalah pengabdian bagi suaminya, karena suami telah memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya serta menyediakan tempat tinggal dan pakaian bagi mereka. Sebagai pengabdian suami, istri berkewajiban patuh dan taat kepada suami, tidak menerima tamu laki-laki jika suami tidak di rumah, dan harus berhias hanya untuk suami (Sayyid Sabiq, tth.:215), karena keredaan suami adalah surganya dan kemarahan suami adalah nerakanya (Jawa: *swarga nunut nroko katut*). Istri tidak boleh melakukan sesuatu, bahkan termasuk melakukan hal-hal yang sunnah menurut agama, kecuali mendapat izin dari suaminya. Hadis ini didasarkan pada hadis “*shahih*” yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “*Tidak halal seorang istri berpuasa sunat sementara suaminya berada di rumah kecuali atas izinnnya.*” (Al-Qarasyi, 1989:136-139). Seorang istri tidak boleh membantah, tidak boleh meminta cerai, tidak boleh menuntut nafkah, tidak boleh bersuara keras di hadapan suaminya, dan puncaknya adalah seorang perempuan tidak boleh keluar rumah meskipun untuk shalat berjamaah. Alasannya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*sebaik-baik masjid perempuan adalah pojok rumahnya.*” (Wahbah Zuhaili, 1984:153).

Aturan-aturan diatas merupakan kewajiban istri dan merupakan hak suami yang tidak boleh dilanggar. Hak-hak tersebut menggambarkan kekuasaan yang begitu besar terhadap istrinya. Aturan “fikih” yang demikian merupakan “implementasi” dari firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

*“Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan). Sebab itu perempuan yang shaleh adalah perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga diri di balik pembelakangan suaminya, sebagaimana Allah menjaganya...”*

Ketaatan istri yang total kepada suaminya, oleh sebagian kalangan diyakini sebagai ajaran Islam yang harus diwujudkan di segala konteks dan segala zaman. Hal ini boleh jadi ditemukan dasarnya dalam beberapa “hadis” sehingga diyakini sebagai *blue print* yang mutlak harus dilaksanakan. Apabila istri melalaikan kewajibannya, ia dituduh tidak patuh dan membangkang (*nusyuz*) bahkan dituduh tidak melaksanakan ajaran agama. Padahal agama seringkali dipahami secara keliru, dan pemahaman yang keliru tersebut diatasnamakan oleh sebagian kalangan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Umpamanya dalam memahami surat Al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istri-istrimu adalah (ibarat) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah (tanamilah) tanah itu meneurut kehendakmu (menurut ajaran agamamu, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (Oemar Bakry, 1984: 67).*

Ayat ini sering dimaknai bahwa istri adalah hak milik

suami sebagaimana suami memiliki sebuah benda yang karenanya suami boleh melakukan apa saja sesuka hatinya, termasuk melakukan kekerasan. Padahal, walaupun istri diibaratkan sebagai “ladang” atau “kebun” maka ia haruslah dijaga, dipupuk, dan disirami agar tanahnya menjadi subur. Apalagi menurut tinjauan sosiologis, bagi bangsa Arab yang hidup di tanah yang tandus, sebuah “kebun” merupakan harta benda yang sangat berharga. Oleh karena itu, ia harus dijaga dengan baik, dan tidak pantas memperlakukannya sekehendak hati secara sepihak.

Kekerasan terhadap istri, baik berupa kekerasan fisik maupun psikhis, hampir selalu diterjemahkan sebagai bentuk pengajaran suami kepada istri dalam rangka pembinaan rumah tangga. Apabila suatu ketika istri keluar rumah untuk suatu keperluan tanpa izin suami, atau keengganan istri untuk melayani kebutuhan biologis suami, maka tindakan kekerasan berupa ucapan yang menyakitkan bahkan pemukulan tidak jarang terjadi.

Padahal, seandainya pun istri membangkang (*nusyuz*), ada ketentuan-ketentuan tentang cara memberikan pengajaran kepadanya. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 34:

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“...perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”*

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa jika istri *nusyuz*<sup>3</sup> ada tahapan-tahapan upaya untuk memberikan pengajaran kepadanya. Jika memang tidak bisa dinasihati secara baik, maka barulah boleh dipukul. Akan tetapi memukul istri tidaklah dengan cara menyakiti tubuhnya apalagi melukainya. Rasulullah bersabda: “Apabila perempuan-perempuan itu mendurhakai kamu dalam kebaikan, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair al-mubarrih*)”. Ibn ‘Abbas dan ‘Atha’ menganjurkan memukul dengan menggunakan

siwak atau semacamnya (Al-Qurthuby, tth.:113).

Dengan demikian, hukuman fisik berupa memukul merupakan hukuman maksimal, diterapkan hanya pada kondisi dimana istri keluar dari jalur agama atau melakukan perselingkuhan – yang merupakan bentuk tertinggi penyelewengan istri yang dikategorikan *nusyuz*.

Rasulullah saw. sendiri sesungguhnya tidak menyukai seseorang yang suka memukul istrinya: “...*para suami yang memukul istrinya bukanlah orang yang baik-baik diantara kamu.*” (H.R. Abu Dawud, Nasai, dan Ibn Majjah). Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Zam’ah disebutkan bahwa Nabi bersabda: “*Apakah salah seorang diantara kalian memukul istrinya seperti seorang hamba dipukul ? kemudian ia menidurinya di waktu malam?*” (H.R. Bukhari dan Muslim) (Al-Bukhari, 1992:383).

Sindiran Nabi dalam hadis terakhir ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap laki-laki yang suka melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan kekerasan terhadap istri, baik fisik maupun psikhis, tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT. Umpamanya firman Allah: “*Mereka (perempuan) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...*”

Dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakan-Nya untukmu istr-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” ...”

Dalam surat An-Nisa’ ayat 19:

...dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik. بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ

Banyak lagi ayat-ayat yang dapat dijadikan pedoman untuk pola pergaulan suami dan istri di dalam rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia, *sakinah wa rahmah*.

Dalam salah satu hadits diriwayatkan bahwa Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah saw: *apakah hak istri kita kepada suaminya ?* Jawab Rasulullah: *"Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Jangan engkau memukul mukanya, jangan engkau menjeleknya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah (mendiampkannya).* Hadis lainnya menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang baik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya."*

Ayat al-Quran maupun hadis diatas menjelaskan bahwa memperlakukan pasangan dengan baik adalah suatu keniscayaan. Mewujudkan keluarga, bahkan masyarakat, yang harmonis juga adalah suatu keniscayaan.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, terlebih dahulu dilakukan upaya perdamaian (*islah*), yang bentuknya dapat berupa memberikan nasihat kepada kedua pihak yang berselisih agar mereka tidak memutuskan untuk bercerai, sebagaimana sudah dilakukan oleh hakim terhadap suami istri yang berperkara di Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*"Jika kamu khawatir akan persengketaan antarakeduanya, maka kirimlah seorang hakam (pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang pendamai itu bermaksud mengadakan perdamaian niscaya Allah akan memberikan taufiq kepada mereka (suami istri). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Menurut Al-Qurthubi (tth.:174-175), yang dimaksud dengan *hakam* pada ayat diatas adalah para hakim dan

penguasa. Dengan demikian, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, selain sejalan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia, juga sesuai menurut syari'at Islam.

Apabila upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan, maka jalan terakhir adalah perceraian. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum perceraian adalah "terlarang" kecuali karena alasan yang benar.

Imam Hanbali menjelaskan secara rinci bahwa perceraian adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah, dan adakalanya sunat dilakukan. *Wajib*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh *hakam* (penengah) karena *hakam* beranggapan bahwa talak satu-satunya cara menghentikan perpecahan suami istri. Talak *haram* jika dilakukan tanpa alasan dan merugikan suami atau istri. Talak sunat, yaitu jika istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah (seperti shalat dsb.). Menurut Ibn Qudamah, talak sunat adalah jika terjadi perpecahan dan perselisihan yang sudah berat dan tidak bisa didamaikan lagi (Sayyid Sabiq, tth.:12-14).

Dengan demikian jelaslah bahwa ajaran Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* (menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk rahmat tersebut adalah bentuk pengakuan adanya hak-hak perempuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yang kalau dilanggar akan mengganggu dan merusak hubungan yang semestinya *mawaddah wa rahmah* di dalam keluarga.

#### **E. BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ISTRI PADA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Permasalahan keluarga dalam masyarakat Pekanbaru yang berujung kepada gugatan perceraian, dapat diketahui melalui kasus-kasus gugatan perceraian yang disampaikan ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Mengacu kepada pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dapat dikatakan bahwa semua perkara gugatan perceraian yang



ada di Pengadilan Agama adalah disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Demikian menurut Humas PA Pekanbaru, Ahmad Anshari (21-7-1007).

Bentuk-bentuk kekerasan yang dijadikan alasan untuk gugatan cerai kadang kadang dicantumkan dalam surat permohonan, kadang kadang tidak dicantumkan secara detail, akan tetapi hal tersebut lebih terungkap dalam persidangan yang dilakukan (Syarifuddin, 21-7-2007).

Bentuk-bentuk kekerasan yang diterima pihak istri bermacam-macam: diabaikan/ditinggal dalam waktu sekian lama tanpa diberi nafkah, perselingkuhan suami, mendapat penghinaan dari suami, dipukul, ditendang, dan bahkan ada yang disiram dengan minyak tanah lalu dibakar, dan lain sebagainya (Anshari, 21-6-2007).

Sesuatu yang sulit untuk memilah dan membuat prosentase antara kekerasan fisik dan kekerasan psikhis, termasuk kekerasan ekonomi dan kekerasan seks, yang dijadikan alasan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, karena perkara-perkara yang dilaporkan dicatat berdasarkan nomor urut perkara, termasuk perkara waris dan hadhanah. Pengadilan Agama tidak mengkategorikan perkara perceraian berdasarkan alasan, tetapi hanya mengkategorikan antara “permohonan cerai” (cerai talak) dengan “gugatan cerai” (cerai gugat). Permohonan cerai (CT) adalah permohonan yang diajukan oleh suami untuk menceraikan istri, dan gugatan cerai (CG) adalah permohonan dari pihak istri untuk bercerai dari suami (dalam istilah lain disebut *fasakh*).

Diantara kedua bentuk permohonan dan gugatan tersebut, yang paling banyak adalah gugatan cerai (CG). Perhatikan dua tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Permohonan Cerai Talak**  
**dan Cerai Gugat Januari s/d Juni 2006**

No.	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Januari	22	36	58
2	Februari	18	31	49
3	Maret	18	38	56
4	April	23	39	62
5	Mei	18	30	48
6	Juni	16	42	58
	Jumlah	115	216	331

*Sumber : Diolah dari Arsip Pengadilan Agama Pekanbaru*

**Tabel 2**  
**Jumlah Permohonan Cerai Talak dan Cerai Gugat**  
**Januari s/d Juni 2007**

No.	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Januari	13	30	43
2	Februari	13	43	56
3	Maret	15	33	48
4	April	13	34	47
5	Mei	18	44	62
6	Juni	15	39	54
	Jumlah	87	223	310

*Sumber : Diolah dari Arsip Pengadilan Agama Pekanbaru*

Tabel diatas menunjukkan bahwa terhitung dari Januari sampai Juni 2006, dari 331 perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama Pekanbaru, 216 perkara merupakan perkara Cerai Gugat, dan sisanya 115 perkara adalah perkara Cerai Talak. Dalam bulan yang sama pada tahun 2007, dari 310 perkara

perceraian terdapat 223 perkara Cerai Gugat, dan 87 perkara adalah perkara Cerai Talak.

Dari angka diatas dapat diketahui bahwa permohonan cerai yang berasal dari pihak istri (cerai gugat) setiap tahunnya lebih banyak daripada permohonan cerai yang berasal dari suami (cerai talak). Dengan kata lain, keputusan untuk bercerai lebih banyak datang dari pihak perempuan (istri) ketimbang dari suami terhadap istrinya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bentuk kekerasan yang diterima istri pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dapat disimak beberapa kasus perkara cerai gugat berdasarkan arsip Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai berikut:

1. Kasus gugat cerai oleh NA binti ZAK, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat (ada), selanjutnya disebut "Penggugat", mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya BH bin AS, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, alamat (ada) selanjutnya disebut "Tergugat", berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat menikah kedua kalinya dengan tergugat yang sebelumnya pernah bercerai dan menikah kembali pada tanggal 23 November 1998 di Pekanbaru, ...dst.
  - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Pekanbaru, dan telah dikaruniai empat orang anak bernama RPA (12 th, lk), RAR (10 th, lk), RRH (5<sup>th</sup>, lk), dan RVM (1,5 th, pr).
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
    - Tergugat suka minum minuman keras, berjudi, sering keluar malam, pulang subuh dan punya hutang banyak di luar;
    - Tergugat sering berkata kasar dan kotor, sering mengancam, menghina, memukul Penggugat di depan anak-anak, pembantu, dan mengajar anak memanggil

- ibunya (Penggugat) dengan kata “anjing”;
- Tergugat membesar-besarkan masalah kecil, seperti piring pecah atau pisau patah menjadi masalah dan menyebabkan pertengkaran;
  - Tergugat jika marah suka memecahkan barang-barang rumah tangga, termasuk barang dagangan Penggugat;
  - Tergugat tidak dapat dengan tegas menyatakan dirinya apakah masih seorang muslim atau tidak, dan Tergugat pernah membawa pulang daging babi untuk dimasak dan dimakan Tergugat;
  - Tergugat lebih mementingkan orang lain daripada rumah tangganya sendiri
  - Tergugat dengan berterus terang sering mencari PSK dan mendapat penyakit kotor;
- d. Bahwa Penggugat masih serumah dengan Tergugat, namun Penggugat sudah pisah kamar
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak ridho atas tindakan Tergugat, serta rumah tangga Penggugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan diperbaiki, dst.
2. Kasus gugat cerai oleh Ymn binti KP, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat (ada), selanjutnya disebut “Penggugat”, mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Byz bin Btr, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, selanjutnya disebut “Tergugat”, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, ...dst.
  - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Pekanbaru, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama DS (16 th, pr), AA (14 th, lk), SS (10 th, pr)
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak dua tahun pernikahan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat salah paham tentang masalah pekerjaan Penggugat;
  - Tergugat suka berjudi;
  - Penggugat cekcok dengan orangtua/keluarga Tergugat;
  - Tergugat memukul Penggugat bersama adik laki-laki Tergugat 3 bulan yang lalu
- d. Bahwa sejak enam bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak ridho atas tindakan Tergugat, serta rumah tangga Penggugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan diperbaiki, dst.
3. Kasus gugat cerai oleh KhY binti SyA, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat (ada), selanjutnya disebut "Penggugat", mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya A bin MA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat (ada), selanjutnya disebut "Tergugat", berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal 16 Oktober 2002 di Pangkalan Brandan, dan pernikahan tersebut terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, Sumatra Utara, dst...
  - b. Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Pekanbaru, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rian Farhan Azhari, umur 3 tahun;
  - d. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tiga bulan usia

pemikahan, namun Penggugat berusaha untuk bertahan demi kelangsungan rumah tangga, tetapi sejak satu tahun terakhir ini Penggugat tidak sanggup lagi bertahan. Hal ini disebabkan:

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat selaku istri.
  - Tergugat telah melakukan pemukulan dan meludahi Penggugat;
  - Tergugat sudah dua kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
  - Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
  - Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan Juni 2006 sampai pengajuan gugatan ini.
- e. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2006. Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir dan dipukul oleh Tergugat;
- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak ridho atas tindakan Tergugat, serta rumah tangga Penggugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan diperbaiki, maka Penggugat sudah berketetapan hati dan sudah berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, dst.

Kasus-kasus yang dikemukakan diatas hanyalah sebagian kecil contoh kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Akan tetapi, dari tiga contoh kasus diatas dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang diterima istri dalam perkawinan, yang dijadikan alasan untuk menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama adalah sangat beragam;

#### 1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6).

Kekerasan fisik yang biasa dialami perempuan yang mengajukan gugatan cerai, sebagaimana tergambar pada kasus-kasus diatas, adalah pemukulan. Di dalam surat gugatan, maupun di dalam persidangan tidak disebutkan secara jelas akibat pemukulan tersebut, apakah menyebabkan luka, memar, atau lainnya. Tetapi, sebagaimana juga sudah disebutkan, berdasarkan keterangan Hakim dan Humas Pengadilan Agama Pekanbaru, kekerasan fisik yang dijadikan perkara dapat berupa kekerasan ringan, seperti pemukulan, tamparan, tendangan, dan lain-lainnya yang tidak meninggalkan bekas atau meninggalkan bekas memar. Bahkan dalam persidangan, menurut keterangan Bapak Drs. Syarifuddin, salah seorang hakim, dan keterangan yang sama juga diperoleh dari Bapak Drs. Ahmad Anshari, Humas PA Pekanbaru dan juga seorang hakim, bahwa pihak istri sebagai penggugat, tidak segan-segan membuka dan menunjukkan bekas memar-memar di pahanya di hadapan majelis hakim.

Menurut A. Anshari (2007), kekerasan fisik dan dapat pula berupa kekerasan berat, seperti menganiaya istri sehingga harus diopname, melukai istri, bahkan menyiramnya dengan bensin dan membakarnya.

Menurut Fathul Djannah, dkk, bentuk kekerasan fisik yang sering dialami istri pada umumnya adalah dipukul, dilempar dengan suatu benda, dijambak rambutnya, dan ditendang pada waktu hamil, dsb. Intensitas dan frekuensi penganiayaan ini beragam, ada yang berlangsung selama perkawinan, ada yang hanya sekali-sekali saja, ada yang meninggalkan bekas memar, dan ada yang tidak meninggalkan bekas (Fathul Djannah, 2003: 31).

## 2. *Kekerasan psikhis*

Kekerasan psikhis menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikhis berat pada seseorang (pasal 7).

Kekerasan psikhis yang dialami perempuan yang mengajukan gugatan adalah merupakan akibat dari perilaku dan tabiat suami yang tidak baik, seperti suka minum

minuman keras, berjudi, sering keluar malam, pulang subuh dan punya hutang banyak di luar. Hal ini tentunya merupakan beban batin tersendiri bagi seorang istri.

Selain itu, suami yang digugat rata-rata suka mengeluarkan perkataan kasar dan kotor, berselingkuh, mengancam untuk dilukai, dibunuh atau diancam akan diceraikan, menghina, salah paham, memukul istri di depan anak-anak dan pembantu, dan mengajar anak memanggil ibunya dengan kata “anjing”, membesar-besarkan masalah kecil, seperti piring pecah atau pisau patah menjadi masalah, memecahkan barang-barang rumah tangga maupun barang-barang istri, membawa pulang daging babi untuk dimasak dan dimakan (padahal seorang Muslim tidak boleh memakan daging babi), lebih mementingkan orang lain daripada rumah tangganya sendiri, dengan berterus terang sering mencari PSK dan mendapat penyakit kotor, meludahi istri, ataupun mengusir istri dari rumah.

Kekerasan psikhis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikhis dapat meruntuhkan harga diri dan bahkan memicu dendam hati istri kepada suami. Kekerasan psikhis ini biasanya justru lebih sulit diatasi ketimbang kekerasan fisik, karena akibat yang ditimbulkannya terhadap istri adalah tekanan batin (stress), dan akhirnya dapat menimbulkan gangguan jiwa.

Caci maki, kata-kata kasar, ancaman akan diceraikan, ancaman akan dipukul, akan dibunuh, dan sebagainya, tuduhan-tuduhan (umpamanya tuduhan selingkuh) yang tidak beralasan, serta pengabaian, adalah bentuk kekerasan psikhis yang biasanya diterima oleh istri (Fathul Djannah, 2003:31).

### 3. *Kekerasan Ekonomi*

Kekerasan ekonomi biasa juga diartikan dengan penelantaran rumah tangga. Dalam pasal 9 UUNo. 23 tahun 2004 disebutkan bahwa 1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,



perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, 2) penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan ekonomi juga merupakan bagian dari kekerasan yang dialami perempuan yang mengajukan gugatan cerai. Pada kasus-kasus yang dikemukakan dapat diketahui bahwa kekerasan ekonomi yang terjadi adalah suami mempunyai hutang banyak, suami tidak mencukupi nafkah, tidak diberi nafkah, baik untuk istri maupun untuk anak-anaknya, merusak barang dagangan istri yang jelas menyebabkan kerugian secara ekonomi, suami pergi meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah.

#### 4. *Kekerasan seksual*

Bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan yang mengajukan gugatan adalah, suami lebih memilih berselingkuh dengan perempuan lain maupun dengan PSK sehingga mendapat penyakit “kotor”. Hal ini jelas akan menyebabkan keengganan istri untuk melayani keinginan seks suaminya.

Baik, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, maupun kekerasan seksual yang dialami perempuan pada akhirnya akan mengakibatkan trauma tersendiri, dan hal tersebut jelas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kekerasan psikhis.

Apabila dibandingkan, jumlah gugatan perceraian karena alasan kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, maupun kekerasan psikhis, dapat diperkirakan bahwa permohonan cerai gugat karena alasan kekerasan fisik lebih banyak dari kekerasan yang lain. Angka pasti dari alasan-alasan tersebut agak sulit diperoleh karena demikian banyaknya gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama setiap bulannya. Selama tahun 2007, terhitung dari Januari sampai Juni 2007, sebagaimana sudah dikemukakan, terdapat 223 (dua ratus dua puluh tiga) kasus perkara cerai gugat yang diterima oleh Pengadilan Agama.

Sulitnya memilah antara alasan cerai gugat karena

kekerasan fisik, ekonomi, seksual, dan psikhis, juga disebabkan Pengadilan Agama tidak mempunyai data yang terpilah untuk itu. Harus memeriksa dan meneliti satu persatu arsip perkara yang sedemikian banyak adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Akan tetapi, setelah diambil sampel secara acak (*random sampling*) sebanyak 15 % (33 berkas) dari berkas-berkas perkara gugatan terhitung bulan Januari sampai Juni 2007, ditemukan sebanyak 23 berkas (70 %) memuat alasan kekerasan fisik sebagai penyebab pengajuan cerai gugat. Sisanya (30 %, 10 berkas) memuat alasan kekerasan ekonomi, seksual, dan psikhis. Akan tetapi, pada umumnya, kekerasan-kekerasan yang dijadikan alasan gugat cerai tersebut biasanya tidak merupakan bagian yang terpisah antara satu dengan lainnya. Alasan kekerasan fisik pasti disertai dengan alasan kekerasan non fisik.

Banyaknya gugatan perceraian disebabkan kekerasan fisik ini, dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Pekanbaru, beberapa Panitera, dan beberapa Hakim. Adakalanya penggugat tidak mencantumkan kekerasan fisik yang diterimanya sebagai alasan menggugat cerai suaminya, akan tetapi hal tersebut dapat terungkap dalam persidangan-persidangan yang dilaksanakan. Umpamanya ketika dalam persidangan penggugat diminta kembali menjelaskan kenapa dia menggugat cerai suaminya, penggugat tak segan-segan menunjukkan bekas-bekas kekerasan yang diterima dari suaminya, meski harus membuka sebagian pakaiannya. Biasanya hal tersebut dilakukan dalam sidang tertutup. Demikian pula halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terungkap di depan persidangan, yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pihak tergugat. Akan tetapi, ada sebagian penggugat yang dalam persidanganpun tidak mau mengungkapkan perlakuan kekerasan seperti apa yang diterimanya dari suaminya, meskipun sidang dilakukan secara tertutup.

Di dalam proses persidangan, tidak jarang permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga lebih kompleks daripada alasan yang dituangkan dalam surat gugatan.

Sebagai contoh adalah kasus Gugat Cerai yang dapat

disimak melalui putusan No. 423/Pdt.G/2006/PA.PBR, berdasarkan Arsip PA Pekanbaru, sebagai berikut:

UNbintiRS, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Asuransi Bumi Putra, alamat (ada), selanjutnya disebut “Penggugat”, menggugat cerai suaminya N bin AA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat (ada), selanjutnya disebut “Tergugat”, dengan alasan yang tercantum pada surat gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Pekanbaru selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke Payakumbuh selama 2 tahun, dan kembali pindah ke Pekanbaru. Mereka telah dikaruniai dua orang anak laki-laki.
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dua tahun usia pernikahan, namun Penggugat berusaha untuk bersabar demi kelangsungan rumah tangga, tetapi Penggugat tidak sanggup lagi bertahan disebabkan:
  - Tergugat suka berkata kasar.
  - Tergugat lebih mementingkan keluarganya daripada rumah tangganya;
  - Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, tidak mencukupi nafkah istri dan anak-anak;
  - Tergugat mengalami gangguan jiwa;
  - Tergugat sudah pernah mengucapkan kata cerai.
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2006. Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, dst.

Pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Majelis Hakim memberi nasehat agar mereka berdamai kembali untuk membina rumah tangga dengan baik. Setelah upaya perdamaian tidak berhasil, dalam persidangan dibacakan gugatan istri yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan. Terhadap gugatan

tersebut, suami diberi kesempatan untuk memberi jawaban secara tertulis. Jawaban tersebut membantah semua isi gugatan yang disampaikan istrinya, dan suami bermohon untuk dipersatukan kembali dengan istrinya.

Terhadap bantahan tersebut, istri (penggugat) kembali mengajukan “replik” secara tertulis, yang menjelaskan secara rinci alasan pengajuan gugatan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, sebagai berikut:

- a. Bahwa selama tiga tahun pernikahan, waktu tergugat sedang jaya, almarhum kakanya masih hidup, sikapnya kepada penggugat bertolak belakang dengan pembelaan dirinya di depan sidang. Hampir setiap malam pulang dari bekerja, penggugat selalu jadi imbas kepanikan dan tumpuan kemarahan yang tidak tahu sebabnya, bahkan tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan, bahkan menghina orang tua penggugat dengan mengatakan penggugat sebagai “anak PKI”, serta kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Penggugat selalu tidak pandai menjawab kecuali diam dan menangis. Tergugat terlalu mengikuti kata-kata almarhumah kakaknya yang selalu ingin menguasai usaha tergugat untuk kepentingan dua orang anaknya. Apapun yang disampaikan kakaknya untuk memojokkan Penggugat, langsung diterima dan penggugat dimaki-maki di depan siapapun;
- b. Bahwa Tergugat lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada istri dan anak-anaknya. Sewaktu Tergugat berjaya, semua kebutuhan keluarganya yang berjumlah tiga orang dan 8 orang keponakannya berasal dari pencarian Tergugat, terutama almarhumah kakak perempuannya dan suami kakaknya yang pengangguran dan kedua orang anaknya. Satu kewajiban bagi Tergugat untuk membiayai hidup almarhumah dan anak-anaknya dengan hidup mewah berkecukupan. Apa kehendak mereka dikabulkan Tergugat, sedangkan Penggugat sebagai istri, hanya bisa jadi penonton dan tidak bisa berkata apa-apa karena tidak punya keberanian untuk membantahnya;
- c. Bahwa tanggung jawab Tergugat selama tiga tahun pernikahan, Tergugat hanya member makan dan pakaian

kepada Penggugat dan anak-anak, tapi tidak dengan perhatian dan didikan yang baik, karena dalam pikiran Tergugat hanya memikirkan biaya saudara-saudaranya dan sekolah keponakannya, sekarang sudah menjadi dokter dan ahli gizi di Rumah Sakit Pertamina Dumai;

- d. ... Sekitar pertengahan tahun 1996 almarhumah kakaknya dirawat di rumah sakit Ibnu Sina karena sakit ginjal, sementara waktu itu anaknya juga sedang sakit. Penggugat tinggal di Ruko dengan anak Penggugat bersama beberapa orang pegawai Tergugat. Selama sebulan kakaknya sakit hanya sekali Tergugat pulang melihat anaknya, selebihnya Tergugat sibuk menjaga kakaknya dan mencari biaya rumah sakit dan biaya pesawat dua orang keponakannya yang sekolah di Semarang. Tidak pernah ada berita darinya sampai kakaknya meninggal dan dibawa ke Payakumbuh. Beberapa hari setelah pulang dari Payakumbuh, entah apa sebabnya, Tergugat marah-marah pada Penggugat dan memukul punggung Penggugat dengan gantungan baju sampai memar. Tidak berapa lama setelah itu banyak orang menagih hutang. Penggugatlah yang menghadapi orang-orang tersebut, Tergugat tidak berani menghadapi mereka. Akhirnya barang-barang di Ruko habis dilelang, tetapi uangnya bukan untuk pembayar hutang tetapi dikirim keponakannya di Semarang dan tidak sepeserpun uang tersebut Penggugat terima. Karena tidak sanggup menghadapi orang yang menagih hutang dan merasa tidak tenang, Tergugat membawa Penggugat dan anak ke Malaka. Di Malaka Tergugat bekerja, tapi hasilnya bukan untuk Penggugat dan anaknya, tapi untuk keponakannya di Semarang;
- e. Bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa adalah wajar karena memikirkan keluarganya. Secara logika. Setidaknya pasti ada rasa penyesalan di benaknya karena sewaktu ber'ada' Tergugat habiskan untuk keluarganya, setelah hancur dan tak punya apa-apa lagi, hanya Penggugat dan anak-anaknya yang masih tetap setia dan ikut menanggung segalanya, walaupun Tergugat sudah tak punya apa-apa lagi;
- f. Bahwa Penggugat mau bersumpah apa saja jika Penggugat

berbohong atas pernyataan diatas. Bahwa tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat di depan almarhum kakak dan suaminya, sebab ketika itu Penggugat bertengkar dengan almarhumah kakaknya karena tidak tahan lagi hidup dibawah dalam rumah tangga yang diatur oleh orang ketiga. Dalam pertengkarannya Tergugat lebih membela almarhumah, dengan nada lantang dan sangat marah Tergugat mengucapkan “DEN CARAIAN KAU” sambil berdiri di depan orang-orang yang telah Penggugat sebutkan. Malam itu juga sekitar jam 12 Penggugat dan anak pulang diantar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, itupun bukan sampai ke rumah, Tergugat menurunkan Penggugat di pinggir jalan dan menyuruh pegawainya yang mengantarkan hingga ke rumah orang tua Penggugat;

- g. Bahwa memang Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah, karena selama ini Penggugat dan Tergugat menumpang hidup di rumah orang tua Penggugat, sebagai laki-laki dan sebagai suami Tergugat tidak ada fungsinya. Di rumah orang tua Penggugat, Tergugat kerjanya diam dan tidur di kamar tanpa ada inisiatif untuk membantu apa-apa yang pantas dilakukan. Penggugat malu dengan orang tua, Tergugat menumpang tapi orang tua Penggugat tidak pernah ditegurinya, apalagi berkomunikasi. Di rumah orang tua Penggugat, tergugat anggap seperti di hotel, pulang pergi sesukanya dan tanpa berbuat apa-apa;
- h. Bahwa sudah 13 tahun berumah tangga Penggugat selalu mencoba bertahan dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup yang sangat berat bagi Penggugat. Selama 5 tahun Penggugat hidup tertekan batin, dan selama 7 tahun Penggugat menghadapi dan merawat Tergugat yang dalam keadaan sakit kelainan jiwa; ...
- i. Bahwa selama 18 bulan ibu telah tiada, ... Tergugat bekerja sendiri untuk menyambung hidup dan biaya sekolah anak-anak dan tetap menumpang di rumah orang tua. Tergugat baru 5 bulan ini bekerja dan sudah bisa menafkahi anak-anak dengan hasil keringatnya, tapi Penggugat manusia biasa yang punya rasa trauma dalam menjalani hidup yang rasanya tidak normal dengan selalu dibayangi oleh

kejadian yang mengerikan dalam perjalanan hidup rumah tangga Penggugat;

- j. ... Selama ini Penggugat selalu dipaksa dalam melayani Tergugat, Penggugat selalu hidup dalam ketakutan dan kecemasan;
- k. Dst.

Melalui keterangan istri dalam replik diatas, jelas sekali bahwa di dalam rumah tangga si istri menerima perlakuan kekerasan dalam segala bentuk, kekerasan fisik (pemukulan), kekerasan ekonomi (penelantaran), kekerasan psikhis yang akhirnya menimbulkan trauma, dan juga kekerasan seksual. Kesemua kekerasan tersebut adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan yang menyebabkan pada akhirnya si istri mengajukan gugatan cerai.

Dari beberapa kasus yang telah dikemukakan, jelas bahwa apapun alasan kekerasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugat cerai, baik berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, maupun kekerasan secara psikhis, pihak Pengadilan Agama hanya mengenal satu kategori alasan gugat cerai, yaitu “ketidakharmonisan dalam rumah tangga.” Pada surat gugatan, sebagaimana sikemukakan pada contoh terdahulu, penggugat maupun pihak Pengadilan Agama tidak menamakan alasan gugat cerai karena KDRT.

## **E. PENYELESAIAN KASUS GUGATAN PERCERAIAN KARENA KDRT**

Suatu permohonan gugatan perceraian diproses di persidangan setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan diregistrasikan. Permohonan baru dapat diregistrasikan setelah membayar panjar (*vorschot*) biaya perkara.<sup>4</sup> berdasarkan perhitungan yang diperkirakan oleh Pengadilan Agama.

Dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian, tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan perkara adalah usaha mendamaikan. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Usaha mendamaikan tersebut merupakan

prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa (Abdul Manan, *thh.*:151).<sup>5</sup> Usaha perdamaian dilakukan pada setiap kali persidangan. Apabila tercapai perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan baru berdasarkan alasan atau alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diakui penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.

Perkara yang dicabut karena berhasil didamaikan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terhitung dari Januari sampai Juni 2007 ada 22 perkara dari 123 perkara yang diproses. Sebanyak 101 perkara cerai gugat dikabulkan.

Perhatikan tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Perkara Cerai Gugat yang Dicabut dan Dikabulkan**  
**Januari s/d Juni 2007**

No.	Bulan	Dicabut	Dikabulkan	Jumlah
1	Januari	0	0	0
2	Februari	3	17	20
3	Maret	3	14	17
4	April	2	14	16
5	Mei	10	37	47
6	Juni	4	19	23
	Jumlah	22	101	123

*Sumber : Diolah Arsip Pengadilan Agama Pekanbaru*

Tabel diatas menunjukkan bahwa perkara yang dicabut karena damai berjumlah 22 perkara (17,88 % dari perkara yang diputus), dan gugatan yang dikabulkan adalah sebanyak 101 perkara (82,11 % dari perkara yang diputus).

Apabila diperhatikan, terhitung dari Januari sampai Juni 2007, jumlah perceraian karena gugatan cerai dari pihak istri terhadap suaminya dikabulkan sebanyak 101 gugatan. Dibanding dengan jumlah gugatan yang masuk pada waktu yang sama, yaitu sebanyak 223 gugatan (tabel II), terlihat bahwa hanya separo dari gugatan yang berhasil diputus dalam waktu satu tahun. Hal ini tergantung kepada kelancaran jalannya sidang. Adakalanya satu kasus tidak putus dalam satu tahun, yang berarti perkara masih dalam proses.

Pencabutan perkara dilakukan dalam dua bentuk, yaitu



dicabut sebelum diadakan sidang pengadilan dan dicabut setelah diadakan sidang.

Perkara yang dicabut sebelum sidang adalah perkara yang belum diproses dalam sidang pengadilan dan belum dilakukan upaya perdamaian oleh majelis hakim. Untuk menelusuri faktor-faktor yang objektif dan akurat dalam masalah ini sulit dilakukan karena tidak ada data yang dapat dikumpulkan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Perkara yang dicabut setelah sidang pengadilan, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat, dapat ditelusuri dalam berita acara persidangan. Pada dasarnya perkara-perkara yang berhasil didamaikan adalah sama, dan perkara ini tidak mempunyai penetapan atau putusan maupun tidak dibuatkan akta perdamaannya, tetapi hanya dimuat dalam berita acara persidangan. Tata cara perdamaian yang diupayakan oleh majelis hakim pada dasarnya juga sama, yaitu berupa pemberian nasihat tergantung bentuk perselisihan yang diperkarakan.

Ada dua alternatif yang dapat dilakukan oleh para pihak yang mencapai perdamaian, yaitu: *pertama*, menyelesaikan sendiri permasalahan mereka di luar persidangan tanpa campur tangan hakim, atau *kedua*, para pihak dapat meminta hasil perdamaian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh pengadilan (Dewi, 2005: 64-5).

Menurut pasal 75-76 UUPA No. 7 th. 1989, apabila para hakim tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, Pengadilan Agama harus mengadakan sidang untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, dan keterangan para saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan suami atau istri. Setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat perselisihan antara suami istri, majelis hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain menjadi *hakam*. Fungsi *hakam* adalah juga untuk mendamaikan. Apabila juga tidak berhasil, maka dilakukan sidang untuk mendengarkan keterangan-keterangan para saksi dan memeriksa pembuktian-pembuktian yang dapat mendukung argumen dari masing-masing pihak. Dalam mempertahankan dalil gugat dan bantahannya, para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk

memberikan bukti kebenaran dalil-dalil yang diajukan. Apabila majelis hakim menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka dibuat dan dibacakan putusannya (A. Manan, .2005:210).

Pengadilan Agama tidak membedakan antara alasan kekerasan fisik dan kekerasan psikhis dalam menyelesaikan kasus gugatan perceraian karena KDRT. Bahkan, pengadilan tidak menamai kasus gugatan perceraian tersebut kepada kasus KDRT. Yang dikenal hanyalah kasus gugatan cerai karena ketidakharmonisan dalam keluarga. Kekerasan adalah bentuk penyebab ataupun akibat dari ketidakharmonisan tersebut.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Lihat pasal 80-81 UUPA No. 7 th. 1989).

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang pribadi suami atau istri.

## **F. PENUTUP**

Perlakuan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akan berakibat bubarnya suatu perkawinan karena gugatan cerai dari perempuan. Semakin banyak para suami memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang, semakin meningkat jumlah perceraian. Sebaliknya, semakin sadar para suami bahwa perempuan yang menjadi istrinya juga mempunyai hak yang sama dengan dirinya sehingga memberikan perhatian dan perlakuan yang baik terhadap istrinya, maka tingkat perceraian tentunya akan semakin kecil.

Kasus-kasus KDRT yang menimpa para istri, yang terungkap di Pengadilan Agama, hanyalah sebagian dari kasus KDRT yang menimpa perempuan (para istri) di Pekanbaru, karena

banyak kasus kekerasan yang diterima begitu saja oleh para istri tanpa melaporkan ke pihak berwajib, atau menceritakannya kepada orang lain, apalagi menggugat cerai suaminya. Hal tersebut terjadi karena berbagai alasan; sikap pasrah dan “nrimo” para istri, ketidaktahuan tentang hukum, ketergantungan ekonomi kepada suami, anggapan bahwa kekerasan dari suami kepada istri adalah hal yang lumrah dan biasa dalam rumah tangga, dan sebagainya.

Tulisan ini tidak bermaksud agar para perempuan seharusnya bercerai dari suami yang suka memperlakukannya sewenang-wenang, tetapi diharapkan sebagai cermin agar setiap pasangan menata kehidupan rumah tangga dengan semestinya, melaksanakan kewajiban masing-masing dan memberikan apa yang menjadi hak pasangannya.

Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka permasalahan-permasalahan dalam keluarga kecil kemungkinan akan terjadi, apalagi saling gugat untuk bercerai.

Untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing, setiap pasangan perlu menambah pengetahuan tentang relasi yang baik antara suami istri untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya. Pihak-pihak yang terkait, seperti badan penasihat perkawinan (BP4) maupun pihak pemerintah – terutama dalam rangka mensosialisasikan undang-undang – diharapkan dapat meningkatkan upayanya dalam masalah ini.

\*\*\*

## DAFTAR BACAAN

- Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta
- Abu Zakaria al-Anshariy, tth. *Fathul Wahhab*, Juz II, Syirkah wa Maktabah, Surabaya
- Al-Bukhari, 1992. *Shahih Bukhari*, juz 5, Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, Bairut
- al-Qarasyi, 1989. *al-Ahkam an-Nisa’*, Dar al-Fikr, Bairut
- Al-Qurthuby, tth. *Jami’ul Ahkam al-Quran*, jld. 6, Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, Bairut, Libanon
- al-Razy, tth. *Tafsir al-Kabir*, Jld. 9, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Bairut
- Al-Thabary, 1998. *Jami’al Bayan at-Tanwil Ayat al-Quran*, juz 5, Dar al-Fikr, Bairut
- An-Nawawy, tth. *Tafsir al-Munir* (Mar’ah Labid), Juz I, Usaha Keluarga, Semarang
- Djamil Latif, 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Gemala Dewi, Ed., 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Ibn Hajar al-Asqalaniy, tth. *Bulugh al-Maram*, Al-Azhar, Kairo
- Ibn Katsir al-Damsyiqi, 1992. *Tafsir Ibn Katsir*, Jld. I, Dar al-Fikr, Bairut
- Jalal al-Din al-Suyuti, tth. *al-Jami’ al-Shaghir*, Juz I, Al-Ma’arif, Bandung
- Muammal Hamidiy, 1987. *Tafsir As-Shabuniy*, Juz III, Bina Ilmu, Surabaya
- Muhammad Abu Zahrah, 1957. *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, Bairut
- Muhammad Al-Qurthubi, tth. *Tafsir al-Qurthubi*, Juz V, Syirkah Maktabah, Kairo
- Muhammad Husein ad-Dzahabiy, tth. *al-Syari’at al-Islamiyah*, Juz II, Al-Azhar, Kairo
- Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, 1984, Cet. III, Tanpa Penerbit, Jakarta
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975
- Riau Pos*, edisi Selasa, 17 Mei 2005.
- Rita Serena Kalibonso, 2002. “Kejahatan itu bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga”, dalam *Jurnal Perempuan* No. 26

- Sayuti Thalib, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UIPress, 1986), Cet. IV, Jakarta
- Sayyid Sabiq, tth. *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Bairut
- Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, 1985. Pradnya Paramita, Jakarta
- Wahbah al-Zuhaili, 1984. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 2, Dar al-Fikr, Damsyiq
- WJS Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

---

## Endnotes

<sup>1</sup>Data statistik yang lengkap mengenai kasus KDRT, baik secara nasional maupun lokal (di propinsi Riau) memang tidak tersedia. Penyebab yang paling mendasar dari keadaan tersebut adalah: pertama, KDRT tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat, karena adanya persepsi bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pribadi dan oleh karenanya pihak-pihak lain tidak sepatutnya turut campur, termasuk aparat penegak hukum. Kedua, kebanyakan korban tidak mau mengungkapkan kasus kekerasan yang menyimpannya di dalam rumah tangga karena malu dan dianggap aib. Lihat Rita Serena Kalibonso, “Kejahatan itu bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga”, dalam Jurnal Perempuan No. 26, 2002, hal. 8-9

<sup>2</sup> Imam Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa hukum talak adalah “terlarang” karena menurut mereka perceraian adalah kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah nikmat Allah. Kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Dengan demikian, bercerai adalah haram, kecuali karena darurat. Ukuran darurat menurut kedua imam ini adalah bila suami meragukan kesucian istrinya atau tidak ada perasaan cinta lagi, sebab soal hati terletak pada genggamannya Allah. Bercerai tanpa alasan apapun adalah kufur dan termasuk perbuatan jahat terhadap istri. Hal inilah yang dibenci dan terlarang. (Sayyid Sabiq, tth:207). Sebagian golongan Hanabilah memilah hukum talak, adakalanya wajib, haram, mubah, dan adakalanya sunat; Wajib, jika pihak hakim (penengah) memandang talak sebagai satu-satunya jalan terbaik jika terjadi perselisihan dan perpecahan antara suami dan istri yang tidak dapat dimaikan lagi. Ibn Qudamah berkata bahwa talak mungkin wajib jika istri tidak taat kepada Allah atau kurang memiliki rasa malu; Haram, jika talak dijatuhkan tanpa ada alasan karena hal tersebut merugikan bagi suami istri dan tidak ada kemaslahatan yang akan didapat dengan talak tersebut; Sunat, jika dijatuhkan karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti menjalankan shalat dan ibadah fardu lainnya, sementara suami tidak mampu untuk memaksa istri untuk

taat kepada perintah Allah. Imam Ahmad menambahkan bahwa tidak patut mempertahankan istri yang menyeleweng dari perintah agama karena hal itu dapat mengurangi keamanan suami, tidak membuat aman ranjangnya. Dalam keadaan demikian, suami tidak ada salahnya untuk bertindak keras terhadap istrinya atau bahkan menceraikannya (Sayyid Sabiq, tth.:207). Imam Syafi'i dan Ibn Hajar juga membedakan hukum talak kepada wajib, sunat dan haram. Menurut Syafi'i, talak wajib bagi orang yang sudah mengila' istrinya. Jika ia tidak mau maka hakim boleh menetapkan talak tanpa persetujuan suami tersebut (As-Syafi'i, 1986:386). Pendapat Syafi'i ini disetujui oleh Ibn Hajar dengan syarat 'ila' tersebut terjadi pada kasus syiqaq (M.Hamidiy, 1987: 242). Imam Syafi'i dan Ibn Hajar sepakat bahwa hukum talak menjadi sunat jika seorang suami tidak sanggup lagi menjalankan kewajibannya sedangkan istri tidak rela. Demikian juga jika istri tidak dapat menjaga kehormatan dirinya atau berperangai jahat dan mencemarkan nama baik suami. Hukum talak menjadi haram jika menceraikan istri yang berada dalam keadaan haid atau nifas. Atau istri telah dicampuri ketika baru selesai haid (talak bid'iy) (M.Hamidy, 1987:242). Ibn Hajar menambahkan bahwa hukum talak menjadi makruh jika dijatuhkan tanpa alasan yang jelas.

<sup>3</sup>Hampir semua ulama, klasik maupun kontemporer, sepakat mengartikan nusyuz dengan durhaka atau tidak patuh terhadap suami. Ibn Katsir mengartikan nusyuz sebagai melawan suami, membangkang, berpaling, marah, meninggalkan rumah tanpa izin. Lihat Ibn Katsir al-Damsyiqi, Tafsir Ibn Katsir, Jld. I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), hal. 609, bandingkan dengan Al-Thabary, Jami' al Bayan at-Tanwil Ayat al-Quran, juz 5, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), hal 68, al-Razy, Tafsir al-Kabir, Jld. 9, (Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tth.), hal. 73

<sup>4</sup>Dasar hukum biaya perkara adalah ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. Membayar ongkos perkara adalah suatu keharusan, dan ia merupakan salah satu dari prinsip-prinsip persidangan Pengadilan Agama. Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Pedata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 204. Pasal 90 Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 merinci apa saja yang menjadi dasar perhitungan jumlah perkara, yaitu: 1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu, 2) Biaya para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu, 3) Biaya untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu, 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain.

<sup>5</sup>Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 33, yang berbunyi bahwa hakim yang memeriksa gugatan cerai berusaha mendamaikan para pihak selama belum diputus. Disamping Peraturan Pemerintah tersebut, perdamaian juga diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang dijumpai pada pasal 65, 82, dan pasal 83. Disamping Peraturan Pemerintah tersebut, perdamaian juga diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang dijumpai pada pasal 65, 82, dan pasal 83.

## Tentang Penulis

## *Dra. Sofia Hardani, M.Ag.*

*Dra. Sofia Hardani, M.Ag.*, lahir di Sipisang, Kab. Agam, Sumatra Barat pada tanggal 30 Mei 1963. Setelah menamatkan Sekolah Dasar di tempat kelahirannya, melanjutkan pendidikan ke Diniyyah Putri Padang Panjang Sumbar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Susqa Pekanbaru (1990), dan S2 pada Program Pasca Sarjana IAIN Susqa Pekanbaru dalam bidang Hukum Islam (2002). Dosen Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum UIN Suska Riau ini, disamping mengajar konsentrasi mata kuliah Ilmu Falak, ia juga aktif di Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau sejak tahun 2004, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau periode 2008-2011. Dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, ia aktif pada organisasi sosial seperti DPD Al-Hidayah sebagai ketua Biro Ubudiyah (2006-2008) dan sebagai Wakil Ketua III (2008-2010); sebagai anggota Pokja Perempuan pada Komisi Pencegahan/Penanggulangan HIV/AIDS (KPAD) Propinsi Riau (2006-2008); Anggota Devisi Hukum dan HAM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Madani Riau (2006-2009) dan sebagai konsultan bidang hukum Islam (2009-sekarang). Penelitian yang pernah dilakukan a.l.: *Eksistensi Lembaga Hisab & Rukyat PTA Pekanbaru* (2005), *Perum Pegadaian sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Ekonomi Masyarakat Pekanbaru* (2001), *Analisis terhadap Konsep Nahdhatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah* (2005), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian pada Masyarakat Pekanbaru* (2007), *Studi Analisis dan Identifikasi Akar Masalah KDRT serta Alternatif Penanggulangannya di Prop. Riau* (2007), *Peran Dosen dalam Meningkatkan Mutu Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum* (2008), *Efektifitas UU No. 23 th 2004 tentang PKDRT dalam Mengeliminir Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pekanbaru* (2008), *Pemetaan Naskah Klasik di Riau* (2009), *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengadaan Air Bersih di Kec. Sabah Auh Kab. Siak (Penerapan Teknologi Penyaring Air Sederhana)* (2009). Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan buku a.l.: *Nikah Mut'ah dan Keadilan Jender* (2003), *Teologi Feminisme di Era Post-Modern* (2003), *Ibadah Haji: Sekitar Istitha'ah dan Bekal Harta Haram* (2004), *KDRT terhadap Perempuan dalam Perspektif Islam* (2004), *Pri Keadilan dalam Fikih Indonesia (Kritik terhadap beberapa Aspek Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam)* (2004), *Hukum*



*Islam dan HAM (2005), Kode Etik Hakim dalam Islam (2005), Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Fenomena Lebaran Kembar di Indonesia (2006), Peran Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (2006), Apresiasi Iqbal terhadap Perempuan (2006), Metode Qiyas (Analogi) dalam Penetapan Hukum Islam (2007), Sistem Ekologi dalam Syari'at Islam (2008), KDRT terhadap Perempuan dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian Masyarakat Pekanbaru (2008), Gender dalam Perspektif Islam dalam buku Perempuan Riau Bicara (2008), Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin (2008), Buku Dasar-Dasar Ilmu Falak (2009), Mengambil Aspek Masalah di antara Pro-Kontra Nikah Sirri (2009), Perkawinan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Islam (2009), Pekerja Sosial dalam Perspektif Islam (2009).*

## *Dra. Wilaela, M.Ag.*

*Dra. Wilaela, M.Ag.* lahir di Alas Sumbawa, 2 Agustus 1968, menyelesaikan S1 di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993) dan S2 di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam PPs IAIN Imam Bonjol Padang (1997). Saat ini tengah mengikuti pendidikan S3 Konsentrasi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung. Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau ini aktif meneliti dan menulis dengan tema yang terkait dengan sejarah, pendidikan, dan isu perempuan dan gender. Sebagai dosen, ia mengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Civic Education. Aktivitasnya di luar kampus dalam kerangka pengabdian masyarakat melalui organisasi yang diikutinya seperti Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau sebagai ketua bidang Sejarah dan Budaya (2004-2008 & 2008-2012), DPD Pengajian Alhidayah Propinsi Riau sebagai wakil ketua (2006-2010); Madrasah Development Center Depag Propinsi Riau, sebagai koordinator bidang kerjasama (2005-2009); dan LAPIS Local Group sebagai koordinator di Riau (2004-2008). Selain itu ia juga aktif di Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Suska Riau dan saat ini menjadi sekretaris lembaga kajian jender tersebut. Untuk memperkaya pengalaman dan pengetahuan, ia telah mengikuti berbagai kegiatan yang terkait dengan isu perempuan dan gender dalam bentuk pelatihan, FGD, workshop *gender sensitivity and awareness*. Sejumlah

penelitian yang telah dilakukan: *Persepsi Mubaligh Pekanbaru tentang Relasi Jender* (2002); *Perdagangan Anak di Pekanbaru: Studi Kasus Pekerja Anak Sektor Informal* (2003); *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga :Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Pekanbaru* (2003); *Perdagangan Perempuan: Studi Kasus Berita Trafficking di Harian Riau Pos Tahun 2003* (2003); *Pembantu Rumah Tangga di Pekanbaru: Studi Kasus KDRT dengan Korban PRT* (2004); *Pemetaan Madrasah Pendidikan Dasar di Riau* (2004)]; *Pemetaan Kebutuhan dan Potensi Madrasah (Madrasah Pilot) di Pekanbaru dan Kampar* (2005); *Kajian Anak Usia Sekolah Putus/ Tidak Sekolah di Propinsi Riau* (2006); *Pemahaman Sejarah Mahasiswa UIN Suska Riau: Telaah Kebutuhan Perubahan Silabus Sejarah Peradaban Islam* (2006); *Perempuan dan Pendidikan: Profil dan Dinamika Diniyah Putri Pekanbaru* (2007); *Prosopografi Dekan Perempuan UIN Suska Riau* (2008); *Sejarah Lembaga Pendidikan Perempuan di Kerajaan Siak Sri Indrapura* (2009). Adapun tulisan-tulisannya yang telah dipublikasi baik berbentuk jurnal maupun buku sebagai berikut. *Berhasilkah Perjuangan Perempuan Indonesia?* (2003); *Perdagangan Perempuan Dulu dan Kini* (2003); *Pornografi dan Pornoaksi* (2003); *Persepsi Mubaligh Pekanbaru terhadap Relasi Gender* (2006); *Perspektif Gender dalam Pembelajaran Civic Education di Perguruan Tinggi* (2003); *HAM dan Kekerasan Berbasis Gender* (2003); *Mengenal Trafficking in Person: Sejarah Perempuan dan Anak yang Tereksplotasi* (2004); *Perempuan-Perempuan Haremku* (2005); *Pedoman Panduan Pendidikan Agama Untuk MTs Propinsi Riau* (2005); *Pedoman Panduan Pendidikan Umum Untuk MTs Propinsi Riau* (2005); *Pendahuluan dalam Mutiara Yang Terjaring* (2006 dan Edisi Revisi 2007); *Khadijah Ali: Menanam tuk Dituai Hari Esok* (2006); *Encik Hasnah: Menekad Budaya* (2006); *Hamka sebagai Sejarawan Indonesia* (2008); *Biografi Tiga Dekan Perempuan UIN Suska Riau* (2008); *Pengantar dalam Direktori Perempuan Riau* (2008); *Khadijah Ali: Tokoh Pendidikan Perempuan Riau* (2008); *Perempuan dan Sejarah, dalam buku Perempuan Riau Bicara* (2008); *Naskah: Historis, Politik dan Tradisi* (2009); *Perempuan dan Pahlawan* (2009).

## *Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag.*

*Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag.* adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINSuska Riau, mengasuh mata kuliah Metodologi Studi

Islam. Lahir di Kota Tengah (Rohul) tanggal 14 Mei 1973. Menamatkan pendidikan SDN (1985), MTs (1988), Pondok Pesantren KH Ahmad Dahlan Tapanuli Selatan (1992), S1 IAIN SUSQA Pekanbaru (1996), dan S2 IAIN SUMUT Medan (1998). Selain sebagai dosen, ia mengabdikan diri pada beberapa organisasi, antara lain pada Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Suska Riau ia tercatat sebagai anggota aktif, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Madani Riau pada Divisi Hukum dan HAM (2006-2007), dan sebagai bendahara (2007 sampai sekarang), anggota BKMT Prop. Riau pada bidang da'wah (2008-sekarang), Sekretaris Asosiasi Dosen PAI (2009-sekarang). Penelitian yang pernah dilakukan a.l.: *Perjudian dan Dampaknya terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Rokan Hulu)* (2004), *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap pendidikan Akhlak Anak-Anak* (2005), *Sistem Pendidikan Islam Terpadu (Studi Terhadap SD Islam Terpadu se-Kota Pekanbaru)* (2006), *Peran Pesantren Sebagai Pusat Transformasi Sosial Studi Terhadap Pesantren al-Ma'rifiyah Pangkalan Kerinci* (2006), *Pengaruh Tingkat Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU* (2006), *Pola pendidikan Pesantren (Studi Terhadap Pesantren se Kota Pekanbaru)* (2007), *Peran Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Kepribadian Mahasiswa* (2008), *Implementasi Pendidikan Karakter pada Siswa Taman Kanak-kanak se Kota Pekanbaru* (2008). Karya ilmiah yang ditulisnya dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, antara lain: *Gender perspektif Islam dan Barat, Dampak Perjudian terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (2004), *Aliran dan Paham Kontroversial di Indonesia* (2007), *Sistem Pendidikan Islam Terpadu* (2008), *Pola Pendidikan Pesantren* (2008), *Pendidikan Karakter: Solusi Tepat Membangun watak bangsa* (2009).

*Dra. Hertina, M.Pd.*

*Dra. Hertina, M.Pd.*, lahir di Kuok, 29 Juli 1968. Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau ini juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Perbandingan Hukum dan Madzab pada fakultas yang sama. Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, ia aktif sebagai anggota bidang pendidikan pada organisasi DPD Pengajian Al-

Hidayah Prop. Riau (2007 s/d sekarang), dan sebagai anggota pengurus Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau (2008 s/d sekarang). Penelitian yang pernah dilakukan a.l: Studi analisis dan indentifikasi akar masalah kekerasan dalam rumah tangga serta alternatif penanggulangannya (2007). Karya Ilmiah a.l: Politik dan Keadilan Gender Menurut Perspektif Hukum (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam, Menanggulangi Kemiskinan Menurut Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam, Profil Adat Kampar, Partisipasi Politik Perempuan Menurut Perspektif Hukum Islam, Peranan Ninik Mamak Terhadap Anak Kementakan di Dearah Limo Koto Kampar, Marital Rapes dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Budaya Patriarki dan Perspektif Hukum Islam, Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Daerah Limo Kota Kampar, Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Masa Pelaksanaan Otonomi Daerah.